

PEREMPUAN DAN POLITIK ELEKTORAL

Studi Strategi Elektoral Balqis Diab dalam Pilkada Kota Pekalongan 2020

SKRIPSI

Program Studi S-1 Ilmu Politik



Disusun oleh

Handhita Timur Adliima

NIM : 1706016060

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2021

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 4 (Empat) Eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi dari mahasiswa :

Nama : Handhita Timur Adliima

NIM : 1706016060

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Perempuan dan Politik Elektoral : Studi Strategi Elektoral
Balgis Diab dalam Pilkada Kota Pekalongan 2020

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera dapat diujikan.
Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Semarang, 19 Januari 2021


Pembimbing

Bidang Substansi Materi



Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum

Bidang Metodologi dan Penulisan



Muhammad Mahsun, M.A

SKRIPSI
PEREMPUAN DAN POLITIK ELEKTORAL
(Studi Strategi Elektoral Balgis Diab dalam Pilkada Kota Pekalongan 2020)

Disusun Oleh

Handhita Timur Adliima

1706016060

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 19 Januari 2021 dan telah dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji

Ketua



Dr. H. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum

Sekretaris

Muhammad Mahsun, M.A

Penguji I

Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag

Penguji II

Dr. Ahwan Fanani, M.Ag

Pembimbing I

Dr. H. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum

Pembimbing II

Muhammad Mahsun, M.A

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Handhita Timur Adliima menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “*Perempuan dan Politik Elektoral : Studi Strategi Elektoral Balgis Diab dalam Pilkada Kota Pekalongan Tahun 2020*” merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang diajukan guna memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang ataupun di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Sumber-sumber lain yang menjadi refrensi dan rujukan di dalam penulisan skripsi ini saya sertakan untuk menjadi koreksi kemudian. Apabila terdapat unsur-unsur plagiarisme di dalam tulisan skripsi ini maka saya siap bertanggung jawab dan siap menerima konsekuensi yang ada. Sekian dan Terima Kasih.

Semarang, 19 Januari 2021

Yang menyatakan



Handhita Timur Adliima

NIM 1706016060

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan rahmatnya serta karunia yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “***Perempuan dan Politik Elektoral : Studi Strategi Eleltoral Balgis Diab dalam Pilkada Kota Pekalongan Tahun 2020***” tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita sangat nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa yang penulis dapatkan dan merupakan sebuah hasil akhir dari akumulasi proses pembelajaran yang penulis dapatkan selama penulis berkuliah di jurusan ilmu politik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Uin Walisongo Semarang ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses pembelajaran penulis selama berkuliah di Fisip Uin Walisongo Semarang dan di dalam penyusunan serta penulisan skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan , bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak.

Oleh karena itu penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Imam Tufiq M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan dan menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Ibu Dr. Misbah Zulfa Elizabeth M.Hum yang sekaligus juga merupakan Dosen pembimbing skripsi 1 penulis, atas segala ilmu yang diberikan dalam bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini

3. Kepala Jurusan Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang, Bapak Adib Fathoni M.Si yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini.
4. Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang, Bapak Muhammad Mahsun M.A yang juga sekaligus merupakan Dosen wali akademik dan Dosen Pembimbing skripsi atas segala ilmu ,arahan dan juga dukungan serta motivasi yang besar kepada penulis sehingga penulis mampu mengaplikasikan segala ilmu yang diberikan dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar, cepat, dan terukur.
5. Segenap jajaran dosen Fisip UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu serta bimbingan sehingga penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang diberikan ke dalam penyusunan serta penulisan skripsi yang penulis lakukan.
6. Segenap jajaran tenaga pendidikan dan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membantu memperlancar segala keperluan penulis dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
7. Ayah dan Ibu Penulis , Bapak Nur Rudito Wignyowidagdo dan Ibu Sri Hana Cahyaningsih dan adik penulis Indraswari Handhita Putri atas segala dukungan motivasi, moral,material yang tak terhingga bagi penulis sehingga mampu mengantarkan penulis sampai dengan titik ini dengan mampu menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Balgis Diab dan Bapak Basyir Achmad Syawie selaku informan utama penulis yang sudah memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis sehingga penulis dapat menyusun serta menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar tanpa halangan apapun.
9. Segenap tim pemenang Balgis Diab selaku informan pendukung yang turut memberikan informasi kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik
10. Rekan-rekan dekat penulis M.Akhmad Najich Alfayn, Emilia Palupi Ambarsari, Diana Fitri Hapsari, Dede Hafiz Al Faruq,Heni Fitriyanti,

Hibatullah Hauzan Hanif, Abdullah Azzam, Lutfi Ichsanudin, M Matori Ridwan, Dery Mukarom, Zidna Azzahra, Wildan Irfani, Siti Aminatun Nisah, Risma Syahida, Rizka Ainun Izza, Nur Asyiah Indah, Nur Zahrit Ahya Sofiya, Fitra Wulandari, Alif Laela Rahma Nafisa, Mauliana Maghfiroh, Nia Yunit Asari, dan Siti Dewi Masithoh yang telah memberikan dukungan motivasi dan semangat yang tak terhingga bagi penulis.

11. Rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Islam dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah UIN Walisongo Semarang khususnya Ridlo, Azam, Osama, Zulfian, Diyana, Wahyu, Icha, Yusuf, Selsa, Fitri Maesaroh dan Tiara yang telah memberikan kesempatan penulis untuk berkembang dan berorganisasi.
12. Adik-adik asuh penulis Dimas, Arif, Rajendra, Yustian, Dhinny, Dhinar, Yanun Anbiya, Eva Mulyati semoga mampu menjadi penerus penulis yang lebih baik kedepannya
13. Seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Kritik dan saran masukan sangat penulis butuhkan agar menjadi koreksi dan meningkatkan kualitas dari tulisan penulis. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih atas segala perhatian yang diberikan. Sekian.

Semarang, 19 Januari 2021

Penulis



Handhita Timur Adliima

NIM 1706016060

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirohim

Dengan mengucapkan segala syukur kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam

Saya persembahkan sebuah karya ini untuk Kedua orang tua saya Bapak Nur Rudito dan Ibu Sri Hana Cahyaningsih yang telah memberikan seluruh doa dan dukungan serta menyertai saya dalam setiap langkah kehidupan

Untuk kedua dosen pembimbing sekaligus mentor saya, ibu Misbah Zulfa Elizabeth dan bapak Muhammad Mahsun yang telah memberikan segala ilmu dan bimbingannya serta motivasi terbesar agar bisa menjadi dua orang hebat seperti beliau berdua

Dan untuk Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik prodi Ilmu Politik yang menjadi tempat bagi saya untuk menorehkan sepercik tinta sejarah dan pijakan awal kesuksesan saya di masa depan

MOTTO

“ Untuk mengetahui batas maksimal segala kemungkinan, kau harus mencoba melakukan hal-hal yang orang lain anggap tidak mungkin untuk dilakukan. Dan selama kau belum mati dalam mencobanya, jangan katakan padaku itu tidak mungkin dilakukan ”

(Sultan Muhammad Al-Fatih)

“ it's not who you are underneath but what you do that defines you ”

(Bruce Wayne)

ABSTRAK

Partisipasi perempuan dalam politik telah mengalami peningkatan sejak lahirnya era Reformasi di Indonesia. Keikutsertaan perempuan dalam kontestasi politik seperti pilkada merupakan jaminan sistem demokrasi dimana perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam dinamika politik. Dalam perjalanannya banyak calon kandidat perempuan yang pada akhirnya mampu memperoleh kemenangan dalam kontestasi Pilkada. Keberhasilan perempuan memenangkan kontestasi politik di beberapa daerah menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas dan kemampuan yang sama dengan laki-laki dalam dinamika politik elektoral. Balgis Diab merupakan salah satu calon kandidat perempuan yang maju dalam kontestasi Pilkada Kota Pekalongan di tahun 2020 ini. Ini merupakan hal yang baru pertama kali terjadi di Kota Pekalongan dimana terdapat calon kandidat Walikota perempuan yang mengikuti Pilkada. Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti, yaitu untuk melihat bagaimana strategi elektoral yang digunakan Balgis untuk memenangkan kontestasi Pilkada Kota Pekalongan di tahun 2020 ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menarasikan serta melihat bagaimana strategi elektoral yang digunakan Balgis Diab dalam membentuk mesin politiknya dalam rangka memobilisasi suara masyarakat di kontestasi Pilkada Kota Pekalongan. Data lapangan diperoleh dengan melakukan observasi lapangan, dilanjutkan dengan proses wawancara, dokumentasi dan juga dengan studi literatur dari tulisan-tulisan terkait sebelumnya. Analisis data dilakukan menggambarkan fenomena dari data yang ditemukan di lapangan dan dikaitkan dengan teori politik yang relevan. Dalam penelitian ini digunakan teori strategi politik elektoral untuk dapat menjabarkan fenomena lapangan menjadi suatu analisa yang informatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Balgis membangun mesin politik yang terdiri dari elit-elit politik partai pendukung, internal keluarga dan jaringan kolega sebagai tim pemenangnya dalam Pilkada. 2 Tim pemenangan yang dibangun Balgis terbagi empat struktur yakni tim pemenangan tingkat Kota, kecamatan, kelurahan, hingga ke tingkat akar rumput. 3 Dalam upaya memobilisasi suara masyarakat, Balgis menerapkan strategi penguatan jaringan mesin politik dan pemetaan wilayah guna menerapkan strategi marketing politik yang meliputi *Segmentasi* dan *Targeting, Positioning*, serta pendataan konstituen. Akan tetapi pada kenyatannya Balgis mengalami kekalahan dalam kontestasi Pilkada tahun 2020 ini. Analisa kekalahan Balgis disebabkan oleh beberapa faktor yakni tidak solidnya jaringan mesin politik, serangan isu gender dan SARA, serta tidak didukungnya Balgis oleh jaringan pengusaha di Kota Pekalongan. Hal ini menarik sebab pencalonan Balgis yang memiliki elektabilitas tinggi di masyarakat serta didukung mayoritas partai politik di DPRD belum mampu memperoleh kemenangan di dalam kontestasi Pilkada di Kota Pekalongan.

Kata Kunci : Perempuan, Politik, Strategi Elektoral, Mesin Politik, Pilkada

ABSTRACT

The participation of women in politics has increased since the Reformation era in Indonesia. Women's participation in political contests such as elections is a guarantee of a democratic system in which women are given equal opportunities to men in political dynamics. With time, many female candidates were eventually able to win the election contest. The success of women winning political contests in some regions shows that women have the same capacity and capability as men in electoral political dynamics. Balgis Diab is one of the female candidates who advanced in the Pekalongan City Election contest in 2020. This is the first time this has happened in Pekalongan city where there are candidates for Female Mayoral candidates who participated in the local elections. It is interesting to see how the electoral strategy used by Balgis to win the Pekalongan city election contest in 2020.

This research uses a qualitative method with a descriptive analysis approach to see how the electoral strategy used by Balgis Diab in forming its political machine to mobilize public vote in Pekalongan city election contest. Field data is obtained by conducting field observations, followed by interviews, documentation, and also with literature studies from previous related writings. The analysis of the data is proceeded by describing the data found in the field and analyzing the data with the relevant theories of politics. The theories applied in this study are the theories of electoral political strategy. The application of these theories is in order to describe the phenomenon of the field into an informative academic analysis.

The results of this study showed that: 1) Balgis built a political machine consisting of the political elites of supporting parties, internal families, and networks of colleagues as her winning team in the regional elections. 2). The winning team built by Balgis is divided into four structures, namely the winning team at the city level, sub-district, village, to the grassroots level. 3. To mobilize the vote of the community, Balgis implemented strategies to strengthen the network of political machines and mapping the region to implement political marketing strategies that include Segmentation, Targeting, and Positioning. However, Balgis defeated in the contest of the 2020 regional elections. Analytically, Balgis' defeat was caused by several factors, such as disloyal of the political machine network, the attack on gender issues and SARA, and the lack of support from the network of entrepreneurs in Pekalongan City. This is interesting because Balgis candidacy has high electability in the community and supported by a majority of political parties in the DPRD, but it has not been able to support her to win the regional elections in Pekalongan city.

Keywords: *Women, Politics, Electoral Strategy, Political Machine, Local Elections*

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	2
KATA PENGANTAR	5
PERSEMBAHAN	8
MOTTO	9
ABSTRAK	10
<i>ABSTRACT</i>	11
DAFTAR ISI	12
DAFTAR TABEL	15
DAFTAR GAMBAR	16
BAB I	17
PENDAHULUAN	17
A. LATAR BELAKANG	17
B. RUMUSAN MASALAH	22
C. TUJUAN	22
D. MANFAAT PENELITIAN	23
E. TINJAUAN PUSTAKA	24
1. Strategi Politik Elektoral	24
2. Perempuan dan Politik Elektoral	32
F. METODE PENELITIAN	43
1. Jenis dan pendekatan penelitian	43
2. Sumber dan jenis data	44
3. Teknik Pengumpulan data	45
4. Teknik Analisis Data	46
G. SISTEMATIKA PENULISAN	47
BAB II	50
GENDER, POLITIK, DAN STRATEGI ELEKTORAL	50
A. Gender dan Politik	50
1. Konsep Gender	50
2. Konsep Gender dan Politik	52
B. Strategi Elektoral	54

1. Strategi Politik Elektoral	54
2. Mesin Politik dan Tim Sukses	57
3. Kampanye Politik	59
BAB III	61
LANDSCAPE DAN DINAMIKA POLITIK KOTA PEKALONGAN	61
A. Gambaran Umum Kota Pekalongan.....	61
1. Kondisi Geografis.....	61
2. Kondisi Topografis.....	62
3. Administratif Wilayah Kota Pekalongan	63
4. Demografis Kota Pekalongan.....	65
5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kota Pekalongan.....	69
B. Dinamika Politik dan Pilkada 2020 Kota Pekalongan	76
1. Sejarah Pemerintahan Kota Pekalongan.....	76
2. Dinamika Eksekutif dan Legislatif Kota Pekalongan	79
3. Diskursus dan Dinamika Pilkada Kota Pekalongan 2020	87
BAB IV	94
BALGIS DIABS SEBAGAI FIGUR KAJIAN	94
A. Profil Balgis Diab.....	94
1. Profil Genealogis Balgis Diab	94
2. Profil Pendidikan dan Pengusaha	95
3. Kiprah Sosial Balgis Diab	97
B. Perjalanan Karir dan Politik Balgis Diab	98
1. Tahapan Karir Politik Balgis Diab	98
2. Kekuatan Jaringan Politik Balgis Diab	102
BAB V.....	106
STRATEGI ELEKTORAL DALAM MEMBANGUN MESIN POLITIK	106
A. Jaringan sosial sebagai modal pembentukan mesin politik.....	106
1. Pembentukan Jaringan Tim Pemenangan Tingkat Kota	108
2. Pemebentukan tim jaringan Elit Parpol, Keluarga, dan Kolega.....	112
B. Strategi Jaringan Mesin Politik Politik Akar Rumput	115
3. Pembentukan Tim Kecamatan, Kelurahan dan RT-RW	115

4. Tim Jaringan “Pecut” Akar Rumput	116
BAB VI	118
STRATEGI MOBILISASI SUARA MASYARAKAT DAN ANALISIS KEGAGALAN DALAM KAMPANYE BALQIS DIAB	118
A. Strategi Penguatan Jaringan Internal Mesin Politik	118
1. Penguatan Jaringan Elit Partai Politik	118
2. Penguatan Jaringan Sosial Kultural NU	120
3. Penguatan Jaringan Keluarga dan Kolega	122
B. Pemetaan Wilayah Sebagai Basis Pengumpulan Dukungan Suara.....	123
1. Pengamatan Segmentasi Pasar dan Targeting Masyarakat	127
2. Positioning Politik Tim Pemenangan Balgis Diab	132
3. Pendataan Konstituen	143
C. Analisis Gagalnya Strategi Elektoral Balgis Diab dalam Mobilisasi suara masyarakat.....	145
1. Permasalahan Internal Mesin politik Balgis Diab.....	148
2. Isu Gender dan RAS dalam Pilkada Kota Pekalongan.....	153
3. Jaringan Pengusaha, Modal dan Vote Buying.....	160
BAB VII.....	165
PENUTUP.....	165
A. KESIMPULAN	165
B. SARAN DAN REKOMENDASI	168
DAFTAR PUSTAKA	170
LAMPIRAN.....	174
CURICULUM VITAE.....	176

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Luas Wilayah Tiap Kecamatan di Kota Pekalongan.....	63
Tabel 3.2	Distribusi Presentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk tiap kecamatan di Kota Pekalongan 2019.....	66
Tabel 3.3	Distribusi Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan dalam rentang waktu 2015-2019 di Kota Pekalongan	67
Tabel 3.4	Distribusi Penduduk Kota Pekalongan Sesuai Kelompok Umur 2019	67
Tabel 3.5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019	68
Tabel 3.6	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang dianut Kota Pekalongan 2019.....	69
Tabel 3.7	Jumlah Kursi DPRD Kota Pekalongan Pemilihan Legislatif 2014-2019	84
Tabel 3.8	Jumlah Kursi DPRD Kota Pekalongan Pemilihan Legislatif 2019-2024	86
Tabel 4.1	Penghargaan yang di terima Balgis Diab dalam bidang Usaha Batik	97
Tabel 4.2	Organisasi-organisasi Sosial Masyarakat yang di ikuti Balgis Diab	98
Tabel 5.1	Struktur Inti Tim Pemenangan Balgis Diab tingkat Kota Pekalongan.....	112
Tabel 6.1	Pemetaan Segmentasi Pasar Masyarakat yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Balgis Diab dalam Pilkada 2020..	127
Tabel 6.2	Diagram Presentase dan Tabel Perolehan Suara Pilkada Kota Pekalongan 2020.....	147

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Peta Jenis Tanah di Kota Pekalongan.....	62
Gambar 3.2	Peta Pembagian Wilayah Administratif Kota Pekalongan.....	64
Gambar 5.1	Skema Jaringan Mesin Politik Balgis Diab.....	111
Gambar 5.2	Sistematika Jaringan Tim Sukses Akar Rumput.....	116
Gambar 6.1	Jaringan Nahdlatul Ulama dalam Mesin Politik Balgis Diab.....	121
Gambar 6.2	Peta Kekuatan Suara Balgis Diab dalam Pilkada 2020.....	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Munculnya kandidat calon kepala daerah Perempuan di dalam kontestasi Pilkada bukanlah hal baru di Indonesia. Keikutsertaan perempuan di dalam Pilkada merupakan suatu ajang pembuktian kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa perempuan juga dapat ikut serta berperan di dalam pelaksanaan kontestasi politik. Dengan adanya partisipasi perempuan di dalam kontestasi politik akan membuka kesempatan bagi perempuan untuk ikut menunjukkan eksistensinya dalam dunia politik. Hal ini bukan tanpa alasan, karena di beberapa pelaksanaan Pilkada partisipasi perempuan yang ikut berkontestasi masih dianggap sangat rendah. Perjuangan perempuan untuk memperoleh kesetaraan dalam kedudukan dan peran di dalam kancah perpolitikan di Indonesia bukanlah barang yang baru hanya saja memang terkadang banyak pihak-pihak yang belum bisa memahami bagaimana alur perjuangan perempuan Indonesia dalam mewujudkan hal-hal tersebut.

Menurut Heddy Shri Ahimsa Putra (dalam Elizabeth,2019) , untuk memahami kedudukan dan peran kaum perempuan Indonesia tentu tidak akan lengkap dan tidak tepat jika tidak disertai pemahaman tentang kedudukan perempuan Indonesia di masa lampau. Dalam perjalanannya , peran perempuan Indonesia juga terlihat di dalam pembentukan organisasi dan pergerakan perempuan untuk bekerjasama dengan kaum Laki-laki di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pembahasan mengenai peran perempuan akan sedikit berbeda apabila disangkutkan dengan keterlibatan peran perempuan di dalam ranah Politik. Terdapat beberapa latar belakang yang menjadi alasan mengapa pembahasan mengenai Perempuan dan Politik menjadi sangat menarik. Menurut Elizabeth (2019) ,alasan tersebut antara lain: *Pertama*, secara umum di dalam pandangan perempuan politik adalah dunia yang asing bagi mereka meskipun beberapa

perempuan telah banyak berkiprah di dalam dunia perpolitikan formal. Dan dari sini masih sangat banyak sekali anggapan yang menyatakan bahwa politik merupakan bagian dari “Dunia Publik” yang belum tentu akrab dikenal oleh kaum perempuan. *Kedua*, di kalangan masyarakat masih banyak yang berpandangan bahwa perempuan hanyalah dilihat sebagai objek dan menganggap bahwa politik bukan dunia yang tepat bagi kaum perempuan. (Lihat Fakih, 1996)

Pelaksanaan Pilkada di Indonesia terbukti dapat menjadi salah satu mekanisme politik yang mampu merepresentasikan kapasitas serta kemampuan perempuan dalam menduduki jabatan politik di tingkat daerah namun, fakta di lapangan tidak menunjukkan jalan yang mudah. Dalam aturan UU No.8 Tahun 2015 tentang tata cara pemilihan kepala daerah bersifat netral gender namun, Mekanisme pencalonan melalui partai politik yang masih didominasi oleh para pria dan juga persyaratan minimal kursi koalisi partai di DPRD di aturan tersebut dapat diasumsikan sebagai penghalang calon kandidat perempuan ketika akan maju dalam kontestasi Pilkada. Hal berdampak pada masih minimnya partisipasi perempuan yang maju sebagai calon kandidat kepala daerah dalam kontestasi Pilkada. Tidak hanya berhenti disitu saja, tantangan selanjutnya adalah ketika seorang calon kandidat perempuan telah berhasil mendapatkan surat rekomendasi pencalonan dari partai politik dan juga didukung oleh mayoritas partai di DPRD kemudian kandidat perempuan tersebut maju dalam kontestasi politik seperti pilkada. Pilkada serentak tahun 2020 ini akan dilaksanakan di 270 daerah di Indonesia. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar bahwa dari 270 daerah di Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada serentak terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Jawa Tengah akan diikuti oleh para pasangan calon peserta dari 21 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Melihat beberapa faktor mengenai hambatan-hambatan calon kandidat perempuan yang akan maju dalam kontestasi pilkada khususnya di Jawa Tengah, maka calon kandidat perempuan tersebut harus segera memikirkan

strategi politik yang akan dia gunakan dalam proses kampanye pemenangan Pilkada. Sebuah strategi merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam dinamika elektoral sebuah strategi sangat perlu dibangun dengan tujuan agar dapat memenangkan kontestasi elektoral seperti pilkada. Strategi yang dimaksud di implementasikan kedalam sebuah strategi politik. Seperti yang dikatakan oleh Schroeder (2013), Strategi politik merupakan strategi yang digunakan guna merealisasikan cita-cita politik. Kandidat perempuan yang maju dalam kontestasi elektoral pasti menggunakan strategi-strategi politik yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kampanye.

Seperti yang kita ketahui bahwa dinamika elektoral tidak terlepas dari adanya strategi politik yang ditujukan untuk pemenangan kandidat. Hal ini tidak terkecuali juga dilakukan oleh para kandidat perempuan dalam kontestasi pilkada. Mereka melakukan strategi-strategi elektoral yang dikemas kedalam strategi kampanye. Strategi kampanye ini merupakan bentuk khusus dari strategi politik yang memiliki tujuan guna mempengaruhi rakyat agar memberikan suara untuk mendukung calon perempuan tersebut sehingga calon kadidat kepala daerah perempuan tersebut mampu memenangkan kontestasi politik. Pembahasan mengenai strategi elektoral yang dilakukan oleh kandidat perempuan sudah banyak dilakukan. Jumriani (2019) dalam penelitiannya mengenai kontestasi pilkada di Kabupaten Luwu Utara mampu menganalisis strategi elektoral yang dilakukan oleh kandidat perempuan yang mengikuti kontestasi pilkada di kabupaten tersebut. Kandidat ini menerapkan sebuah strategi dengan memperkuat pengaruh melalui politik identitas terutama identitas perempuan. Strategi ini dilakukan untuk menggaet suara-suara masyarakat terutama perempuan dengan implementasi program-program yang pro terhadap kaum perempuan. Selain di implementasikan dalam sebuah strategi politik identitas perempuan, kandidat perempuan juga membangun hubungan yang terjalin dengan kehidupan masyarakat dimana pembangunan modal sosial ini mencerminkan hasil interaksi sosial antara kandidat dengan masyarakat. Dari adanya Modal sosial ini kandidat kepala daerah perempuan mampu menghasilkan jaringan pemenangan dengan

pola kerjasama yang berpengaruh besar terhadap kemenangan pilkada. Hal ini seperti apa yang dituliskan oleh Muhatir Hi Hidayat (2016) mengenai strategi pemenangan kandidat kepala daerah perempuan di Minahasa Utara. Selain modal sosial, strategi elektoral lainnya yang juga diketahui adalah melalui strategi pendekatan modal seperti modal sosial, modal ekonomi modal budaya serta modal simbolik seperti yang dianalisa oleh Ika Kartika (2019). Strategi elektoral dilakukan dalam hal kampanye kontestasi Pilkada merupakan hal yang lazim dilakukan. Hal ini dilihat sebagai sebuah peluang untuk merebut pengaruh dalam kontestasi politik yang dilakukan dan semua ini dilakukan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meraup suara dan memenangkan kontestasi pilkada. sebagai sebuah cara untuk memperoleh kemenangan, strategi elektoral yang dilakukan oleh kandidat perempuan haruslah direncanakan dengan sistematis. Dengan perencanaan yang sistematis serta cermat strategi elektoral tersebut akan bermanfaat bagi calon kandidat. Keputusan-keputusan strategis yang diambil dalam penerapan strategi elektoral juga harus melihat konteks, ruang lingkup serta disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan diri dari kandidat kepala daerah perempuan yang mengikuti kontestasi pilkada.

Balqis Diab bukanlah nama yang baru bagi masyarakat Kota Pekalongan. Kiprahnya di Kota Pekalongan sudah banyak diketahui oleh masyarakat baik itu dalam kegiatan sosial maupun kegiatan politik. Selain dikenal sebagai Istri dari mantan Walikota Pekalongan, H.M Basyir Ahmad, Balqis Diab juga merupakan salah satu anggota DPRD Kota Pekalongan dari Fraksi Partai Golkar dan Menjadi Ketua DPRD Kota Pekalongan di tahun 2019. Tidak hanya berhenti disitu saja, karier politiknya berlanjut di tahun 2020 ini dengan maju sebagai calon Walikota Pekalongan dalam kontestasi Pilkada Kota Pekalongan 2020. Merujuk pada *Radar Pekalongan* tertanggal 7 Agustus 2020, bahwa pembacaan deklarasi Pencalonan Balqis Diab sebagai Calon Walikota Pekalongan diadakan di Gedung Aswaja Kota Pekalongan. Di dalam deklarasi pencalonan tersebut, Balqis Diab dipasangkan dengan M. Machrus Abdullah yang akan mendampingi sebagai calon Wakil Walikota Pekalongan dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020. Pasangan calon

Balqis Diab dan M. Machrus ini diusung oleh enam Partai Politik diantaranya adalah Partai Golkar, PKB, PKS, PAN, Gerindra, dan Nasdem. Pencalonan Balqis Diab dan M. Machrus merupakan hasil koalisi dua partai besar di Kota Pekalongan yaitu Partai Golkar dan Juga PKB. Koalisi antara Partai Golkar dan PKB didukung lima partai lain seperti yang sudah disebutkan sebelumnya yakni, PAN, PKS, Gerindra, PPP, dan Nasdem. Apabila di dalam Koalisi pengusungan ini para partai pengusung konsisten maka ada 29 kursi dari 35 Kursi di DPRD yang mendukung dan hanya menyisakan PDIP dan Hanura saja yang tidak masuk ke dalam koalisi pencalonan Balqis dan Machrus ini dan apabila PDIP serta Hanura berkoalisi maka hanya akan mendapatkan 6 kursi saja di DPRD sehingga tidak bisa mengajukan pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Hal ini disebabkan karena untuk mengajukan pasangan calon, partai koalisi dipersyaratkan minimal memiliki 7 Kursi di DPRD (20% dari jumlah Kursi di DPRD) seperti yang dikutip dari *SuaraMerdeka.com* tertanggal 8 Agustus 2020. Pada mulanya pencalonan Balqis Diab dan M. Machrus bakal menjadi Pasangan Calon Tunggal di Pilkada Kota Pekalongan 2020 namun seiring dengan berjalannya waktu terjadi dinamika politik di antara Partai-partai pendukung Koalisi Balqis-Machrus. Keluarnya PAN dan PPP dari partai koalisi kemudian bergabung dengan PDI-P dan HANURA mengusung pasangan Afzan Arslan Djunaid dan Salahudin sebagai kubu penantang Balqis-Machrus. Hal ini menjadi lebih menarik karena pada akhirnya pasangan Balqis-Machrus bukan menjadi pasangan tunggal yang akan berkontestasi dalam Pilkada Kota Pekalongan 2020.

Melihat sejarah Kota Pekalongan dari masa ke masa, pemerintahan di Kota Pekalongan selalu dipimpin oleh seorang pemimpin laki-laki. Bahkan ketika dimana rakyat dapat memilih pemimpin atau kepala daerahnya secara langsung pun Kota Pekalongan menghasilkan Pemimpin Laki-laki diantaranya adalah H.M Basyir Ahmad (2005-2015) dan H. Achmad Alf Arslan Djunaid (2015-2017) yang kemudian dilanjutkan oleh H.M Saelany Mahfudz (2017-Sekarang) yang naik menjadi Walikota Pekalongan setelah Walikota Sebelumnya Achmad Alf Arslan Djunaid Wafat pada tahun 2017. Dari sejarah tersebut diketahui bahwa selama ini

Kota Pekalongan selalu dipimpin oleh pemimpin Laki-laki dan belum pernah dijabat oleh seorang perempuan. Pencalonan Balqis Diab dalam kontestasi Pilkada Kota Pekalongan merupakan satu fase baru dalam sejarah Kota Pekalongan dimana Kota Pekalongan untuk pertama kalinya akan mempunyai calon Kepala Daerah perempuan. Akan tetapi pada kenyatannya Balqis mengalami kekalahan dalam kontestasi Pilkada tahun 2020 ini. Dari keseluruhan latar belakang yang telah diuraikan sangat menarik untuk dilihat dan dianalisis bagaimana Balqis Diab sebagai Bakal Calon Walikota perempuan pertama di Kota pekalongan menggunakan strategi elektoral untuk menyusun mesin politik dalam strategi kampanye di Pilkada Serentak Kota Pekalongan 2020. Selain itu juga akan dilakukan analisis terhadap faktor-faktor apa saja yang menjadi sebab kekalahan Balqis. Dengan berdasarkan ketertarikan itulah penulis mengangkat tema ini untuk dikaji lebih dalam pada skripsi yang akan penulis tulis.

B. RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab tiga permasalahan utama dari latar belakang yang telah diuraikan. Adapun rincian rumusan permasalahan dijabarkan sebagai berikut :

1. Siapakah sosok Balqis Diab dan bagaimana sepak terjangnya dalam dunia politik di Kota Pekalongan?
2. Bagaimana Strategi Elektoral Balqis Diab dalam pembentukan mesin politik untuk kemenangan di Pilkada Kota Pekalongan 2020 ?
3. Bagaimana strategi elektoral dalam mobilisasi suara yang digunakan Balqis Diab dan analisis kekalahannya dalam Kampanye di Pilkada Kota Pekalongan 2020 ?

C. TUJUAN

Setelah merumuskan permasalahan yang akan dikaji dari topik Strategi Elektoral Balqis Diab dalam Pilkada Kota Pekalongan 2020, selanjutnya akan kami uraikan tujuan dari penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui siapa dan bagaimana sosok seorang Balqis Diab dan Sepak Terjangnya di Kota Pekalongan.
2. Mengetahui bagaimana seorang Balqis Diab menggunakan Strategi Elektoralnya untuk membangun Mesin Politik dari tim koalisi yang telah dibentuk dalam rangka Pemenangan Pilkada Kota Pekalongan 2020.
3. Mengetahui bagaimana strategi elektoral dalam mobilisasi suara yang digunakan Balqis Diab dan analisis kekalahan dalam Kampanye Pilkada Kota Pekalongan 2020.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari Penulisan Skripsi ini secara khusus dapat dijabarkan menjadi manfaat secara teoritik dan juga manfaat secara parktis. Adapun penjabarannya dapat dituliskan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritik
 - a. Penelitian ini dapat membangun khasanah baru keilmuan dan mengembangkan wawasan mengenai peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam politik khususnya di dalam kontestasi Pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan di Indonesia.
 - b. Penelitian ini secara teoritis memberikan gambaran bagaimana seorang kandidat calon kepala daerah perempuan menggunakan strategi elektoral dalam strategi pemenangnya di kotestasi Pilkada Serentak 2020.
2. Manfaat Praktis
 - a. Secara praktis penulisan peneltian ini dapat dijadikan pedoman tentang bagaimana seharusnya strategi elektoral dapat digunakan oleh seorang kandidat Perempuan dalam membangun mesin politik untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
 - b. Penelitian ini dapat diajdikan sebagai sumber rujukan bagi peneliti dan penulis lain yang ingin melakukan penelitian tema serupa yang lebih dalam dan komprehensif.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai perempuan dan politik telah banyak dilakukan oleh para ahli. Hasil penelusuran penulis kajian pustaka ini akan dibagi menjadi dua bagian kajian, yaitu pertama mengenai strategi elektoral yang dilakukan oleh calon kandidat perempuan dalam kontestasi Pemilu dan bagian kedua mengenai perempuan dan politik elektoral.

1. Strategi Politik Elektoral

Kajian ini akan bersumber dari tulisan beberapa penulis dengan topik kajian mengenai strategi politik elektoral perempuan. Artikel jurnal pertama adalah artikel yang ditulis oleh Jumriani (2019) dengan judul *Perempuan dan Politik (Strategi Komunikasi Politik untuk Pemenangan Bupati Indah Putri pada Pilkada Luwu Utara 2015)*. Penelitian dalam jurnal ini ditulis dengan maksud memberikan penjelasan keterkaitan antara kesetaraan gender dan kapabilitas calon perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Luwu Utara. Fokus yang dibangun dalam penelitian ini adalah formasi politik dalam pemilihan kepala daerah Luwu Utara dengan menempatkan perempuan sebagai kandidat utama pada Pilkada serentak 2015. Kontestasi Pilkada Luwu Utara yang menjadi obyek kajian penelitian ini memberikan sebuah gambaran tentang meningkatnya kekuatan identitas perempuan dalam hal ini adalah seorang tokoh bernama Indah Putri Indriani yang mengikuti kontestasi Pemilihan Bupati Luwu Utara untuk periode 2016-2021. Dalam tulisan ini, penulis memunculkan argumen mengenai Pemilihan Kepala daerah di Luwu Utara dapat memberikan gambaran mengenai kekuatan identitas yang dibangun oleh sosok Indah Putri Indriani dalam kontestasi Pilkada yang diikutinya. Penulis mengatakan kekuatan Indah Putri Indriani ini dibangun dengan identitas yang kuat dibarengi dengan modal sosial dan Modal Politik yang mumpuni. Dalam hasil pembahasan, penulis menganalisis mengenai strategi yang digunakan oleh Indah Putri Indriani dalam kontestasi Pilkada Luwu Utara. Hal yang dilakukan pertama oleh dari analisis penulis adalah pemanfaatan isu kesetaraan gender. Pemanfaatan isu tersebut di kemas dalam program-program yang ditawarkan dalam masa kampanye. Hal ini sangat dimanfaatkan oleh Indah

untuk kemudian membalik persepsi masyarakat yang sebelumnya cenderung memarginalisasikan partisipasi perempuan.

Penulis menjelaskan bahwa strategi pemanfaatan isu kesetaraan gender yang dilakukan oleh kandidat indah putri menjadi saran praktis bagi kandidat tersebut untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat tanpa membedakan gender. Berikutnya strategi yang digunakan adalah pemanfaatan isu kapabilitas calon perempuan. Indah putri Indriani merupakan wakil bupati Luwu Utara periode 2010-2015. Secara tidak langsung kandidat ini sudah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi oleh pemerintahan sebelumnya. Hal inilah yang kemudian dikemas dalam merumuskan visi dan misi serta program kerja yang ditawarkan kepada masyarakat dalam kontestasi Pilkada Luwu Utara ini sebagai sarana peningkatan capabilitas calon kandidat perempuan. Affirmative action dalam pemilihan kepala daerah Luwu Utara memberikan kesempatan bagi kandidat Indah Putri Indriani sebagai perwakilan perempuan ikut dalam kontestasi politik dengan segala macam bentuk dinamikanya. Memanfaatkan strategi yang ada dengan membentuk strategi penguatan identitas yang diformulasikan dalam kampanye untuk tetap memberikan edukasi bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam meraih jabatan politik.

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Alrdi Samsa (2020) yang diterbitkan oleh Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora) dengan judul *Strategi Politik Identitas Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 (Studi tentang kemenangan Ade Kartika di Daerah Pemilihan II Kabupaten Majalengka)*. Tulisan ini terfokus pada strategi politik yang digunakan oleh Ade Kartika dalam Pemilu legislatif 2019. Dalam hasil pembahasan, penulis menganalisa pembentukan strategi politik yang digunakan oleh Ade Kartika yang pertama adalah melalui Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sebagai awal pembentukan identitas. Penulis mengungkapkan sosok Ade Kartika yang notabene merupakan tokoh masyarakat dan juga istri dari Kepala Desa Kertajati sudah cukup dikenal masyarakat. Hal ini ditambah dengan posisinya sebagai

Ketua PKK semakin mempermudah strategi politik yang dibangun dalam konteks Pemilu Legislatif di Dapil II Kabupaten Majalengka. Selain aktif di dalam Organisasi PKK, Ade juga aktif dalam organisasi Karang Taruna Desa serta pengurus remaja masjid wanita. Dengan modal ini digunakan secara matang oleh Ade Kartika sebagai formulasi janji kampanye dalam bentuk membawa aspirasi perempuan dalam pesan feminis dan kesetaraan gender di kampanyenya. Terlebih lagi keterlibatan perempuan dalam kontestasi pemilu di Kabupaten Majalengka masih minim. Strategi politik yang digunakan Ade Kartika melalui pengangkatan isu keterwakilan perempuan dilakukan dengan cara merangkul masyarakat melalui Tokoh Agama, Ibu-ibu pengajian dan juga para perangkat desa.

Dalam analisa lebih lanjut, Ade Kartika memiliki program unggulan yakni PEKA (Perempuan Kepala Keluarga) dengan targetnya adalah pemberdayaan Janda-janda melalui bantuan modal awal untuk dapat bekerja dan mencari nafkah keluarga dari tingkat pekerjaan mikro. Menggunakan strategi pengangkatan isu-isu feminis yang masih sangat jarang digunakan dapat dimanfaatkan sebagai pembentukan citra diri sebagai kandidat yang mampu mengakomodir golongan perempuan marjinal. Strategi berikutnya yang dilakukan adalah Pembentukan Tim sukses sebagai ujung tombak Pembentukan isu Politik identitas gender. Ade membentuk tim sukses atas dasar azas kekeluargaan dengan koordinator utama tidak terlepas dari keluarganya sendiri. Struktur lain yang dibentuk dalam mesin politik Ade Kartika meliputi Juru Kampanye, Penyanggah dana dan juga Koordinator tim sukses. Dengan melihat fenomena tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pendekatan kultural yang dilakukan Ade Kartika dalam pembangunan politik identitas berbasis gender menjadi sebuah strategi dan faktor kuat kemenangan suara konstituen meskipun dalam konteks yang dilakukan, politik yang dibangun masuk ke dalam ranah instrumentalisme dimana identitas etnis, agama serta gender dijadikan sebagai sarana calon untuk memperoleh suara demi keuntungan diri sendiri dalam bingkai strategi elektoral.

Kajian dari Sekripsi yang ditulis oleh Muhatir Hi Hidayat (2016) judul *Politik Pemenangan Pasangan Kandidat Vonnie Anneke Panambunan-Joppi*

Lengkong Dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015. Penulisan skripsi ini menggunakan metode Kualitatif dalam konteks mengetahui strategi politik Pemenangan dari pasangan Vonnie Anneke dan Joppi Lengkong. Dalam tulisan ini diungkapkan bahwa kandidat Vonnie Anneke sebelumnya pernah terjerat kasus tindak pidana korupsi dan dipenjara selama 18 bulan, namun pada pelaksanaan Pilkada Minahasa Utara, Vonnie Anneke dan Joppi Lengkong mampu memenangkan Pilkada dengan mengalahkan kandidat penantang yang di dukung oleh mayoritas partai penguasa dan notabene bupati incumbent.

Strategi yang digunakan oleh pasangan Vonnie Anneke dan Joppi Lengkong adalah dengan beberapa pendekatan modal, yang pertama adalah modal Ekonomi. Menurut wawancara yang dilakukan penulis kepada Wakil Ketua Partai Gerindra Minahasa Utara, kandidat Vonnie-Joppi menggunakan strategi finansial sebagai Biaya Politik yang dilakukan, terutama dalam kampanye. Selanjutnya dengan menggunakan modal kultural hal ini dilakukan dengan cara memunculkan representasi putra daerah dalam kontestasi Pilkada ini. Representasi putra daerah dimunculkan melalui sosok Joppi Lengkong sebagai kandidat calon wakil Bupati yang berasal asli dari Minahasa Utara dan dari sinilah modal sosial bangkit guna memperkuat strategi kemenangan pasangan ini. Modal sosial digunakan sebagai salah satu strategi kemenangan pasangan Vonnie-Joppi dengan membangun hubungan yang terjalin dengan kehidupan masyarakat dimana pembangunan modal sosial ini mencerminkan hasil interaksi sosial antara kandidat dengan masyarakat. Dari adanya Modal sosial ini Pasangan Vonnie-Joppi mampu menghasilkan jaringan kemenangan dengan pola kerjasama yang berpengaruh besar terhadap kemenangan pasangan ini. Di dalam konteks strategi kemenangan Vonnie-Joppi, modal politik juga tidak bisa dilepaskan. Modal politik yang terjadi di Kabupaten Minahasa Utara 2015 terjalin dalam bentuk koalisi antar partai. Dengan terjalinnya koalisi partai politik dalam mengusung pasangan Vonnie-Joppi maka secara otomatis akan terbentuk mesin politik dari seluruh partai pendukung dan selanjutnya dari mesin politik yang terbentuk tim sukses dan akan berlanjut kepada proses-proses konsolidasi politik kepada masyarakat untuk mencari

dukungan .dalam arti lain mesin politik ini dapat digunakan sebagai senjata utama dalam setiap pencalonan karena modal politik dari partai politik ini yang memepengaruhi perolehan suara.

Artikel penelitian yang ditulis oleh Rika Novitasari dan Tikka Dessy Harsanti (2019) dengan judul *Strategi Calon Kepala Daerah Perempuan dalam Kontestasi Politik di Kota Batu Tahun 2017*. Penelitian ini akan fokus pada strategi yang digunakan calon Kepala Daerah Perempuan dalam batasan sosio-kultural patriaki. Pilkada Kota Batu 2017 merupakan ajang implementasi prinsip-prinsip demokrasi dimana ada keterwakilan perempuan di dalam kontestasi Pilkada tersebut. Dan terbukti pasangan calon kandidat perempuan yang dalam hal ini adalah Dewanti Rumpoko yang berpasangan dengan Panjul Sasmito meraup suara yang dominan yaitu 51.746 (43%) dari total DPT sebesar 147.975 pemilih. Penulis mengkaji lebih dalam tentang strategi yang digunakan Dewanti dalam proses kampanye yang dilakukannya. Calon kandidat perempuan melakukan pendekatan terhadap sesama pemilih perempuan sebagai strategi pertamanya hal ini dimaksudkan akan menciptakan ikatan naluri antar perempuan yang menimbulkan ikatan yang unik dan kuat. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan blusukan ke berbagai forum perempuan. Hal ini terbukti mampu meningkatkan simpati dari masyarakat khususnya dari calon pemilih perempuan dan dari strategi ini seorang calon kandidat perempuan akan mendapatkan kesan merakyat. Kedua adalah mengkampanyekan visi misi serta program kerja berbasis pengarusutamaan Gender. Dewanti Rumpoko mengusung program-program kerja yang sederhana namun cukup mendapat apresiasi dari para pemilih. Dalam hal ini program yang ditawarkan memang menempatkan kesetaraan gender sebagai yang utama salah satunya adalah oprogram revitalisasi fungsi dan peran perempuan desa melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan perempuan desa dalam ekonomi kreatif, serta pengkondisian keberimbangan peran sosio-ekonomi dan domestik perempuan pedesaan. Selaon itu tidak lupa strategi yang juga dilakukan oleh Dewi Rumpoko sebagai calon kepala daerah adalah dengan membangun citra diri sebagai calon kandidat perempuan yang tangguh. Hal ini bahkan telah

dibangun sejak ketika dewi rumpoko yang merupakan istri Walikota sebelumnya telah banyak melakukan pendekatan dan aktif di kegiatan-kegiatan sosial bersama masyarakat.

Artikel jurnal penelitian yang ditulis oleh Alfiyan D. Noprianto, Suwanto Adhi dan Susilo Utomo (2013) yang diterbitkan dalam *Journal of Politic and Government Studies* dengan Judul *Strategi Pemenangan Idza Priyanti-Narjo (IJO) Dalam Pemilukada Kabupaten Brebes 2012*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kemenangan pasangan Idza Priyanti dan Narjo yang notabene bukan berasal dari latar belakang politik melawan calon incumbent Widyantoro menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. Pasangan Idza priyanti-narjo hanya didukung oleh minimal partai koalisi di Kabupaten Brebes sedangkan sang incumbent di dukung mayoritas partai besar. Hal ini menjadi menarik ketika pasangan yang di dukung oleh sedikit partai dan tidak memiliki latarbelakang politik sebelumnya akan tetapi mampu memperoleh kemenangan dalam kontestasi Pilkada di Kabupaten Brebes tahun 2012. Pasangan Idza Priyanti dan Narjo mampu memperoleh suara unggul di 10 Kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes dengan perolehan suara 452.120% atau 51,85%. Strategi yang dilakukan pasangan Idza Priyanti dan Narjo ini pada mulanya adalah menyamakan persepsi ideologi dalam visi dan misi serta menyusun program-program yang pro rakyat. Dari hasil penyamaan ideologi ini pasangan Idza Priyanti dan Narjo memiliki beberapa strategi yang menjadi strategi unggulan pasangan ini. Strategi pertama adalah sebuah program yang bernama “Berjuang Untuk Kesejahteraan Rakyat”. Program ini diimplementasikan dalam 6 Pilar. Pertama adalah pemberian santunan kematian bagi keluarga yang kurang mampu sebesar 1 juta rupiah. Kedua yaitu program penggalangan aspirasi masyarakat secara langsung yang diadakan seminggu sekali yang dilaksanakan di pendopo Kabupaten Brebes. Ketiga adalah pemberian dana bantuan operasional bagi RT dan RW. Keempat adalah program peningkatan kesejahteraan para guru ngaji, guru madrasah diniyah, imam mushola dan imam masjid. Kelima adalah pembangunan program ekonomi kerakyatan dan keenam adalah program

perbaikan sarana prasarana jalan. Selain strategi tersebut, tim sukses pasangan Idza Priyanti dan Narjo pun juga memiliki strateginya sendiri dalam upaya pemenangan pasangan ini. Seperti yang dilakukan oleh tim sukses dari partai pendukung seperti PDI-P dan PKS. Tim sukses dari PDI-P melakukan pemasaran pasangan calon melalui pendekatan *door to door* kepada masyarakat. Selain itu mereka juga melakukan pendekatan melalui panggun hiburan, pembagian sembako gratis kepada konstituen. Sementara itu dari PKS, lebih sistematis kepada konsolidasi internal partai kepada para kadernya di seluruh struktur dari tingkat Kecamatan hingga tingkat ranting dan kemudian diteruskan kepada konstituen. Strategi selanjutnya yang digunakan pasangan Idza Priyanti dan Narjo ini adalah strategi yang dilakukan partai pengusung dengan menerapkan strategi marketing politik menyangkut 4P yaitu (Produk, Promosi, Price dan Place) dilanjutkan dengan segmentasi dan Positioning. Selanjutnya yang terakhir adalah dengan menggunakan strategi pemetaan terhadap calon pemilih yaitu dengan memetakan pemilih berdasarkan pemilih yang memiliki orientasi pada Ideologi, orientasi pada figur dan program kerja, pemilih cerdas dan juga pemilih abu-abu atau *swing voter*.

Masih dalam tema yang sama, kajian pustaka selanjutnya seperti yang ditulis dalam artikel jurnal penelitian oleh Ika Kartika (2019) dengan judul *Modal Kandidat Perempuan dalam Pilkada Tahun 2017 (Studi Kasus: Tjhai Chui Mie sebagai Walikota Terpilih di Kota Singkawang)*. Dalam penelitian ini, penulis melihat melalui pendekatan teori modal dari strategi yang digunakan oleh Tjhai Chui Mie hingga berhasil memenangkan kontestasi Pilkada dan menjadi Walikota etnis Tionghoa Pertama di Singkawang dan bahkan di Indonesia. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa pendekatan teori modal yang diimplementasikan sebagai strategi yang digunakan oleh calon kandidat meliputi modal sosial, modal ekonomi, modal budaya dan modal simbolik. Modal disini digunakan sebagai sumberdaya politik yang dapat digunakan untuk memenangkan Pilkada. Disini dijelaskan bahwa kemenangan calon perempuan dalam Pilkada tentunya tidak

lepas dari faktor modal. Pertama strategi yang dibangun oleh Tjhai Chui Mie yang pertama adalah modal sosial.

Modal sosial ini digunakan oleh Tjhai Chui Mie sebagai sebuah strategi yang dibangun sejak lama. Hal ini dilaksanakan melalui program kegiatan sosial masyarakat terutama disaat ada bencana ataupun musibah. Dilanjutkan dengan strategi jaringan relasi Tjhai Chui Mie sebagai ketua Perkumpulan Hakka Indonesia Kota Singkawang, Ketua Tao Indonesia Kota Singkawang dan Dewan Kehormatan Yayasan Setia Negara. Dari sinilah jaringan sosial Tjhai Chui Mie menjadi kuat dan menjadikan modal jaringan ini menjadi dukungan dari etnis tionghoa dalam Pilkada Singkawang. Selain itu, Tjhai Chui Mie berhasil memenangkan Pilkada Kota Singkawang karena Track Record nya sebagai anggota DPRD Kota Singkawang dan sosoknya yang dekat dengan masyarakat dengan melakukan pendekatan dalamn kegiatan-kegiatan sosialnya. Selain menggunakan modal dan jaringan sosial,l Tjhai Chui Mie juga menggunakan modal ekonomi sebagai strategi pemenangnya. Modal ekonomi ini digunakan sebagai dana kampanye. Meskipun ketika dibandingkan dengan calon lainnya modal ekonomi dari harta kekayaan yang dimiliki oleh Tjhai Chui Mei termasuk paling sedikit. Namun hal tersebut tidak menjadikan sumber modal tu sebagai satu-satunya modal ekonomi yng digunakan Tjhai Chui Mei dalam pencalonannya. Disini Tjhai Chui Mei menggabungkan antara modal sosial dan jaringan yang digunakanya dengan mengkombinasikanya dengan modal ekonominya sehingga hal tersebut menjadi sebuah strategi baru yang dapat dimanfaatkan sebagai bantuan ekonomi dalam dana kampanye dan strategi ini dianggap efektif. Strategi selanjutnya yang dipakai adalah dengan modal budaya. Sebagai seorang yang berasal dari etnis Tionghoa dan Suku Hakka yang beragama Budha menjadi sebuah modal budaya yang kuat bagi Tjhai Chui Mei untuk meraih kemenangan. Hal ini dapat ditunjukan melalui dukungan yang penuh dari mayoritas etnis tionghoa di Singkawang. Secara tidak langsung politik identitas disini dimunculkan.

2. Perempuan dan Politik Elektoral

Kajian kedua adalah sebuah artikel Jurnal yang ditulis oleh Sofa Marwah dengan judul *Perempuan dan Pilkada Langsung*. Di dalam jurnal ini dijelaskan adanya era transisi politik membawa dampak yang cukup signifikan bagi meningkatnya kesempatan partisipasi perempuan di dunia politik dengan presentase sebesar 30% yang dimulai di parlemen pemilu 2004. Hal ini dianggap penting sebagai *Affirmative Action* untuk memberikan kesempatan kepada perempuan sebesar-besarnya untuk ikut berpartisipasi serta berkiprah di dunia politik namun, fakta di lapangan khususnya di pemerintahan lokal, partisipasi perempuan belum menunjukkan tingkat kenaikan yang signifikan. Penulis jurnal ini mengambil contoh di lembaga legislatif lokal seperti Kabupaten Banyumas, keterwakilan perempuan di legislatif masih terhitung sangat rendah yaitu 8,8% pada rentang periode 1999-2004. Hal lain menunjukkan bahwa di tahun 2004-2009 hal tersebut mengalami peningkatan menjadi 15,5 % sehingga menunjukkan bahwa masih minim jumlah perempuan yang menjadi anggota legislatif baik di tingkat lokal ataupun di tingkat nasional. Pelaksanaan Pilkada langsung masih terbilang sangat minim bagi keikutsertaan perempuan di dalamnya. Penulis menjelaskan pelaksanaan pilkada langsung diharapkan mampu menjadi suatu mekanisme politik yang merepresentasikan kemampuan perempuan dalam jabatan politik di ranah lokal. Perempuan dapat secara terbuka ikut berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah melalui Pilkada langsung ini, akan tetapi masih sangat minim keterwakilan perempuan dalam pelaksanaan kontestasi ini. Dalam artikel jurnal ini penulis juga menyebutkan bahwa terdapat dua paradigma dalam konteks untuk memahami representasi perempuan dalam politik. Perspektif liberal menyatakan tidak perlu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena hal ini didasarkan pada anggapan bahwa wilayah politik merupakan wilayah yang bebas sehingga baik laki-laki ataupun perempuan memiliki hak yang sama untuk berkontestasi dalam politik. Hal ini berarti tidak ada “Keistimewaan” yang memiliki kaitan dengan pemajuan peran publik perempuan. Sehingga kompetisi antara perempuan dan laki-laki haruslah dilaksanakan secara terbuka untuk meraih jabatan-jabatan publik dalam politik tersebut.

Kajian artikel jurnal kedua masih merupakan karya Sofa Marwah (2016) dengan judul *Representasi Perempuan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak di Jawa Tengah Tahun 2015*. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan *metode Library Research* ini membahas mengenai netralitas gender dalam regulasi Pemilihan Kepala daerah serentak. Seperti yang telah diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 2015 mengenai peraturan tentang pemilihan kepala daerah berlangsung dengan netral gender dan berlaku sama bagi kandidat perempuan dan laki-laki. Menurut Marwah secara teoritis pemberlakuan Undang-undang ini apabila ditinjau dalam perspektif liberal klasik yang menyatakan tidak perlu adanya perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan. Secara sederhananya dipahami sebagai “Kesempatan yang setara” atau “Kesetaraan yang kompetitif”.

Penelitian ini menunjukkan data bahwa di tingkat provinsi Jawa Tengah penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015 diikuti oleh 21 Kabupaten/Kota. Dari data tersebut penulis mengungkapkan bahwa representasi perempuan dalam mengikuti Pilkada di 21 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2015 cukup sedikit dan jumlahnya tidak mencapai 30%. Penulis menjelaskan dari data temuan yang disajikan seluruh pasangan yang ikut dalam kontestasi Pilkada serentak di seluruh Jawa Tengah sebanyak 56 Pasangan dan dari 56 pasang tersebut 15 pasangan di antaranya terdapat kandidat perempuan yang apabila di presentasikan sebesar 26,8% yang mencalonkan diri baik sebagai Bupati atau Wakil Bupati. Adapun kandidat perempuan yang mencalonkan diri sebagai Calon Bupati sebanyak 6 pasang atau (10,7%) sedangkan kandidat perempuan yang maju sebagai calon wakil Bupati sebanyak 9 Pasangan atau (16,1%). Hasil akhir yang didapatkan setelah proses pemilihan didapatkan bahwa kandidat perempuan yang terpilih menjadi bupati hanya 3 orang dari 6 kandidat yang maju sebelumnya sedangkan yang berhasil menjadi wakil bupati adalah sebanyak 6 orang dari 9 pasangan. Dari semua hasil tersebut didapatkan bahwa dari 21 kabupaten kota yang mengikuti kontestasi Pilkada serentak di seluruh Provinsi Jawa Tengah hanya ada 3 kandidat perempuan yang berhasil menjadi kepala daerah yakni dengan presentase sebesar.

14,1% dari keseluruhan kandidat yang maju. Kandidat perempuan yang berhasil menjadi pemenang dalam kontestasi Pilkada Serentak 2015 di Jawa Tengah adalah pasangan Sumarni dan Edy Maryono yang memenangkan Pilbub Kabupaten Grobogan dengan perolehan suara 73,1% kemudian pasangan kedua adalah Mirna Anisa yang berpasangan dengan Masykur yang berhasil memenangkan Pilbub Kendal dengan perolehan suara sebesar 62,2% , dan pasangan ketiga adalah pasangan Sri Hartini dan Sri Mulyani sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih di kabupaten klaten dengan mengalahkan dua pasangan lainnya yang notabene adalah laki-laki hingga memperoleh jumlah suara sebesar 48,9%.

Artikel yang ditulis oleh Atiqotul Maula (2016) dengan judul *Perempuan dan Politik dalam Kontestasi Pilkada Jombang* memaparkan analisis bahwa keterlibatan perempuan dalam politik tidak terlepas dari peran rekrutmen partai politik untuk mengafirmasi peran serta perempuan di dalam politik. Hal ini bukan tanpa alasan mengingat dengan adanya keterlibatan perempuan maka akan memunculkan produk-produk kebijakan ataupun perundang-undangan yang ramah dalam prespektif gender. Faktor pertama yang sangat penting untuk melihat peran serta partisipasi perempuan dalam politik adalah dengan melihat seberapa banyak perempuan yang menjadi aktor-aktor politik di tingkat lokal. Kabupaten Jombang yang sekian lama terkenal sebagai kabupaten yang memiliki banyak pondok pesantren kultural NU pun memiliki beberapa tokoh perempuan yang menjadi aktor-aktor penggerak partisipasi perempuan bahkan aktor politik di ranah lokal. Salah satu contoh yang dimunculkan di dalam penulisan artikel jurnal ini adalah Hj. Munjidah Wahab Binti Kh. Wahab Hasbullah.

Beliau yang terlahir dalam lingkungan keluarga kultur pesantren dan Islamis dari kalangan NU berkembang sebagai aktifis perempuan di Jombang. Selain berproses di berbagai organisasi NU , Hj Munjidah ini juga bergerak di organisasi politik dibawah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan menjadi DPRD Kabupaten Jombang. Selain pernah menjadi anggota DPRD Jombang, Hj munjidah ini juga menjadi perempuan pertama yng masuk di dalam kontestasi

Pilkada di tahun 2014 dan berhasil menduduki jabatan sebagai Wakil Bupati Jombang. Tentunya strategi yang dilakukan beliau adalah strategi yang sangat panjang untuk mendobrak dominasi laki-laki dalam politik yang sekian lama menjadi sebuah budaya. Strategi yang digunakan Hj. Munjidah dalam politik adalah dengan melakukan komunikasi-komunikasi politik dengan seluruh elemen masyarakat serta pemerintahan di kabupaten jombang. Selain itu disini juga dapat diketahui keikutsertaan Hj. Munjidah dalam kontestasi politik di Jombang juga berkat modal politik yang dimilikinya. Penjabaran dari modal politik yang digunakan sebagai sebuah strategi politik adalah 1.Modal Simbolik yang dimaknai sebagai hubungan kekeluargaan yang dimilikinya karena beliau merupakan salah satu keturunan tokoh NU yang dipandang sebagai keluarga yang terpandang karena merupakan putri dari salah satu Pahlawan Nasional Indonesia KH Wahab Hasbullah. 2. Modal kultural Modal Kultural, dan 3. Modal Ekonomi. Dengan modal yang dimilikinya Hj Munjidah menjadikanya sebagai sebuah strategi guna berusaha merubah paradigma di masyarakat tentang kepemimpinan perempuan serta makna peran perempuan di dalam politik.

Artikel jurnal penelitian yang ditulis oleh Nunung Qomariyah dkk (2016) dengan judul *Perempuan di Pilkada Serentak 2015, Prespektif perempuan di sekitaran Calon Perempuan Peserta Pilkada*. Fokus kajian pada artikel jurnal ini terdapat pada bagian ketiga mengenai prespektif perempuan dalam Pilkada Serentak 2015 yang membahas mengenai kepemimpinan perempuan di banyak daerah telah menghadirkan dinamika baru dengan warna yang berbeda dimana dianggap bahwa kepemimpinan perempuan yang feminim memberikan sebuah pendekatan empati dalam pelaksanaanya. Hal ini lah yang menjadi pembeda antara kepemimpinan feminis khas perempuan dengan kepemimpinan masukulin. Kepemimpinan masukulin memang identik dengan gaya ketegasan dan kedisiplinan namun disatu sisi dianggap kurang dari segi empati untuk menangkap pokok-pokok persoalan di masyarkat terutama permasalahan perempuan dan anak-anak sebagai kelompok yang sering menjadi marjinal. Peningkatan partisipasi perempuan dalam kontestasi Pilkada di beberapa kesempatan

pemilihan kepala daerah menunjukan perempuan telah menganggap penting arena kontestasi politik untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan perempuan. Dari sini dapat diketahui bahwa keikutsertaan perempuan dalam kontestasi kepala daerah menjadi dianggap penting bagi perempuan karena hal tersebut merupakan hal yang strategis untuk mengubah kebijakan yang ada untuk lebih pro terhadap kepentingan-kepentingan perempuan. Rendahnya keterwakilan perempuan di dalam bidang politik di berbagai negara tidak terlepas dari banyaknya hambatan yang berkaitan dengan kendala sosial, ideologi dan psikologis serta kuatnya budaya patriarki. Indonesia terkenal dengan masyarakatnya yang masih memegang budaya patriarki secara kuat, dan hal ini juga berdampak pada pandangan mereka terhadap perempuan yang terjun dalam dunia politik. Berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada langsung, Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memang tidak diskriminatif terhadap partisipasi perempuan dalam arti bahwa perempuan boleh mengikuti dan berhak mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

Hal tersebut apabila diamati menunjukkan bahwa aturan yang netral gender tersebut menjadi penghalang bagi perempuan untuk mencalonkan diri di dalam pilkada. Studi yang dilakukan oleh LSI mendapatkan temuan bahwa beberapa hambatan bagi perempuan untuk mencalonkan diri dalam kontestasi pilkada disebabkan karena, pertama mekanisme pencalonan dan proses pencalonan dalam pilkada dapat dilakukan hanya lewat partai politik hal ini tertulis pada Pasal 2 UU No.32 tahun 2004. Hal ini menunjukan siapapun yang akan maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah harus melalui mekanisme partai politik namun hal itu kurang sejalan dengan kenyataan bahwa partai politik cenderung dikuasai oleh laki-laki sedangkan kepemimpinan perempuan dalam partai politik sering menempati posisi-posisi yang kurang signifikan.

Dengan adanya posisi-posisi strategis dalam partai politik dikuasai oleh laki-laki maka segala macam bentuk keputusan pencalonan oleh partai politik kurang memperhatikan representasi perempuan. Kedua, pencalonan perempuan dalam pilkada melalui skema partai politik haruslah menyiapkan sumber dana yang

besar. Permasalahan dana ini sering menjadi hambatan bagi calon perempuan sehingga akibat kurangnya dana maka calon-calon perempuan yang sebenarnya potensial mengikuti pilkada tidak dapat maju karena tidak memiliki sumber dana yang cukup. Yang terakhir bahwa kontestasi Pilkada ini mempunyai tingkat persaingan yang lebih ketat jika dibandingkan dengan kontestasi legislatif. Seorang calon haruslah memiliki sumber daya yang cukup serta modal sosial yang banyak dalam bentuk jaringan ke masyarakat serta sumber dana yang mencukupi dan dari hal-hal inilah yang menjadi penghalang utama perempuan di dalam pilkada.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Yusuf Fadli (2017) dalam *Journal of Government and Civil Society* dengan judul *Islam, Perempuan dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi*. Dalam artikel ini dijelaskan bagaimana hubungan antara Islam, perempuan dan politik pasca Orde Baru. Penulis mengambil obyek mengenai keterlibatan gerakan perempuan Nahdlatul Ulama (NU) di dalam perjuangan kesetaraan gender dengan dilandasi nilai-nilai Islam. Disebutkan bahwa pasca runtuhnya Orde Baru dan memasuki era reformasi gerakan wanita Nahdlatul Ulama telah terlibat dalam politik Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan mengenai partisipasi politik dalam kerangka konsep feminisme, dalam tulisan ini mendapatkan hasil bahwa Nahdlatul Ulama sebagai sebuah Ormas Islam berhasil meningkatkan partisipasi dan juga keterwakilan perempuan di dalam ranah politik terutama di dalam lembaga legislatif seperti DPR-RI. Dengan adanya dukungan dari ulama NU, gerakan perempuan yang diwadahi dalam Muslimat dan Fatayat bergerak untuk mendorong sepenuhnya mengenai peningkatan representasi perempuan terutama di parlemen. Terus disuarakannya aspirasi mengenai arti penting keterlibatan perempuan dalam politik akhirnya membuahkan hasil dengan tercantumnya *Affirmative Action* presentase perempuan sebesar 30 persen yang tercantum di Undang-undang No.12 Tahun 2003 Pasal 65 ayat 1. Di dalam proses peningkatan partisipasi perempuan sebesar 30%, Muslimat dan Fatayat membangun jaringan afiliasi dengan berbagai kekuatan politik yang ada. Dari

terbangunya afiliasi tersebut, eksistensi gerakan perempuan NU di dalam politik semakin meningkat dan signifikan. Meskipun upaya yang dilakukan belum dapat sepenuhnya memperbaiki kondisi partisipasi perempuan dalam politik secara keseluruhan.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Lidya Victoria Pandiangan (2018) dengan judul *Perempuan Politisi Minangkabau dalam Dunia Politik : Studi Tentang Alasan Perempuan Memaknai Politik*. Dalam jurnal ini penulis melakukan pendekatan penelitian mengenai pemaknaan politik perempuan dengan sudut pandang adat minangkabau. Artikel jurnal ini menggunakan teori Feminisme Post Strukturalis Sandra Harding memperoleh temuan bahwa pemaknaan politik bagi perempuan minangkabau menunjukkan 3 alasan. Alasan tersebut dijabarkan sebagai, *pertama*, bahwa para politisi perempuan memaknai politik sangat identik dengan kekuasaan, dimana hal ini dijelaskan bahwa sebagai seorang perempuan harus berani untuk meraih sebuah kekuasaan, karena kekuasaan ditangan perempuan itu jauh lebih baik daripada di tangan laki-laki.

Kedua, pemaknaan dan pemahaman mereka terhadap politik lebih besar dipengaruhi oleh pengalaman yang di dapatkan dalam organisasi sosial/politik, profesi atau pengalaman kerja. Ketiga, adanya kontribusi budaya matrilineal bagi politisi perempuan adalah bahwa pengaruh pengaruh budaya matrilineal yang sangat besar bagi politisi perempuan dan adanya budaya ini memberikan keuntungan bagi calon perempuan ketika mencalonkan diri dalam kontestasi Pemilu. Adanya budaya matrilineal bukan menghambat perempuan untuk terjun dalam politik , justru budaya ini perempuan minang termotivasi untuk ikut terjun menjadi politisi. Politik dimaknai oleh politisi perempuan minang bukan hanya dipandang sebagai arena Struggle For Power, tetapi lebih kepada melihat tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan di dalam pemaknaan politik sebagai wadah aspirasi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat terutama perempuan. Politisi perempuan minang harus terlibat dalam dunia politik tanpa harus bersaing dengan laki-laki. Adanya budaya matrilineal yang kuat memberikan kesempatan bagi perempuan minangkabau memiliki hak-hak yang proporsional berdasarkan

kedudukannya sebagai bagian dalam tatanan sosial masyarakat termasuk juga di dalam ranah politik.

Berbeda dengan beberapa artikel jurnal sebelumnya, artikel Wenny Dwika Paradita (2019) dengan judul *Partai Politik dan Kontestasi Perempuan dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Batang* berargumen bahwa keterlibatan perempuan pada salah satu kontestasi politik terutama dalam pemilu legislatif dengan pemenuhan kuota 30% merupakan tindakan yang positif. Namun, dalam penelitian ini keterlibatan perempuan dalam kontestasi Pemilu masih minim. Dijelaskan bahwa kurangnya calon legislatif perempuan dalam memenangkan kontestasi pemilu di Kabupaten Batang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya hambatan pribadi dari calon kandidat perempuan, dimana perempuan dituntut untuk berjuang secara penuh dengan pengorbanan yang lebih banyak sehingga di lain sisi akan menimbulkan keraguan dan kurangnya percaya diri dari calon kandidat perempuan yang akan mengikuti kontestasi Pemilu karena ada tanggung jawab ganda antara keluarga dan juga karier politik.

Kedua, hambatan yang muncul dari institusi politik dalam hal segala urusan pencalonan mulai dari penetapan calon, pengambilan nomor urut dan daerah pemilihan masih sangat bias gender. Hal ini ditambah semakin minimnya kiprah perempuan karena sebagian besar pengambil kebijakan dalam partai politik adalah kaum laki-laki. Dan semua keputusan yang dikeluarkan partai politik menjelang proses pemilihan hanya bisa diterima saja oleh pengurus dan atau calon kandidat perempuan. Ketiga adalah hambatan sosio-kultural. Disini dijelaskan bahwa faktor budaya masih mendominasi alasan mengapa keterlibatan perempuan dalam politik masih sedikit sekaligus menjadi penghambat perempuan untuk tampil di ruang publik. Hal ini semakin menempatkan perempuan semakin mengalami subordinasi atas laki-laki dan di Kabupaten Batang, budaya seperti ini masih saja menjadi penghambat yang besar bagi seorang perempuan di dalam berbagai aspek kehidupan termasuk salah satunya adalah bidang politik.

Data dari KPUD Kabupaten Batang menunjukkan bahwa di tahun 2019 tepatnya pada saat pelaksanaan kontestasi pemilu legislatif jumlah pemilih perempuan lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah pemilih laki-laki. Namun, banyaknya jumlah pemilih perempuan tidak bisa menjadi penjamin bahwa keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam kontestasi pemilu akan terpenuhi. Keempat, modal ekonomi yang dimiliki oleh perempuan. Faktor ini pula yang menjadi hambatan besar bagi seorang kandidat calon perempuan yang akan maju dalam kontestasi politik. Hal ini mengganggu strategi kampanye karena terbatasnya sumber daya ekonomi yang dimiliki serta kemampuan untuk memobilisasi masa. Semua ini dianggap melemahkan calon perempuan karena calon perempuan dianggap masih belum mandiri secara finansial. Kelima, adalah hambatan yang berasal dari faktor eksternal dari calon kandidat perempuan itu sendiri. Hal ini dapat dimaknai dengan adanya praktik-praktik kecurangan selama proses pelaksanaan politik seperti salah satu contohnya adalah kasus politik uang. Bahkan tidak jarang pula calon perempuan itu sendiri yang terjerumus melakukan praktik politik uang ini guna dapat memenangkan kontestasi Pemilu yang diikutinya. Tidak penuhnya kuota keikutsertaan perempuan dalam politik mengacu pada peran partai politik yang berdasarkan temuan dalam penelitian ini bahwa partai politik tidak mempunyai peran andil yang besar dalam membantu pencalonan dari calon legislatif perempuan.

Artikel jurnal hasil penelitian yang ditulis oleh Hadi Machmud (2019) judul *Perempuan dan Politik Lokal (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah di Sulawesi Tenggara.)* Penelitian yang ditulis oleh Hadi Machmud ini difokuskan pada perempuan calon peserta Pilkada yang berjumlah 4 orang yang tersebar di Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka dan Kota Bau-bau di Pilkada serentak Tahun 2018. Fenomena pencalonan perempuan dalam pilkada tahun 2018 di Sulawesi Tenggara menunjukkan tanda yang positif dan tidak bias gender sehingga tercerminkan sebagai kebangkitan kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam hal politik. Dalam artikel ini disebutkan bahwa para kandidat perempuan yang akan maju pada pemilihan kepala daerah serentak 2018 yang ada di Sulawesi

Tenggara berasal dari berbagai macam latar belakang yang berbeda sebelumnya. Sebagian dari para kandidat tersebut pernah menjadi anggota legislatif di parlemen maupun yang berprofesi sebagai birokrat yang menduduki posisi strategis di pemerintahan Kabupaten dan Kota. Jurnal ini juga menampilkan data bahwa partisipasi perempuan dalam pilkada masih minim bila dibandingkan dengan jumlah afirmasi keterwakilan perempuan dengan afirmasi 30%. Semakin besarnya keterlibatan perempuan dalam kontestasi politik terutama dalam Pilkada akan meningkatkan jumlah perempuan yang mampu melakukan sesuatu untuk negeri melalui kebijakan-kebijakan ataupun regulasi yang dibuat.

Dalam penelitian ini disebutkan dalam dinamika eksistensi peserta Pilkada di Sulawesi Tenggara dimulai sejak pendaftaran hingga penetapan menjadi calon peserta oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, secara keseluruhan berjumlah 4 orang. Calon Kepala daerah ini tersebar di Kota Bau-Bau di ikuti dua pasangan calon, Kabupaten Kolaka 1 Pasangan Calon dan Kabupaten Konawe satu pasangan calon dari unsur independen. Latar belakang para calon kandidat ini bukan merupakan orang-orang baru dalam politik di Sulawesi Tenggara. Mereka memiliki latar belakang berasal dari eksekutif, legislatif ataupun birokrasi dalam pemerintahan sebelumnya. Penulis memberikan informasi bahwa hasil perolehan suara masing-masing Calon sudah terprediksi bahwa tidak ada calon perempuan yang memperoleh suara tertinggi dan hal ini berbanding terbalik dengan kuantitas pemilih perempuan yang tinggi. Dalam jurnal ini juga disebutkan indikator-indikator yang menjadi kegagalan atau kurang maksimalnya calon dalam memperoleh suara adalah sebagai berikut : (1) Kompetitor merupakan incumbent dengan jaringan sosial dan birokrat yang luas diatur dengan sistematis dan basis yang jelas, didukung dengan finansial yang besar, program kerja yang sudah dirasakan masyarakat serta mesin politik yang solid, (2) Isu perspektif gender yang tertuang dalam Visi, Misi dan Program yang diusung oleh calon perempuan tanpa adanya penyebaran lebih lanjut dalam turunan yang substantif. Dengan melihat fenomena ini dapat disimpulkan di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi perempuan dalam politik di Sulawesi Tenggara sudah eksis

dalam semua bidang bahkan beberapa calon kandidat yang mengikuti Pilkada merupakan calon-calon kandidat perempuan yang sebelumnya berada di jajaran lingkup eksekutif maupun legislatif. Permasalahan kurangnya elektabilitas dan faktor kekutaan modal sosial masih menjadipenghambat serta tantangan calon kandidat perempuan dalam Pilkada Sulawesi Tenggara ini.

Berdasarkan hasil kajian pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa dari analisis tinjauan penulisan mengenai perempuan dan politik, partisipasi perempuan di dalam politik masih dapat terbilang rendah. Hal ini karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain kehidupan sosial budaya di masyarakat yang masih cenderung patriaki, serta di implementasikan dalam skema pencalonan seorang kandidat perempuan yang notabene diatur oleh partai politik sehingga membuat partisipasi perempuan masih minim di dalam politik dan masih belum memenuhi kuota perempuan sebesar 30%. Selain itu beberapa persyaratan yang harus dimiliki seorang kandidat perempuan seperti modal sosial, modal ekonomi juga masih dianggap kurang sehingga faktor ini pula yang mempengaruhi mengapa keterlibatan partisipasi perempuan dalam politik masih kurang. Disini para penulis sebelumnya hanya terfokus pada permasalahan penelitian yang sama yakni mengenai tingkat partisipasi perempuan dalam politik yang masih rendah, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan tersebut. Sedangkan untuk kesimpulan analisis kajian pustaka mengenai strategi politik elektoral yang dilakukan oleh kandidat perempuan, penulis terdahulu memetakan beberapa strategi-strategi politik yang dilakukan calon kandidat perempuan dalam konteks pilkada tersebut tanpa didasarkan dengan sebuah fakta yang menarik tentang latar belakang calon perempuan tersebut dan dinamika politik di daerah dimana dia mencalonkan diri.

Dalam penulisan yang akan peneliti lakukan ini bukan terfokus pada mengapa partisipasi perempuan dalam politik itu rendah. Peneliti akan fokus kepada bagaimana seorang calon kandidat perempuan yang sudah lama berkecimpung di dunia politik serta sudah memiliki modal yang kuat melakukan manuver politik guna membangun strategi elektoral dalam pencalonan di Pilkada

serentak 2020. Penelitian ini pun akan ditambah dengan fakta menarik mengenai calon kandidat perempuan ini merupakan calon kandidat perempuan pertama yang maju dalam kontes pemilihan Calon Walikota Pekalongan. Ditambah calon kandidat ini kebetulan berasal dari etnis Arab. Dengan demikian penelitian ini akan menjadi penelitian yang berbeda dengan penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga menarik untuk dikaji.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Kirk dan Miller, metode kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2011:6). Dalam definisi lain, metode kualitatif di definisikan sebagai sebuah metode yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, sedangkan untuk meneliti pada objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan) sedangkan analisis data bersifat induktif dengan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono 2011: 9)

Dalam kaitan dengan judul yang diajukan oleh penulis, penulis mencoba untuk melihat fenomena Pencalonan Balqis Diab dalam Pilkada Kota Pekalongan 2020 dengan pengamatan secara menyeluruh dimana penulis sebagai peneliti menjadi instrumen utama untuk menggali informasi dari fenomena yang diangkat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan permasalahan yang diuraikan. Penelitian yang dilakukan secara kualitatif ini bersifat natural dan tidak terdapat manipulasi data di dalamnya karena faktor penulis yang terjun secara langsung untuk melakukan penelitian terhadap objek yang dikaji. Pendekatan

secara kualitatif ini dikarenakan pada fokus kajian penelitian yang ditulis, objek penelitian bersifat kompleks dan dinamis sehingga peneliti memiliki maksud untuk memahami objek secara mendalam dengan tujuan menjawab rumusan permasalahan yang dimunculkan. Di dalam konteks penelitian yang akan ditulis, sangat relevan apabila menggunakan pendekatan penelitian secara studi kasus untuk mendukung jenis penelitian kualitatif. Hal ini bukan hanya melihat dalam konteks pencalonan seorang Balqis Diab dan strategi elektoral apa yang digunakan dalam dinamika Pilkada Kota Pekalongan 2020 saja, tetapi lebih dari itu. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti ingin melihat Kota Pekalongan baik dari segi sosial budaya, ekonomi dan politik sehingga hal ini akan lebih detail dalam penjelasan terhadap objek penelitian dari rumusan masalah yang dimunculkan.

2. Sumber dan jenis data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer sebagai data utama diperoleh dari sumber data pertama sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak-pihak lain sekaligus menjadi dukungan dari data primer. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari objek utama penelitian yakni Balqis Diab kemudian diperoleh juga dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian yakni para ketua partai koalisi dan juga para tim sukses, serta dari pihak masyarakat sebagai konstituen.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dengan cara mengambil dari berbagai sumber artikel, buku-buku, jurnal penelitian dan berbagai sumber dari berbagai media baik media cetak ataupun media elektronik yang berkaitan dengan tema perempuan dan politik serta dinamika Pilkada Kota Pekalongan 2020.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam setiap penelitian. Hal ini menjadi sangat penting karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data pendukung yang diperlukan. Menurut Sugiyono (2016:224), cara pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi terlibat, wawancara mendalam, studi dokumen dan triangulasi. Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi Partisipatoris

Observasi merupakan sebuah pengamatan yang dilakukan dengan sistematis yang memiliki tujuan untuk memperoleh data. Hal ini dapat pula dikatakan sebagai dasar peneliti guna memperoleh fakta-fakta dan temuan dari objek penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini jenis observasi yang digunakan oleh penulis adalah observasi partisipatoris. Dengan menggunakan observasi partisipatoris penulis akan meleburkan diri dengan mengikuti seluruh aktivitas dari objek penelitian yang akan ditulis. Observasi partisipatoris mengharuskan seorang peneliti terjun dalam setting sosial dari objek yang diteliti dan dari pengamatan ini penulis mencatat catatan data lapangan secara mendalam. (Marsh & Stoker, 2017)

Observasi partisipatoris bergantung pada relasi antara penulis dengan informan dan percakapan menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam catatan lapangan (Lofland 1985:12). Data temuan lapangan ini kemudian akan dirangkum menjadi satu untuk selanjutnya akan dianalisis untuk selanjutnya menjadi interpretasi dasar dari laporan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode observasi partisipatoris dengan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan kampanye politik Balqis pada kontestasi Pilkada Kota Pekalongan 2020. Selain mengikuti segala rangkaian kampanye politik dari objek penelitian, penulis juga akan mengamati pula bagaimana dinamika masyarakat dalam menangkap pesan-pesan kampanye politik dari Balqis diab. Hal ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana keefektifan mesin politik yang disusun Balqis

Diab dalam proses kampanye politiknya untuk mendulang suara di Pilkada Kota Pekalongan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak memiliki maksud tertentu guna mencari sebuah sumber data ataupun informasi dari narasumber kepada pewawancara yang dilakukan dengan tanya jawab antara keduanya dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disediakan oleh peneliti. Dalam penelitian ini wawancara yang akan digunakan adalah dengan teknik wawancara tidak terstruktur dengan metode In deep Interview atau wawancara secara mendalam terhadap obyek penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa narasumber seperti Balqis Diab sebagai narasumber utama, kemudian para ketua DPC Partai koalisi pengusung Balqis Diab, Tim Sukses dan juga beberapa masyarakat kota Pekalongan.

3. Studi Dokumen dan Literatur

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah dokumen pendukung penelitian seperti gambar, foto, peta, data statistik, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan sebagai pembantu penulis dalam melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen terkait dalam penelitian yang nantinya akan dituangkan pula sebagai analisis pendukung terhadap objek kajian penelitian. Teknik selanjutnya adalah dengan menggunakan studi literatur dengan mengumpulkan beberapa data yang berasal dari sejumlah buku, majalah, surat kabar dan lain sebagainya yang berkenaan dengan topik penelitian. Studi literatur dilakukan dengan tujuan menganalisis berbagai teori terkait dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan sebagai rujukan dalam pembuatan analisis hasil penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Sebuah data yang didapat setelah melakukan observasi serta melakukan pengumpulan data melalui wawancara selanjutnya data tersebut akan lebih bermakna apabila ditafsirkan dan dianalisis lebih mendalam. Analisa terhadap data-data yang ditemukan di lapangan merupakan suatu hal yang penting dalam

proses melakukan penelitian. Teknik analisa data dilakukan dengan proses mulai dari penyusunan, pengkategorian serta mangkaitkan antara isi data dengan teori-teori yang digunakan dengan tujuan mendapatkan jawaban dari analisa tersebut.

Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang mencakup tiga hal yakni Reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*concluding drawing*) seperti yang dikemukakan Oleh Sugiyono (2009:91). Reduksi data dilakukan dengan cara memilih dan merangkum data-data yang merupakan data pokok atau terkait dengan hal-hal yang penting yang disesuaikan dengan topik penelitian dengan tujuan memberi kemudahan pehaman bagi penulis dari data yang ia kumpulkan. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah penyajian data. Hal ini dilakukan setelah data ter display, peneliti akan lebih mudah memahami serta menemukan analisa dari temuan data lapangan kemudian dari sajian data ini juga digunakan oleh penulis untuk merencanakan langkah analisa selanjutnya. Setelah dilakukan proses reduksi data dan penyajian data selanjutnya hasil dari analisis data akan digunakan dalam hal penarikan kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan dari fokus kajian penelitian. Dalam konteks penelitian ini maka kesimpulan dari seluruh proses analisis data adalah mengetahui strategi politik apa dan bagaimana cara yang dilakukan Balqis Diab dalam kampanye pemenangnya di Pilkada Kota Pekalongan 2020.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam pendahuluan akan dipaparkan alasan yang menjadi latar belakang penelitian yang kemudian dirumuskan dalam suatu rumusan permasalahan. Selain itu juga dijabarkan mengenai tujuan penelitian dan juga manfaat dari penelitian yang dilakukan ini. Di dalam Bab I ini juga akan diuraikan metode dan pendekatan penelitian, definisi teori dan konsep serta bagaimana penelitian ini akan disusun secara sistematis menjadi satu kesatuan skripsi yang utuh.

BAB II GENDER, POLITIK, DAN STRATEGI ELEKTORAL

Dalam Bagian ini akan dijelaskan secara detail terkait teori-teori yang meliputi teori Gender, teori politik dan strategi elektoral. Dari teori-teori tersebut akan di *Breakdown* dalam Bab ini dengan tujuan semakin mematangkan konsep teori yang akan digunakan sebagai kerangka berpikir dalam melakukan analisis dari data-data penelitian yang dilakukan.

BAB III LANDSCAPE DAN DINAMIKA PILKADA KOTA PEKALONGAN

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai gambaran umum mengenai Kota Pekalongan sebagai lokasi penelitian. Gambaran umum mengenai Kota Pekalongan akan dibagi menjadi dua sub bab pembahasan antara lain sebagai berikut :

- a. Profil Lengkap Kota Pekalongan yang terdiri dari kondisi geografis, kondisi topografis, dan demografis yang terdiri dari struktur sosial dan budaya, ekonomi serta demografi Kota Pekalongan
- b. Peta dan Struktur serta dinamika Politik Kota Pekalongan yang meliputi peta eksekutif dan legislatif Kota Pekalongan, serta diskursus dinamika politik dan pilkada Kota Pekalongan

BAB IV BALGIS DIAB SEBAGAI FIGUR KAJIAN

Pada bab ini akan dijelaskan secara detail mengenai sosok yang menjadi obyek utama dalam penelitian ini yaitu Balqis Diab. Penjelasan ini guna menganalisa bagaimana sepak kiprah Balqis Diab di Kota Pekalongan serta bagaimana ia mampu dikenal oleh masyarakat Kota Pekalongan. Bab ini akan terbagi dalam sub bab profil Balgis Diab secara umum yang meliputi profil genealogis, profil pendidikan dan sub bab mengenai perjalanan karir politik Balgis Diab.

BAB V STRATEGI ELEKTORAL DALAM MEMBANGUN MESIN POLITIK

Pada bagian ini akan diuraikan secara detail hasil analisa dari temuan data-data di lapangan mengenai bagaimana strategi elektoral Balqis Diab dan Partai Koalisi membentuk struktur mesin politik yang digunakan dalam Pilkada Kota Pekalongan 2020. Dalam bab ini akan dijabarkan menjadi dua sub bab yakni pembahasan mengenai strategi jaringan sosial sebagai modal dan juga strategi jaringan mesin politik di akar rumput.

BAB VI STRATEGI MOBILISASI SUARA MASYARAKAT DAN ANALISIS KEGAGALAN DALAM KAMPANYE BALQIS DIAB

Setelah menguraikan bagaimana Balqis Diab menggunakan strategi politiknya untuk membentuk struktur mesin politik yang akan digunakanya, dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana mesin politik tersebut bekerja dalam masyarakat untuk melakukan strategi dalam kampanye pemenangan Balqis Diab di Pilkada Kota Pekalongan 2020. Selain itu dalam bab ini juga akan dilakukan analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan strategi mobilisasi suara masyarakat yang digunakan oleh Balqis Diab.

BAB VII PENUTUP

Pada bab ini akan disampaikan simpulan dari serangkaian penulisan penelitian yang dilakukan sebagai sebuah jawaban akhir dari rumusan masalah yang diuraikan oleh penulis. Selain simpulan dari penelitian dalam bab ini juga akan disajikan saran untuk penelitian serupa kedepanya.

BAB II

GENDER, POLITIK, DAN STRATEGI ELEKTORAL

A. Gender dan Politik

1. Konsep Gender

Gender diartikan sebagai sebuah konstruksi sosio-kultural yang membedakan karakteristik maskulin dan feminim (Zamroni,2013) sehingga gender bukanlah sesuatu yang mengacu pada karakter ataupun faktor biologis (Sex) antara laki-laki ataupun perempuan secara fisik. Gender mengatur bagaimana peran laki-laki dan perempuan dalam bertindak sesuai dengan tata nilai yang memiliki struktur secara sosial maupun budaya. Menurut Fakih (1999:71), gender dimaknai sebagai sebuah perbedaan yang bukan terkait dengan biologis sebagai sebuah kodrat alami dari Tuhan. Pemaknaan lain dapat disebut bahwa gender merupakan pembeda antara perempuan dan laki-laki dalam peran, fungsi, hak, perilaku yang dibentuk oleh ketentuan sosial dan budaya setempat (Nugroho, 2011:4). Dari adanya pandangan inilah pada akhirnya gender dimaknai sebagai konstruksi peran dan fungsi sosial tertentu yang di implementasikan kedalam ekspektasi perilaku yang seharusnya melekat baik itu pada laki-laki ataupun kepada perempuan. Hal ini berdampak pada terjadinya perbedaan peran sosial dan juga berdampak pula pada penentuan pembagian kerja yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

R.W Connell (2001), mengemukakan sebuah argumen bahwa adanya suatu konsep yang dikotomi di kehidupan masyarakat tidak akan bisa menangkap kompleksitas gender dalam kehidupan manusia. Di dalam konteks ini Connell menyoroti mengenai pluralitas dalam maskulinitas dan mendapatkan kesimpulan bahwa ketidakadilan gender sejatinya bukan hanya dirasakan oleh perempuan saja akan tetapi juga oleh laki-laki dengan karakter maskulnitas tertentu. Dari sinilah pada tahun 1960 Connell dan para ilmuwan lain mengusulkan mengenai perubahan konsepsi gender yang tidak hanya seputar isu perbedaan secara dikotomis antara

peremuan dan laki-laki akan tetapi lebih kepada bagaimana gender sebagai relasi antara laki-laki dan juga perempuan. Selanjutnya dalam konteks ini, Connell memberikan sebuah definisi bahwa gender adalah sesuatu urusan dari hubungan sosial yang melingkupi antara kehidupan individu dan juga kelompok. Pendapat serupa juga dilontarkan oleh Jill Steans yang mengatakan bahwa gender sebagai sebuah ideologi dan materi dalam sebuah relasi diantara laki-laki dan perempuan "*Ideological and material relations between men and women*". Adanya unsur kekuasaan dan juga simbolik dalam konsep relasi gender selanjutnya semakin mempengaruhi kompleksitas isu gender terutama dalam hal politik. Unsur kekuasaan dan juga simbolik dalam prespektif relasi gender ini kemudian termanifestasikan dalam dinamika politik bukan hanya secara material saja akan tetapi juga non material. Hal ini semakin memperjelas signifikansi prespektif gender terutama didalam konteks memahami dinamika politik secara menyeluruh.

Melihat fenomena diatas, kita sadar bahwa sangatlah penting bagi masyarakat untuk mewujudkan adanya kesetaraan gender dalam konstuksi sosial masyarakat . Menurut Nugroho (2011:29) mendefinisikan kesetaraan gender ini sebagai suatu proses adanya kesamaan kondisi laki-laki dan juga perempuan untuk memperoleh kesempatan dan juga hak-hak yang sama dalam peran sosial masyarakat. Kesetaraan ini dimaknai dengan adanya upaya menghilangkan diskriminasi antara laki-laki dan juga perempuan. Dengan hal ini diharapkan bahwa seluruh individu baik laki-laki ataupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam partisipasi serta memperoleh manfaat yang sama dalam pembangunan sosial masyarakat. Peran pembangunan sosial masyarakat tersebut diantaranya meliputi kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan serta keamanan nasional. Melihat penjabaran di atas, perlu adanya upaya-upaya optimalisasi pengarusutamaan gender di masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir kaum perempuan dari dampak kebijakan-kebijakan yang kurang responsif terhadap gender terutama di dalam bidang yang cukup penting diantaranya yakni dalam bidang pembangunan, politik dan pemerintahan.

2. Konsep Gender dan Politik

Politik menurut Budiardjo (2013) adalah usaha menggapai kehidupan yang lebih baik. Dalam definisi lain mengenai politik, Peter Merkl mengemukakan bahwa Politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan (*Politics, at its best is a noble quest for a good order and justice*). Dari konsep politik diatas kita memahami bahwa sejatinya politik dilakukan untuk memperoleh tujuan bersama atas dasar suatu tatanan sosial yang baik serta berkeadilan. Berkeadilan disini dapat pula dimaknai bahwa seharusnya politik adil baik untuk laki-laki ataupun juga untuk perempuan. Pada kenyataannya politik sendiri masih mendapatkan kritik dari berbagai pihak karena dianggap karena politik bias gender. Dinamika politik, sebagian besar masih di dominasi oleh laki-laki sehingga hal ini memunculkan diskursus yang mencerminkan bahwa dunia politik itu identik dengan laki-laki dengan menempatkan laki-laki sebagai mayoritas aktor politik. Padahal jelas disebutkan bahwa kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Disini seharusnya baik antara laki-laki dan perempuan memiliki akses serta kesempatan partisipasi aktif yang sam baik itu secara sosial, ekonomi dan juga dalam dinamika politik. Hal ini penting untuk memunculkan pengarus utamaan gender dalam politik. Ini menjadi penting untuk menekan dampak diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam bidang politik serta untuk meminimalisir kerentanan perempuan dalam kebijakan-kebijakan yang tidak responsif terhadap gender.

Dalam pandangan Islam, manusia diciptakan setara dan islam sangat memberikan penekanan mengenai pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan manusia. Dalam hal ini, Islam mengajarkan bahwa pentingnya memberikan hak keadilan sesuai dengan porsinya kepada seluruh umat manusia tak terkecuali laki-laki dan juga perempuan. Karena pada dasarnya posisi laki-laki dan perempuan adalah sama sebagai makhluk Allah. Dengan demikian Islam melarang adanya ketidakadilan dalam bentuk diantara umat manusia termasuk juga adanya ketidakadilan gender. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh Rasullulah

SAW dimana Rasul Mengajarkan kesetaraan dan keadilan gender kepada umatnya terutama kaum perempuan yang mendapatkan perlakuan ketidakadilan gender pada zaman jahiliyah. (Abdullah,2009).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam adalah setara. Allah memandang bahwa baik laki-laki dan perempuan adalah sama-sama makhluk Allah yang diwajibkan untuk beribadah kepada Allah seperti yang tertuang dalam Q.S Az-Zariyat ayat 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku” (Q.S Az-Zariyat : 56)

Selain itu Allah tidak membedakan hambanya dari segi jenis kelamin karena yang menjadi pembeda adalah dari segi kualitas amal perbuatan seperti yang tertulis dalam QS. Al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Q.S Al- Hujurat : 13)

Dengan melihat kedua firman Allah tersebut semakin memberikan penegasan bahwa sejatinya Islam tidaklah membedakan antara laki-laki dan perempuan dan menganggap setara di antara keduanya. Inilah yang menjadi dasar argumen bahwa ajaran Islam mengajarkan untuk menjamin kesetaraan dan keadilan tanpa membedakan antara laki-laki dan juga perempuan. Dalam ajaran selanjutnya, Islam juga memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki

ataupun perempuan untuk menjadi seorang pemimpin seperti tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 30 berikut.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (Q.S Al-Baqarah : 30)

Dengan demikian sejatinya Agama Islam bukanlah agama patriaki yang membedakan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan ketiga kutipan ayat diatas menunjukan bahwa konsep kesetaraan dan keadilan terutama mengenai gender telah dijamin Allah. Maka dari itu baik laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama di dalam kehidupan sosial masyarakat yang meliputi pembangunan masyarakat, ekonomi , sosial budaya dan juga dalam politik. Hal ini tentunya sejalan dengan proses demokrasi yang memberikan jaminan dan hak yang sama kepada laki-laki dn perempuan untuk terlibat dalam dinamika sosial dan politik serta memberikan jaminan bahwa perempuan diberikan ruang dalam ranah publik tanpa adanya diskriminasi.

B. Strategi Elektoral

1. Strategi Politik Elektoral

Peter Schroder (2013) dalam bukunya yang berjudul *Strategi Politik*, menjelaskan bahwa strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Strategi politik dimaknai sebagai sebuah perencanaan strategis untuk perubahan dan proses politik yang dimaknai sebagai

suatu analisa yang jelas tentang tujuan akhir yang akan dicapai dengan memusatkan segala kekuatan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Strategi selalu memiliki tujuan untuk kemenangan dan kemenangan itu akan tetap menjadi fokus, baik tercermin dalam mandatnya dalam perolehan tambahan suara, dalam kemenangan Pemilu bagi kandidatnya atau di dalam mayoritas bagi suatu peraturan. Kemudian, dari itu semua lantas bagaimana kemenangan tersebut digunakan merupakan tujuan politik yang ada di balik kemenangan yang nampak (Schroder, 2013:3).

Dalam konteks Pemilu, strategi politik ini memiliki bentuk khusus yang biasa disebut sebagai strategi elektoral. Strategi elektoral ini memiliki tujuan untuk memberikan pengaruh sebesar-besarnya kepada masyarakat sebagai calon pemilih agar para pemilih tersebut memberikan dukungan suaranya untuk seorang calon kandidat ataupun partai politik dalam proses pemilu. Semakin banyak masyarakat sebagai pemilih memberikan suaranya maka hasil yang baik pun akan didapatkan seorang calon kandidat ataupun partai politik tersebut. Tujuan akhir dari adanya sebuah strategi elektoral selain kemenangan adalah mendorong munculnya kebijakan-kebijakan baru yang akan diterapkan kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi dari calon kandidat tersebut. Dalam konteks negara yang menganut sistem demokrasi, pergantian kekuasaan eksekutif maupun legislatif dapat dilakukan melalui Pemilu yang demokratis. Tujuannya jelas agar memiliki pengaruh atas kekuasaan tersebut secara konstitusional. Dalam prosesnya, hal ini membutuhkan strategi politik yang dituangkan dalam strategi kampanye untuk memperoleh dukungan suara yang besar dari masyarakat sebagai pemilih. Apabila tidak ada strategi kampanye maka tidak akan ada pengaruh yang besar kepada masyarakat sebagai pemilih untuk memberikan dukungannya dan secara otomatis tidak akan ada kekuasaan yang dimiliki seorang calon kandidat ataupun partai politik sehingga calon kandidat ataupun partai lain lah yang akan memperoleh kemenangan. Dengan melihat penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa strategi kampanye merupakan salah satu strategi politik yang sangat penting untuk dilakukan dan sekaligus menjadi tantangan yang harus harus

dihadapi oleh calon kandidat terutama calon kandidat perempuan yang akan berkontestasi dalam Pilkada. Calon kandidat perempuan harus merumuskan suatu strategi kampanye politik yang tepat agar bisa bersaing dengan para calon kandidat lainnya yang masih di dominasi oleh calon kandidat Laki-laki. Hasil kontestasi Pilkada ini akan berdampak buruk dan merugikan apabila seorang Calon kandidat perempuan tidak memiliki konsep dan perencanaan untuk melakukan strategi dalam kampanye politiknya.

Strategi elektoral dimaknai secara politik ketika ada hubungan antara pelaku politik dengan Konstituen dalam kerangka sebuah metode untuk melakukan pendekatan kepada calon pemilih tersebut dengan tujuannya adalah memperoleh dukungan dan memenangkan kontestasi sebagai cita-cita politik kandidat tersebut. Cita-cita politik yang dimaksud dapat dilihat seperti contohnya kebijakan-kebijakan baru, pembentukan struktur baru di dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan atau penjalanan program-program politik lainnya ketika seorang kandidat berhasil memenangkan kontestasi politik. Dalam konsep lain seperti yang dituliskan dalam (Lerah,2013:3), strategi politik dimaknai sebagai sebuah tehnik mewujudkan tujuan politik dari sebuah organisasi politik karena tanpa adanya sebuah strategi politik,maka perubahan jangka panjang akan sama sekali tidak dapat diwujudkan. Sebagai sebuah perencanaan, strategi politik dimaknai sebagai sebuah rancangan yang bersifat sistemik di lingkungan sebuah organisasi politik dan tentunya di dalam proses pelaksanaannya memiliki manajemen strategi yang berbeda-beda. Terdapat tiga tahap strategi politik pemenangan kandidat yakni *segmentasi pasar politik*, *tahap targeting politik*, dan tahap *positioning politik* kandidat. *Segmentasi politik* digunakan untuk mengenal lebih jauh kelompok-kelompok yang bermanfaat untuk mencari peluang. *Targetting*, digunakan untuk memilih salah satu atau beberapa segmen yang akan menjadi sasaran. Hal ini juga dapat dilakukan guna memfokuskan kegiatan elektoral lainnya seperti kegiatan kampanye. Sasaran politik dipetakan oleh tim sukses. *Positionng*, merupakan strategi yang dilakukan dengan guna menunjukan atribut pembeda yang membedakan antara kandidat satu dengan kandidat yang

lainnya. Hal ini dipersiapkan seluruhnya oleh tim sukses kepada kandidat yang diusungnya agar memperoleh simpati dari para calon pemilihnya. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa strategi politik merupakan sebuah rencana yang sistematis dan implementasinya adalah mencapai tujuan kemenangan partai politik mampu memenangkan semua momentum kontestasi politik. (Sugiarto dkk, 2013:153-154)

2. Mesin Politik dan Tim Sukses

Susan C. Stokes dalam *Perverse Accountability. A Formal Model of Machine Politics With Evidence from Argentina* (2000) , mengemukakan Mesin politik sebagai berikut: “*Political Machines are political organizations that mobilize electoral support by trading particularistic material benefits to citizens in exchange for their votes*” atau dapat diartikan secara garis besar bahwa mesin politik adalah sebuah organisasi politik yang menyediakan dukungan politik dengan memberikan sesuatu hal yang bermanfaat kepada masyarakat untuk ditukar dengan dukungan masyarakat kepada calon atau partai yang diusung. Dalam hal ini diketahui bahwa mesin politik dibangun dari sumber daya dari partai politik pengusung seorang calon kandidat yang akan berkontestasi dalam politik. Partai politik yang memiliki sumber daya manusia membentuk sebuah mesin politik untuk terlibat dalam pencalonan seorang kandidat dengan tujuan kemenangan dari kandidat tersebut. Hal ini juga teridentifikasi sebagai strategi klientelistik dengan diidentifikasi sebagai bentuk barter sumber daya kandidat dengan dukungan dari pemilih.

Stokes *et al* (2013) dan Gans-Morse, Mazzuca, Nichter (2014) mengatakan bahwa partai politik klientelistik terindikasi sebagai mesin politik yang melakukan distribusi sumber daya kepada masyarakat. Tugas dan peran mesin politik dalam ranah seperti ini sangatlah penting terutama mengelola sumber daya dari seorang kandidat yang berkontestasi dalam politik dan tak urung juga terdapat dukungan dari pemodal untuk melakukan kampanye kepada masyarakat dalam rangka mempengaruhi pilihan mereka. Nichter mengungkapkan sebagai sebuah mesin politik, partai bekerja untuk membujuk pemilih melalui berbagai macam platform

kebijakan dan juga mendistribusikan sumber daya seperti barang, uang, pekerjaan dan jasa kepada para konstituennya. Dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, istilah mesin politik ini sering dikenal sebagai “Tim Sukses”.

Tim sukses sebagai sebuah organisasi dalam sistem kerjanya menyerupai *broker* yang digunakan oleh banyak calon kandidat di berbagai negara. Tim sukses ini sebagai sebuah mesin politik berbeda dengan organisasi politik lainnya terutama dalam struktur dan kompleksitasnya. Tim sukses memiliki fungsi dasar sebagai penghubung calon melalui perantara broker dengan para pemilih. Dalam perjalanannya, tim sukses sebagai sebuah mesin politik bergerak secara sistematis dengan garis hierarkis yang jelas dan diatur secara geografis mulai dari koordinator di puncak pimpinan hingga ke para *broker* yang bekerja di level bawah langsung kepada masyarakat. Di dalam struktural hierarkis, menurut Aspinall dan Sukmajati (2015:36), susunan tim sukses seorang kandidat akan terdiri dari tim penasihat inti serta para asisten yang membantu kinerja dalam mobilisasi suara konstituen. Lebih lanjut dalam suatu struktural tim sukses, terdapat seorang koordinator tim sukses di tingkat kabupaten/kota dibawahnya terdapat koordinator kecamatan, koordinator desa atau kelurahan dan juga agen-agen di lingkungan RT dan RW di masyarakat yang sering disebut sebagai koordinator lapangan yang berinteraksi dengan konstituen. Broker ini dapat dimaknai sebagai pekerja kampanye yang termotivasi oleh imbalan dalam bentuk material. Dalam sepak terjangnya, Darwin (2017:533) menjelaskan bahwa broker bekerja dengan mendistribusikan material dari kandidat kepada para konstituen. Dari sinilah peran dari broker sangat menentukan dan berpengaruh terhadap perolehan suara pada saat pemilu. Dalam suatu jaringan perantara dalam suatu dinamika elektoral, Broker ini, sebuah mesin politik memiliki tugas untuk meyakinkan para pemilih mengenai kelebihan para calon yang maju dalam kontestasi pemilihan umum. Mesin-mesin politik yang berada di level akar rumput memainkan peran sangat vital dalam membangun sebuah relasi antara kandidat dengan para pemilih (Aspinall, 2015:33).

Dalam suatu dinamika elektoral , seorang kandidat calon kepala daerah akan tergantung pada jaringan kekerabatan dan pertemanan di dalam membangun mesin politik yang akan dia gunakan. Dalam konteks ini seorang kandidat akan menempatkan kekerabatnya dalam lingkaran dalam tim inti mesin politik. Selanjutnya dalam struktural mesin politik, seorang kandidat akan membentuk orang-orang yang bertugas untuk menghimpun serta memobilisasi suara dari konstituen. Pelibatan beberapa tokoh-tokoh dari masyarakat sebagai broker dalam struktural mesin politik atas nama kandidat tertentu merupakan hal yang sering dijumpai dalam dinamika elektoral. Para tokoh masyarakat ini seringkali memiliki jabatan formal dalam sebuah institusi pemerintahan, misalnya dalam struktural pemerintahan terendah seperti desa/kelurahan, RT ataupun RW serta tokoh-tokoh pemimpin dari asosiasi-asosiasi formal seperti kelompok keagamaan atau orang-orang yang dianggap penting dalam komunitasnya (Aspinall dan Sukmajati, 2015:38).

Dengan pelibatan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki jaringan sosial inilah diharapkan akan mampu memobilisasi suara pemilih secara signifikan bagi kandidat. Disinilah tim sukses di akar rumput bekerja secara langsung memasarkan kandidat kepada masyarakat (Hamdi, 2015:409). Mereka bertugas untuk membujuk para konstituen yang biasanya dimulai dengan mempengaruhi tetangga-tetangga mereka untuk memilih kandidat tertentu. Kegiatan ini tak jarang juga melibatkan kegiatan-kegiatan patronase dengan memberikan sesuatu kepada para pemilih sebagai sebuah *patronage goods*. Menurut beberapa hasil studi mengenai klientelisme keberadaan tim sukses di akar rumput notabene adalah tim yang berasal dari unsur masyarakat setempat secara otomatis sudah dikenal dan berpengaruh besar kepada meningkatnya dukungan dari para pemilih dan hal ini lebih efektif dilakukan daripada dilakukan oleh tim yang belum dikenal. (Aspinall & Berenschot, 2019).

3. Kampanye Politik

Dinamika pemilihan kepala daerah membutuhkan berbagai macam strategi dari para kandidat untuk mempengaruhi calon pemilih agar memperoleh

dukungan dari calon pemilih tersebut. Salah satu cara yang digunakan haruslah sebuah strategi yang sistematis dalam upaya memperoleh dukungan dari para calon pemilih tersebut salah satunya adalah melalui proses kampanye politik. Frimanzah (2010), mengemukakan bahwa kampanye politik diidentifikasi sebagai agenda partai politik ataupun calon yang berkaitan dengan pengumpulan massa, parade orasi dengan memaparkan program kerja guna mempengaruhi opini publik. Hal ini juga dilakukan dengan beberapa perantara media seperti pemasangan umbul-umbul, poster, atribut partai dan juga pengiklanan melalui media cetak ataupun media elektronik.

Kampanye politik tidak bisa dilepaskan dari tim sukses ataupun mesin politik sebagai penggerak utama perolehan dukungan dari pemilih kepada partai politik ataupun calon yang maju dalam kontestasi Pemilu. Kampanye politik dilaksanakan secara terorganisir untuk mempengaruhi konstituen terutama dalam proses pelaksanaan kontestasi Pemilu ataupun Pilkada. Kampanye Politik memiliki merupakan periode yang diberikan oleh penyelenggara Pemilu dalam hal ini adalah KPU, kepada partai politik ataupun calon kandidat yang maju dalam kontestasi politik guna memaparkan program-program unggulan yang ditawarkan sebagai sebuah janji kampanye kepada publik melalui mesin politik tim sukses yang dibangun yang bertujuan mempengaruhi opini masyarakat serta mengajak masyarakat untuk ikut memberikan dukungan kepada partai politik ataupun kandidat calon yang maju di dalam Pemilu pada saat hari pemilihan nanti. Isi dari pesan-pesan kampanye politik biasanya berupa tawaran dalam skema gagasan program-program, beberapa isu-isu mengenai kebijakan dan janji-janji yang akan dilakukan biasanya dilakukan secara berkali-kali untuk menciptakan suatu yang membekas bagi para calon pemilih. Pesan yang dimuat dalam kampanye politik ini haruslah pesan yang sempurna sebagai sebuah agenda politik pembangunan citra sang kandidat dalam proses kontestasi politik tersebut.

BAB III

LANDSCAPE DAN DINAMIKA POLITIK KOTA PEKALONGAN

A. Gambaran Umum Kota Pekalongan

1. Kondisi Geografis

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan Jalur utama penghubung antara Jakarta-Semarang-Surabaya. Kota Pekalongan merupakan salah satu kota yang terletak di kawasan pesisir pantai utara (PANTURA) pulau jawa di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas hanya 0,14% dari total luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kota Pekalongan merupakan sebuah kota yang terletak di jalur utama penghubung antara Jakarta-Semarang-Surabaya.

Kota Pekalongan berjarak 384 Km dari Jakarta dan berjarak 409 km dari Kota Surabaya. Kota Pekalongan memiliki luas keseluruhan 42,25 Km² atau 0,14% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah ini secara geografis terletak pada Koordinat antara 60 50' 42"-6 0 55' 44" Lintang Selatan dan 1090 37' 55" - 1090 42' 19" Bujur Timur (BPS Kota Pekalongan 2019). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Kota Pekalongan memiliki jarak 384 Km sebelah timur dari Jakarta dan berjarak 101 Km sebelah barat Kota Semarang ini memiliki batas wilayah antara lain sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang
- Sebelah Barat : Kabupaten Pekalongan
- Sebelah Timur : Kabupaten Batang

Dengan luas wilayah yang relatif kecil, untuk mengelilingi seluruh wilayah Kota Pekalongan bisa dilakukan dengan menggunakan sepeda ataupun juga sepeda motor. Dimulai dari bagian paling utara Kota Pekalongan ke bagian paling selatan bisa ditempuh dengan estimasi waktu 15-20 menit begitupula dari arah

Kota Pekalongan memiliki empat jenis tanah yakni tanah alluvial hidromorf yang banyak tersebar di kawasan utara Kota Pekalongan, alluvial kelabu tua tersebar di wilayah Pekalongan timur dan Pekalongan Barat, serta alluvial kelabu dan juga alluvial coklat keabuan yang persebarannya di wilayah Pekalongan selatan. Wilayah Kota Pekalongan yang terletak di are pesisir berimplikasi terhadap sebagian wilayah Kota Pekalongan sangat bergantung pada pasang surut air laut, curah hujan, dan kondisi aliran sungai dari hulu. Hal ini pulalah yang menyebabkan sebagian wilayah Kota Pekalongan terendam air rob yang disebabkan oleh pasang air laut. Hal ini khususnya terjadi di wilayah Pekalongan Utara (RKPD Kota Pekalongan Tahun 2021).

3. Administratif Wilayah Kota Pekalongan

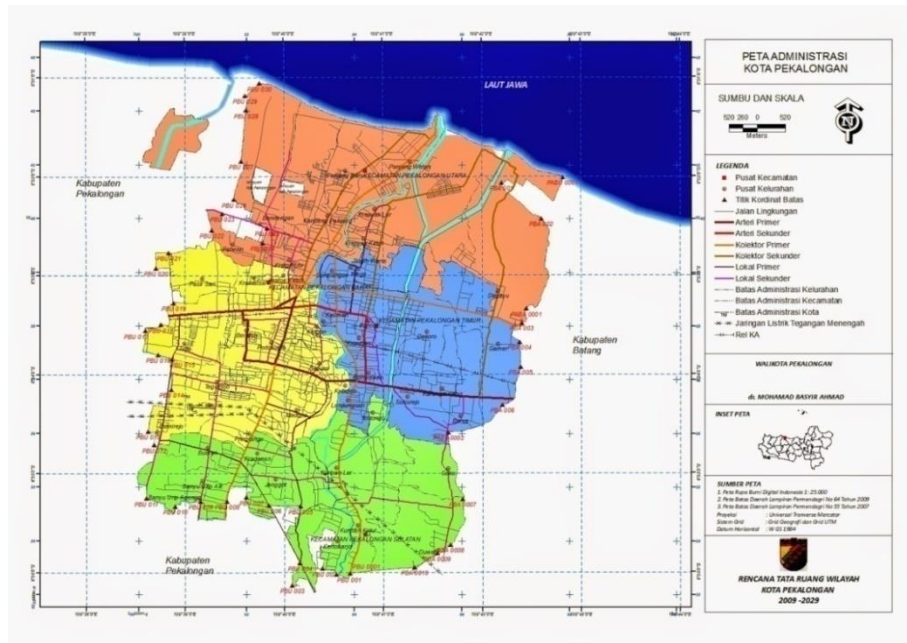
Secara Administratif Kota Pekalongan terbagi kedalam empat wilayah kecamatan. Ke empat wilayah kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Pekalongan Utara yang berbatasan dengan laut jawa, Kecamatan Pekalongan Timur yang berbatasan dengan kabupaten batang, Kecamatan Pekalongan Selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang serta Kecamatan Pekalongan Barat yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pekalongan. Empat wilayah kecamatan Kota Pekalongan ini memiliki Luas tiap-tiap wilayah kecamatan Kota Pekalongan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1 : Luas Wilayah Kecamatan Kota Pekalongan

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km Persegi)
1	Pekalongan Utara	14,88
2	Pekalongan Timur	9,52
3	Pekalongan Barat	10,5
4	Pekalongan Selatan	10,8
Kota Pekalongan		45,25

Sumber : BPS Kota Pekalongan 2020

Gambar 3.2 : Peta wilayah administratif Kota Pekalongan



Sumber : <http://www.pa-pekalongan.go.id/>

Sebelumnya terdapat 47 Kelurahan di Kota Pekalongan, namun dengan adanya Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penggabungan Kelurahan di wilayah Kota Pekalongan, jumlah kelurahan di Kota Pekalongan saat ini menjadi 27 Kelurahan. Adapun perubahan perubahan wilayah kelurahan tersebut antara lain :

1. Kecamatan Pekalongan Utara, Semula terdapat 10 Kelurahan saat ini menjadi 7 Kelurahan antara lain :
 - a. Kelurahan Krapyak
 - b. Kelurahan Padukuhan Kraton
 - c. Kelurahan Kandang Panjang
 - d. Kelurahan Panjang Wetan
 - e. Kelurahan Panjang Baru
 - f. Kelurahan Degayu
 - g. Kelurahan Bandengan

2. Kecamatan Pekalongan Timur, Semula Terdapat 13 Kelurahan menjadi 7 Kelurahan antara lain :

- a. Kelurahan Noyontaansari
- b. Kelurahan Kauman
- c. Kelurahan Setono
- d. Kelurahan Kali Baros
- e. Kelurahan Poncol
- f. Kelurahan Klego
- g. Kelurahan Gamer

3. Kecamatan Pekalongan Barat, semula terdapat 13 Kelurahan saat ini menjadi 7 Kelurahan antara lain :

- a. Kelurahan Kebulen
- b. Kelurahan Bendan Kergon
- c. Kelurahan Pasirkratonkramat
- d. Kelurahan Pringrejo
- e. Kelurahan Medono
- f. Kelurahan Podosugih
- g. Kelurahan Tirto

4. Kecamatan Pekalongan Selatan, semula terdapat 11 Kelurahan saat ini menjadi 6 Kelurahan antara lain :

- a. Kelurahan Buaran Kradenan
- b. Kelurahan Kuripan Kertoharjo
- c. Kelurahan Kuripan Yosorejo
- d. Kelurahan Sokoduwet
- e. Kelurahan Banyurip
- f. Kelurahan Jenggot

4. Demografis Kota Pekalongan

Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2019 berdasarkan data yang di dapat dari Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan sebanyak 307.097 Jiwa, dengan Komposisi jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada komposisi jumlah

penduduk laki-laki. Adapun rincian jumlah penduduk laki-laki sebesar 153.518 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 153.579 jiwa. Kepadatan penduduk terbesar ada di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat dengan presentasi penduduk sejumlah 31,3% dari total jumlah penduduk Kota Pekalongan dan kepadatan penduduk sebesar 9507,96 Jiwa/Km².

Tabel 3.2 : Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Pekalongan, 2019

Kecamatan + Kota	2019			
	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk
Pekalongan Barat	95555	0,71	31,3	9507,96
Pekalongan Timur	65857	0,45	21,8	6917,75
Pekalongan Selatan	63052	1,39	20,1	5838,15
Pekalongan Utara	82633	0,96	26,8	5553,29
Kota Pekalongan	307097	0,86	100	6786,67

Sumber : Kota Pekalongan dalam angka 2020 dan BPS Kota Pekalongan 2019

Jumlah kepadatan penduduk Kota Pekalongan di tahun 2019 mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan jumlah angka kelahiran penduduk di Kota Pekalongan yang semakin meningkat, ditambah dengan adanya penduduk yang bermigrasi dari dan ke dalam Kota Pekalongan. Dari rentang Kurun waktu 2015-2019 jumlah kepadatan penduduk di Kota Pekalongan menunjukkan pergerakan yang dinamis. Dari jumlah kepadatan penduduk Kota Pekalongan dalam rentang waktu 2015-2019 dapat diketahui kepadatan terendah terjadi pada tahun 2015 yakni sebesar 6.553,22 Jiwa/Km². Kepadatan penduduk ini terus mengalami peningkatan secara terus menerus hingga kepadatan yang tertinggi pada tahun 2019 yakni sebesar 6.786,67 Jiwa/Km². Data mengenai jumlah kepadatan penduduk di Kota Pekalongan dalam rentang tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.3 : Distribusi Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan dalam rentang waktu
2015-2019**

TAHUN	KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM2)
2015	6.553,22
2016	6.612,64
2017	6.672,00
2018	6.729,00
2019	6.786,67

Sumber BPS Kota Pekalongan dengan sedikit penyesuaian

Penjabaran lebih lanjut dari data kepadatan penduduk Kota Pekalongan yang telah dijelaskan diatas, komposisi penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2019 di dominasi oleh penduduk dengan rentang usia antara 20-24 tahun dengan jumlah sebesar 30.157 jiwa. Penduduk pada rentang usia 15-19 tahun berada pada posisi terbanyak kedua dengan jumlah 27.822 Jiwa. Adapun jumlah paling sedikit adalah penduduk Kota Pekalongan dengan rentang usia 60-64 tahun dengan jumlah sebesar 10.729 jiwa. Jumlah penduduk Kota Pekalongan tahun 2019 berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 : Distribusi Penduduk Kota Pekalongan sesuai kelompok umur tahun 2019

KELOMPOK UMUR	2019		
	TOTAL	PEREMPUAN	LAKI-LAKI
0-4	24 371,00	11 755,00	12 616,00
5-9	25 327,00	12 322,00	13 005,00
10-14	25 082,00	12 240,00	12 842,00
15-19	27 822,00	13 724,00	14 098,00
20-24	30 157,00	14 044,00	16 113,00
25-29	26 267,00	12 418,00	13 849,00
30-34	23 097,00	11 484,00	11 613,00
35-39	21 534,00	11 095,00	10 439,00
40-44	21 206,00	10 968,00	10 238,00
45-49	20 122,00	10 346,00	9 776,00
50-54	18 815,00	9 740,00	9 075,00
55-59	15 961,00	8 194,00	7 767,00
60-64	10 729,00	5 509,00	5 220,00
65+	16 607,00	9 740,00	6 867,00
TOTAL JUMLAH	307 097,00	153 579,00	153 518,00

Sumber BPS Kota Pekalongan dengan sedikit penyesuaian

Tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk Kota Pekalongan terbagi kedalam beberapa jenis kegiatan antara lain jumlah angkatan kerja, bekerja, mencari kerja, bukan angkatan kerja, sekolah dan lain sebagainya. Jumlah presentase angkatan kerja penduduk Kota Pekalongan pada rentang waktu 2017-2019 mengalami peningkatan. Data terakhir menunjukkan jumlah angkatan kerja penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2019 adalah sebesar 73,32% dari total keseluruhan jumlah penduduk Kota Pekalongan. Jumlah presentase angkatan kerja penduduk kota pekalongan masih di dominasi oleh angkatan kerja laki-laki dengan presentase 82,67% sedangkan untuk angkatan kerja perempuan sebesar 62,17% pada tahun 2019. Pada data yang sama di tahun 2019 jumlah penduduk kota pekalongan yang bekerja sebesar 68,15% dengan presentase masih di dominasi oleh pekerja laki-laki sebesar 77,68% sedangkan jumlah pekerja perempuan sebesar 58,80%. Data mengenai tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kegiatan dari penduduk kota pekalongan dapat dilihat pada tabel data berikut:

Tabel 3.5 : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Penduduk Kota Pekalongan tahun 2019

JENIS KEGIATAN	TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA MENURUT JENIS KEGIATAN (%)		
	LAKI-LAKI + PEREMPUAN	PEREMPUAN	LAKI-LAKI
Angkatan Kerja	72,32	62,17	82,67
Bekerja	68,15	58,80	77,68
Mencari Kerja	4,17	3,37	4,99
Bukan Angkatan Kerja	27,68	37,83	17,33
Sekolah	8,44	7,76	9,13
Mengurus Rumah tangga	14,60	26,05	2,93
Lainnya	4,64	4,01	5,27
Penduduk Usia Kerja	100,00	100,00	100,00

Sumber BPS Kota Pekalongan 2020

Kota Pekalongan sebagai kota yang multikultur terdiri dari tiga etnis utama sebagai komposisi penduduk kota pekalongan yakni etnis Jawa, Arab dan China. Selain dari ketiga etnis tersebut, Kota Pekalongan juga memiliki etnis-etnis lain yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kota Pekalongan. Selain etnis yang beragam, penduduk Kota Pekalongan juga dapat diklasifikasikan distribusinya melalui indikator agama yang dianut. Agama Islam masih menjadi agama mayoritas yang dipeluk oleh penduduk Kota Pekalongan dengan total jumlah pemeluk sebesar 149.549 jiwa. Jumlah penganut agama Kristen Protestan di Kota

Pekalongan sebesar 5.732 jiwa. Jumlah penganut agama Katholik di kota Pekalongan sebesar 3.806 jiwa. Hal ini diikuti oleh penduduk penganut agama Budha di Kota Pekalongan yang berjumlah 1.445 jiwa dan yang merupakan jumlah penganut terkecil di Kota Pekalongan adalah penduduk dengan keyakinan agama Hindu yakni sebanyak 55 jiwa. Sementara itu sebanyak 77 jiwa lainnya merupakan penduduk dengan penganut kepercayaan lainnya.

Tabel 3.6 : Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang dianut di Kota Pekalongan 2019

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK					
	ISLAM	PROTESTAN	KATHOLIK	BUDHA	HINDU	LAINYA
PEKALONGAN BARAT	93.390	1.818	1.219	313	23	15
PEKALONGAN TIMUR	67677	1742	1076	607	15	32
PEKALONGAN SELATAN	37899	2074	1483	508	16	24
PEKALONGAN UTARA	31908	98	28	17	1	6
TOTAL	149.549	5.732	3.806	1.445	55	77

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kota Pekalongan

Keberagaman etnis dan juga keberagaman agama yang ada pada masyarakat Kota Pekalongan, maka Kota Pekalongan dapat disebut juga sebagai Kota yang multi etnis. Hal ini pula yang berdampak pada munculnya dinamika sosial budaya yang ada di Kota Pekalongan. Menurut sejarahnya, Pekalongan merupakan kota pesisir yang cukup besar dan terkenal sebagai bandar pelabuhan perdagangan pada zaman dahulu. Sebagai bandar pelabuhan perdagangan, Pekalongan menjadi tempat singgah berbagai macam pedagang dari berbagai macam belahan dunia. Kapal-kapal dagang dari jazirah Arab yang berlayar melalui semenanjung Hadramaut, India datang ke berbagai penjuru Nusantara untuk berdagang. Salah satu tujuan lokasi yang menjadi tujuan tempat bersinggah kapal-kapal dagang mereka adalah daerah-daerah yang terletak di pesisir bagian utara Pulau Jawa. Beberapa daerah di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa seperti, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Demak, Jepara, Juwana, Rembang hingga Tuban menjadi lokasi strategis untuk para pedagang internasional tersebut singgah dan melakukan transaksi jual beli. Dengan banyaknya pedagang-pedagang dari daerah jazirah arab yang singgah di sepanjang pesisir Pulau Jawa inilah akhirnya

menciptakan akulturasi budaya dimana para pedagang ini akhirnya menetap dan menikah dengan penduduk lokal sehingga terciptalah pemukiman dan komunitas-komunitas Islam di kawasan pesisir utara pulau jawa.

Selain para pedagang dari jazirah arab, Pekalongan juga banyak disinggahi pedagang-pedagang dari negara lain seperti pedagang-pedagang dari daratan Cina, India dan Eropa. Secara tidak langsung dengan adanya para pedagang yang singgah dan berdagang di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa unu turut mewarnai dinamika sosial budaya yang ada di Pekalongan. Dinamika sosial budaya tersebut terwujud akibat dari adanya perubahan nilai-nilai sosial kebudayaan masyarakat Kota Pekalongan yang berpengaruh terhadap bentuk-bentuk adat dan tradisi yang ada di Kota Pekalongan. Tiap-tiap etnis memberikan warna sendiri dalam tradisi dan budaya Kota Pekalongan. Salah satu kebudayaan yang melekat erat dengan Kota Pekalongan adalah batiknya.

Kota Pekalongan mendapatkan julukan sebagai kota batik tentunya tidak terlepas dari sejarah masa lampau Pekalongan itu sendiri. Berbicara mengenai Pekalongan tidak bisa dilepaskan dari tiga unsur integral pembangun Pekalongan itu sendiri, yakni Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Eks Karesidenan Pekalongan. Batik merupakan unsur budaya penting yang sudah melekat erat pada kehidupan masyarakat Pekalongan tersebut. proses pembuatan batik sudah dikerjakan secara turun-temurun sejak lama oleh masyarakat Pekalongan dan batik ini terbukti mampu bertahan seiring dengan perkembangan zaman. Sebenarnya tidak ada catatan yang otentik yang menyatakan kapan batik mulai dikenal dan berkembang di Pekalongan, akan tetapi menurut catatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekalongan batik sudah ada kurang lebih sekitar tahun 1800.

Pada dasarnya tiap-tiap daerah di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa memiliki kekhasan tersendiri serta berorientasi pada segmen pasar masing-masing. Adanya etnis-etnis pendatang seperti etnis Cina, Arab, India, Melayu dan Belanda serta jepang turut mewarnai beragam motif batik yang ada di Kota

Pekalongan. Dengan adanya unsur-unsur tersebut muncul motif-motif baru dari batik tersebut. Corak yang beragam yang muncul pada akhirnya dikenal sebagai motif khas dari Kota Pekalongan itu sendiri. Salah satu motif yang sangat terkenal bahkan sudah menjadi motif khas dari Kota Pekalongan adalah motif batik Jlamprang. Motif yang berbentuk bulat ini merupakan motif batik perpaduan antara tiga kebudayaan yakni budaya Jawa, budaya Arab dan juga budaya India. Selain motif batik Jlamprang, Kota Pekalongan memiliki motif khas lain yakni motif batik encim dan juga motif batik buketan. Motif batik encim dan buketan ini banyak terpengaruh dengan nuansa tradisi dan budaya etnis china di Kota Pekalongan. Selain pengaruh budaya Arab, India dan Cina, motif batik Kota Pekalongan juga mendapatkan pengaruh juga dari orang-orang Belanda yang pernah berada di Kota Pekalongan. Motif yang terpengaruh oleh budaya orang-orang belanda ini dikenal dengan nama motif Pagi-Sore. Pada masa pendudukan Jepang pun turut memberikan warna pada motif batik yang ada di Pekalongan. Terbukti motif Hokokai yang kental dengan masa pendudukan Jepang tumbuh pesat pada masanya.

Perkembangan industri tekstil terutama yang bergerak dalam bidang batik di Kota Pekalongan sendiri bertumbuh semakin lama semakin pesat. Industri batik di Kota Pekalongan dapat dikategorikan dalam dua tipe yakni industri batik berskala besar seperti pabrik-pabrik batik ataupun industri batik berskala kecil seperti pengrajin-pengrajin batik rumahan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa batik memiliki corak motif dan warna yang menjadi ciri khas tiap-tiap daerah. begitupula di Pekalongan, batik yang sudah menjadi budaya tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Kota Pekalongan pada dasarnya dikembangkan melalui perkembangan warna dan motif yang menjadi segmentasi pasar yang disukai konsumen. Batik pekalongan selain banyak dipengaruhi oleh etnis-etnis tertentu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, juga dipengaruhi oleh nilai budaya konsumen. Hal ini menyebabkan desain batik dari Kota Pekalongan memiliki ragam corak, motif dan warna yang beragam.

Selain batik, Kota Pekalongan juga memiliki keanekaragaman kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Disini kita tidak akan bisa terlepas dari tiga etnis yang berperan cukup penting dalam mewarnai dinamika kehidupan masyarakat Kota Pekalongan. Tradisi dan kebudayaan yang ada di Kota Pekalongan otomatis tidak bisa terlepas dari etnis yang ada di Kota Pekalongan. Salah satu etnis di Kota Pekalongan yakni Etnis Tionghoa. Menilik dari sejarahnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya selain para pedagang dari jazirah Arab Kota Pekalongan juga banyak disinggahi pedagang-pedagang dari daratan Cina. Sebagian besar dari para pedagang tersebut akhirnya menetap di Pekalongan dan dalam perkembangannya menciptakan komunitas-Komunitas etnis Cina di Pekalongan. Sebagai bagian dari struktur masyarakat Kota Pekalongan, etnis tionghoa banyak menempati kawasan pemukiman di dekat aliran sungai Kupang/Kali Lodji Kota Pekalongan. Hal ini sudah terjadi sejak lama mengingat pada zaman dahulu sungai Kupang atau Kali Lodji yang terletak di Kota Pekalongan ini menjadi salah satu jalur penghubung perdagangan utama di Pekalongan. Dari sinilah pada akhirnya banyak pedagang-pedagang Cina yang menetap. Kedatangan para imigran Cina di Kota Pekalongan ini berlangsung secara berangsur-angsur. Mereka memanfaatkan hubungan kekeluargaan dengan sesama etnis mereka yang telah terlebih dahulu datang ke tempat perantauan. Proses migrasi ini terjadi dengan maksud untuk mencaai sumber-sumber penghidupan baru di lokasi yang baru dan pada akhirnya mereka mendirikan pemukiman-pemukiman yang bertahan hingga sekarang. Saat ini pemukiman etnis Cina tersebut terkenal dengan nama Pecinan Kota Pekalongan yang menempati kawasan di jalan Belimbing Kota Pekalongan. Kampun Pecinan di Kota Pekalongan tidak hanya menjadi lokasi pemukiman tempat tinggal saja namun juga sebagai tempat etnis Cina di Kota Pekalongan mengembangkan usaha dan juga mengembangkan tradisi serta kebudayaan yang mereka bawa. Etnis Cina memiliki adat dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun bahkan samoai dengan saat ini sudah menjadi bagian dari adat tradisi Kota Pekalongan seperti tradisi *Pek Chun*, yakni semacam tradisi yang hampir sama dengan tradisi sedekah bumi dari etnis Jawa Islam namun pelaksanaannya dilakukan di kawasan laut Pekalongan. Selain adanya

tradisi Pek Chun tersebut masyarakat etnis tionghoa Kota Pekalongan juga memiliki tradisi lain seperti Pasar Imlek, Perayaan *Cap Go Meh*, dan Juga Festival Pintu Dalam yang diadakan di kawasan pecinan Kota Pekalongan. Selain dalam bentuk tradisi dan kebudayaan, para etnis Cina di Kota Pekalongan juga mendirikan Klenteng sebagai Rumah sarana peribadatan mereka.

Selain masyarakat etnis Cina, Kota Pekalongan juga memiliki struktur masyarakat yang berasal dari etnis Arab. Seperti yang telah dihelaskan bahwa sejarah masuknya etnis arab ke wilayah Pekalongan adalah melalui jalur perdagangan. Setelah itu para pedagang arab tersebut menetap dan banyak pula yang menikah dengan penduduk lokal sehingga tercipta komunitas masyarakat keturunan etnis Arab di wilayah Pekalongan. Selain berdagang, pada sejarahnya para pedagang-pedagang dari jazirah arab inijuga ikut dalam proses penyebaran agama Islam di kawasan pesisir utara Pulau Jawa. Selain dibawa oleh para pedagang dari jazirah Arab, penyebaran Islam juga tidak lepas dari jasa Walisongo. Seperti kita ketahui bahwa sudah menjadi corak tersendiri bahwa penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Walisongo sebagian besarnya dilakukan di wilayah pesisir termasuk juga di dalamnya adalah pesisir utara Jawa. Dari sinilah Agama Islam menjadi sangat cepat tersebar dan menjadi agama mayoritas yang dipeluk oleh masyarakat di daerah pesisir termasuk juga di dalamnya adalah pesisir Pekalongan.

Perkembangan Etnis Arab di Kota Pekalongan sendiri terus berkembang hingga saat ini. Di Kota Pekalongan sendiri bahkan terdapat satu wilayah dimana etnis Arab tinggal yakni tepatnya di Kelurahan Klego dan Kelurahan Krapyak Kota Pekalongan. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah Kelurahan tersebut adalah etnis keturunan Arab namun mereka hidup berdampingan pula dengan masyarakat lainnya terutama yang asli orang Jawa. Sebagai salah satu bagian dari Kota Pekalongan pun memiliki tradisi dan budayanya sendiri. Tradisi dan budaya bernuansa timur tengah yang dibawa etnis keturunan arab di Kota Pekalongan seperti Tari Hadroh, Tari Sufi , kesenian rebana dan karawitan juga sudah menjadi bagian dari tradisi dan budaya yang ada di Kota Pekalongan.

Selain dari tradisi dan budaya, tokoh tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh yang cukup kuat di Kota Pekalongan juga berasal dari etnis Arab seperti para habaib dan ulama. Di pekalongan sendiri terdapat beberapa Habaib dan ulama besar yang terkenal luas seperti Habib Lutfi, Habib Bagir dan Habib Abdurahman (Mahsun, 2020).

Perlu diketahui Ulama Arab yang ada di Indonesia terdapat dua golongan yakni golongan Habaib atau golongan Syahid dan yang kedua merupakan warga keturunan Arab biasa. Golongan Habaib atau Syahid adalah mereka yang masih keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Menurut silsilahnya para Habaib di Kota Pekalongan sesuai apa yang disampaikan oleh Habib Ridho, merupakan keturunan dari Syahid Ali Kumaiddi dan pada umumnya para Habaib ini merupakan keturunan ke 36 sampai keturunan ke 42 dari Nabi Muhammad SAW. Para Habaib dan Ulama di Kota Pekalongan juga membawa peran yang signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam. Para habaib dan Ulama di Kota Pekalongan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki pengaruh yang cukup besar bagi tatanan kehidupan sosial serta politik. Nuansa Islam yang kental ditambah dengan kehadiran para tokoh-tokoh seperti para Habaib dan Ulama yang berpengaruh di kota Pekalongan membuat kota ini dikenal dengan kota yang kental dengan budaya religius. Meskipun dari segi luas wilayah Kota Pekalongan dikategorikan sebagai daerah urban yang relatif kecil, namun di kota ini sendiri terdapat kurang lebih 30 pondok pesantren. Hal ini pulalah yang menjadikan Kota Pekalongan terkenal dengan julukan sebagai Kota Santri disamping julukan yang terkenal sebagai Kota Batik (Mahsun, 2020).

Dari penjelasan yang telah diuraikan, kita mengetahui bahwa Kota Pekalongan merupakan kota yang memiliki beragam tradisi dan budaya serta didukung dengan komposisi penduduk yang plural. Hal ini sama seperti kebanyakan kota lainnya di Jawa Tengah yang memiliki masyarakat multikultural dari segi entitas, budaya serta agama. Kota Pekalongan memiliki berbagai macam komunitas masyarakat etnis yang hidup berdampingan sejak lama dan tinggal

berkelompok di kawasan-kawasan tertentu. Kehidupan sosial masyarakat Kota Pekalongan yang multietnis tersebut berjalan dengan baik begitupula dengan kehidupan beragamanya. Hal ini sekaligus menjadi Indikator yang menunjukkan bahwa Kota Pekalongan merupakan kota yang memiliki nilai moderasi beragama yang tinggi. Nilai-nilai moderasi dan sikap toleransi yang ditunjukkan oleh seluruh masyarakat Kota Pekalongan pada akhirnya pun secara alami berpengaruh pada nilai-nilai sosial, tradisi dan budaya Kota Pekalongan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam aspek seperti gaya arsitektur bangunan seperti yang terdapat di kawasan jalan belimbing Kota Pekalongan dimana bangunan-bangunan yang berada disana sangat kental dengan unsur-unsur tionghoa dan juga yang terdapat di wilayah Klego yang sangat kental dengan bangunan-bangunan bernuansa Arab. Selain bangunan, nilai-nilai ini juga masuk kedalam aspek lain yang pada akhirnya menjadi corak tersendiri dari budaya Kota Pekalongan seperti kesenian, makanan, dan lain sebagainya (Mahsun, 2020)

Perjalanan panjang Kota Pekalongan dengan multikultur masyarakatnya menjadikan kita semakin paham bahwa sejatinya perbedaan merupakan fitrah akan tetapi persatuan dan nilai-nilai kebersamaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat itu sendirilah yang menjadikan kestabilan dan keamanan sosial dapat tercipta dan terwujud. Peran dari tiap-tiap etnis yang menjadi bagian dari struktur komunitas masyarakat di Kota Pekalongan sangatlah penting. Selain membawa pengaruh kepada tradisi dan kebudayaan peran dari berbagai macam komunitas etnis masyarakat Kota Pekalongan ini juga berpengaruh terhadap sektor-sektor lain seperti sektor sosial, perekonomian, dan juga dinamika perpolitikan di Kota Pekalongan. Hal ini seperti yang ditunjukkan dengan keberadaan para Habaib dan Ulama yang berpengaruh di Kota Pekalongan. Para Habaib dan Ulama ini tidak hanya memiliki pengaruh terhadap urusan agama dan sosial saja akan tetapi juga memiliki pengaruh yang besar di dalam perpolitikan. Pandangan dan sikap politik yang ditunjukkan oleh kalangan Habaib dan ulama berpengaruh di Kota Pekalongan ini akan menentukan pandangan dan sikap politik masyarakat Kota Pekalongan terutama kalangan masyarakat muslim. Dari sini tak jarang setiap ada

penyelenggaraan kontestasi politik, para elit dan tokoh-tokoh politik baik lokal ataupun nasional selalu datang dan mengunjungi (*Sowan*) kepada para habaib dan ulama ini untuk mendapatkan restu/persetujuan dari habaib dan ulama yang berada di daerah tersebut (Savirani, 2015).

Selain para Habaib dan ulama yang notabene dari etnis Arab dan kalangan muslim, komunitas masyarakat etnis Cina di Kota Pekalongan pun memiliki pengaruhnya sendiri. Sebagian besar dari masyarakat etnis Cina yang notabene merupakan pedagang dan pengusaha memiliki modal yang cukup besar terutama bisa dikaitkan dengan pengaruh terhadap dinamika sosial,ekonomi dan politik yang ada di Kota Pekalongan. Para calon kandidat calon kepala daerah ataupun calon anggota legislatif yang hendak berkompetisi dalam kontestasi politik juga sering meminta bantuan dari para pengusaha-pengusaha etnis Cina di Kota Pekalongan. Modal yang biasanya diberikan adalah berupa bantuan modal finansial yang sangat bermanfaat untuk membantu biaya kampanye calon dan juga kesolidan antar warga masyarakat sesama etnis Cina juga dapat berpengaruh terhadap mobilisasi suara yang akan diberikan kepada salah satu calon yang didukung oleh mereka. Dengan demikian kita menjadi lebih tau bahwa dinamika sosial budaya masyarakat khususnya masyarakat yang berada di Kota Pekalongan memiliki pengaruh lebih luas dari sekedar kehidupan bermasyarakat saja, akan tetapi pengaruh tersebut juga signifikan dilihat dalam bidang-bidang lain seperti bidan ekonomi dan juga bidang politik.

B. Dinamika Politik dan Pilkada 2020 Kota Pekalongan

1. Sejarah Pemerintahan Kota Pekalongan

Menurut data yang di dapat dari arsip pemerintah Kota Pekalongan,pada awal abad ke XVII tepatnya pada masa VOC, pemerintah kolonial Hindia Belanda membagi wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi 36 Kabupaten melalui sistem pemerintahan yang bersifat terpusat. Sistem pemerintahan ini berlanjut hingga pada abad ke XIX pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan undang-undang yang mengatur dan membagi Pulau Jawa menjadi beberapa Residen atau

yang dikenal dengan sistem *Gewest*. Pemberlakuan sistem Residen/ *Gewest* yang di dasarkan pada Undang-Undang tahun 1954 ini mengatur tiaptiap *Gewest* yang ada di Jawa mencakup beberpa *Afdeling* (Setingkat Kabupaten) dengan pemimpinya yakni asisten Residen. Selain *Afdeling*, pemerintah kolonial Hindia Belanda juga membentuk sistem Distrik (Kawedanan) yang dipimpin oleh Controleur serta Onderdistrict (Setingkat Kecamatan) yang dipimpin oleh seorang Aspiran Controleur.

Adapun pembagian *Gewest* yang ada di Jawa Tengah meliputi lima *Gewest* yakni :

- Semarang *Gewest* yang terdiri dari Semarang, Kendal, Demak, Kudus, Pati, Jepara serta Grobogan
- Rembang *Gewest* yang terdiri dari Rembang, Blora, Tuban dan Bojonegoro
- Kedu *Gewest* yang terdiri dari Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kutoarjo, Kebumen, dan Karanganyar
- Banyumas *Gewest* terdiri dari Banyumas, Purwoerto, Cilacap, Banjarnegara, serta Purbalingga
- Pekalongan *Gewest* terdiri dari Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan dan Batang

Munculnya politik etis pada kalangan pemikir Belanda menyerukan pemerintah Hindia Belanda untuk melakukan desentralisasi administratif pemerintahan. Para pemikir belanda menuntut agar pemerintah pusat memberikan hak otonomi bagi tiap Karesidenan (*Gewest*) dan Kota besar (*Gementee*) serta mereka juga meminta pemerintah pusat Hindia Belanda untuk membentuk dewan-dewan daerah di wilayah administratif tersebut. Hal ini kemudian direspon oleh pemerintah Hindia Belanda melalui *Staatblad* dengan nomor 329 Tahun 1903. *Staatblad* ini kemudian menjadi dasar hukum pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan hak otonomi kepada wilayah-wilayah tadi. Kota Pekalongan mendapatkan hak otonomi sesuai dengan yang diatur di dalam *Staatblad* Nomor

124 tentang *Decentralisatie Afzondering Van Gelmiddelen voor de Hoofplaats Pekalongan uit de Aglemenee Geldmiddelen de dier Plaatse* tertanggal 1 April 1906. Mulai sejak saat itu hingga sampai dengan saat ini setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari jadi Kota Pekalongan.

Memasuki era pemerintahan Jepang, pemerintah Hindia Belanda menyerahkan kedaulatan Hindia Belanda kepada tentara Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Pada masa pemerintahan Jepang inilah dewan-dewan daerah dihapuskan. Sementara itu pemerintahan Kabupaten dan Kotamadya tetap dilanjutkan dengan wewenang hanya menjalankan pemerintahan dekonsentrasi. Pada tahun 1945 setelah di Indonesia diproklamkan kemerdekaanya, secara sepenuhnya wilayah-wilayah yang dahulu merupakan bekas wilayah kekuasaan Hindia Belanda, kini masuk menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia termasuk juga di dalamnya adalah Kota Pekalongan. Dalam yuridis formalnya, Kota Pekalongan dibentuk dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomer 16 Tahun 1950 mengenai Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Jawa Barat/Jawa Tengah/Jawa Timur dan Daerah Istimewa Jogjakarta. Pada tahun 1965 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 18 mengenai Pokok-pokok pemerintahan daerah, maka Pekalongan berubah sebutanya menjadi Kotamadya Dati II Pekalongan. Pada masa Orde Baru, terbut PP Nomor 21 Tahun 1988 yang kemudian ditindaklanjuti oleh instruksi mendagri Nomor 3 Tahun 1989 yang mengatur luas wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan dari yang semula 1.755 Ha menjadi 4.465,24 Ha. Selain mengatur mengenai perubahan luas wilayah, Undang-undang ini juga mengatur bahwa Kotamadya Dati II Pekalongan terdiri dari 4 Kecamatan, 22 Desa dan 24 Kelurahan. Pada tahun 1999 seiring dengan bergulirnya era Reformasi, terbit PP Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dilanjutkan dengan terbitnya PP Nomer 32 Tahun 2004. Dengan adanya PP Nomer 32 ini kemudian sebutan Kotamadya Dati II Pekalongan berubah menjadi Kota Pekalongan (Pekalongankota.go.id ,2020).

2. Dinamika Eksekutif dan Legislatif Kota Pekalongan

Sebagai sebuah kota, Kota Pekalongan dipimpin oleh seorang Walikota. Dari rentang waktu mulai dari tahun 1906 sampai dengan 2019 Kota Pekalongan sudah dipimpin oleh 16 Walikota. Layaknya tugas kepala daerah sebagai pemangku tanggung jawab pemerintahan daerah, Walikota Pekalongan tentunya akan terfokus pada program-program kerja dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Pekalongan. Para Walikota Pekalongan sejak mulai dari awal Kota Pekalongan berdiri hingga sekarang, memiliki ciri khas masing-masing dalam gaya kepemimpinannya dalam membangun Kota Pekalongan menjadi lebih baik. Para walikota yang pernah memimpin Kota Pekalongan tersebut antara lain :

- H.J Kuneman (1 April 1906 – 8 Maret 1942)
- Kawabata (8 Maret 1942 – 24 Agustus 1945)
- R. Soepomo Danoewilogo (17 Agustus 1945 – 15 Maret 1954)
- Agoes Miftah Danoekoesoemo (1 Juni 1954 – 1 November 1956)
- M. Soehartono Slamet Poespopranoto (1 November 1956 – 19 November 1957)
- R. Iskandar Said (13 Januari 1958 – 17 Januari 1959)
- R.M Bambang Sardjono Noersetyo (14 April 1959-November 1959)
- R. Mochammad Tedjo (5 April – 30 Mei 1967)
- R. Teguh Soenarjo (30 Mei 1967 – 11 Oktober 1972)
- Drs. R Soepomo (11 Oktober 1972- 7 November 1979)
- H. Joko Prawoto, BA (7 November 1979-7 November 1989)
- H. Mochamad Chaeron, BA (7 November 1989- 7 November 1994)
- Drs. Samsudiat, MM (27 Oktober 1994-5 Juli 2004)
- H.M Basyir Ahmad (5 Juli 2005- 9 Agustus 2015)
- H. Achmad Alf Arslan Djunaid,S.E (17 Februari 2016- September 2017)

- H.M Saelany Mahfudz, SE (2017- Sekarang)

Sumber : Pemerintah Kota Pekalongan

Kondisi politik di Kota Pekalongan terus mengalami perubahan seiring zaman. Sebelum memasuki era Reformasi, Kota Pekalongan dapat dikatakan sebagai kota yang sering berkonflik. Masyarakat Kota Pekalongan bukan hanya terkenal fanatik dalam segi agama saja akan tetapi juga terkenal fanatik dalam segi pandangan politiknya. Alasan utama terjadinya konflik di Kota Pekalongan sebelum memasuki era Reformasi adalah karena sentimen kepartaian (Rahmah, 2019). Munculnya sentimen kepartaian yang terjadi di Kota Pekalongan sudah berlangsung sejak lama, bahkan jika dirunut puncak dari konflik sentimen kepartaian yang terjadi di Kota Pekalongan terjadi antara tahun 1997-1999. Pada masa itu , masyarakat Kota Pekalongan menunjukkan sikap sentimen nya dengan menganggap partai yang didukungnya adalah partai yang paling benar sedangkan partai lain dianggap tidak pas untuk Kondisi Kota Pekalongan. Seperti yang dikemukakan Savirani dalam (Rahmah, 2019) bahwa Sentimen kepartaian ini juga diperkuat dengan kondisi masyarakat Kota Pekalongan yang memiliki tradisi politik religius yang kuat terutama akibat adanya pengaruh masyarakat islam kultural yang kuat terutama dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Kekuatan golongan islamis terutama dengan adanya organisasi Nahdlatul Ulama (NU) akhirnya menciptakan kecenderungan dukungan masyarakat Kota Pekalongan pada partai politik bercorak Islam yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tokoh agama terutama dari kalangan Habaib dan Ulama di Kota Pekalongan sangat kuat pengaruhnya terhadap dinamika politik yang ada. Apabila dihubungkan satu sama lain dinamika perpolitikan di Kota Pekalongan tidak bisa terlepas dari pengaruh kefanatisan agama. Apabila dihubungkan dengan garis politik yang ada, maka dapat diketahui bahwa dinamika politik menunjukkan ketaatan keagamaan yang dibungkus dalam sifat fanatisme masyarakat Kota Pekalongan kepada tokoh alim ulama akan berdampak pula dalam ketaatan politiknya. Seperti hal nya ketaatan

seorang santri kepada kyainya maka seperti itulah gambaran bagaimana masyarakat Kota Pekalongan sangat taat dengan arahan (Dhawuh) dari sang Kyai. Nahdlatul Ulama sendiri pada masa Orde Baru memiliki afiliasi politik kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan sebuah partai hasil peleburan dari empat partai dengan basis keagamaan. Dengan adanya hal ini maka arah politik kaum Nahdliyin banyak terkonsentrasi kepada Partai Persatuan Pembangunan ini. Sementara itu di Kota Pekalongan sendiri yang sebagian besar masyarakatnya condong kepada Nahdlatul Ulama, mayoritas masuk dan memberikan dukuganya kepada Partai Persatuan Pembangunan sehingga semasa itu PPP menjadi partai Mayoritas di Kota Pekalongan. Kondisi perolehan suara mayoritas yang di dapatkan oleh PPP di Kota Pekalongan ini berbanding terbalik dengan daerah lain dimana suara dukungan PPP tidak menjadi mayoritas dalam konteks nasional (Rahmah, 2019).

Dengan suara mayoritas yang didapatkan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh kemenangan di Kota Pekalongan. Seperti yang dituliskan Anisa Nur Nia Rahmah (2019), Selama kurang lebih 20 tahun PPP berhasil mendominasi peta perpolitikan Kota Pekalongan yang sekaligus hal ini menjadi suatu hal yang menarik pada masa Orde Baru saat itu. Partai Persatuan Pembangunan dengan dominasi politiknya di Kota Pekalongan mampu mengalahkan Golkar yang notabene merupakan representatif dari kekuatan utama rezim Orde Baru. Hal ini menunjukkan bahwa kalangan masyarakat Kota Pekalongan dengan semangat kefanatikanya masih menunjukkan kekuatannya sehingga representasi politik Orde Baru melalui Golkar nya tidak dapat berbuap banyak di Kota Pekalongan. Memasuki awal-awal era Reformasi, dinamika politik kembali berubah di Kota Pekalongan. Munculnya partai-partai baru mewarnai dinamika politik di Kota Pekalongan. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang didirikan oleh Abdurachman Wahid menjadi salah satu partai yang cukup menarik perhatian terutama di Kota Pekalongan. Abdurachman Wahid yang notabene merupakan cucu dari pendiri NU, KH Hasyim Asyari memiliki pengaruh yang cukup besar dan mampu membuat perolehan suara PKB cukup

signifikan di berbagai daerah tidak terkecuali di Pekalongan. Namun dalam dinamika yang terjadi, PKB mendapatkan tentangan dari PPP yang sebelumnya merupakan manifestasi dari partai politik Islam yang memiliki dominasi kuat di Kota Pekalongan. PPP menganggap bahwa kemunculan PKB dalam dinamika politik di Kota Pekalongan menjadi sebab utama terpecahnya suara umat Islam terutama dari kalangan NU. Hal ini menyebabkan menurunnya suara PPP dalam pemilu di Kota Pekalongan pada masa-masa awal Reformasi. Namun seiring berjalannya waktu gesekan dan sentimen kepartaian di kalangan masyarakat Kota Pekalongan berangsur-angsur memudar.

Pada tahun 2004 reformasi di dalam pemilihan umum dimulai dengan ditandainya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pertama kalinya secara langsung oleh rakyat. Memasuki tahun 2005, di dalam konteks pelaksanaan pemilukada di daerah juga melakukan hal yang sama. Pada tahun 2005 inilah untuk pertama kalinya masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara langsung. Kita tentu mengingat bahwa semenjak runtuhnya Orde Baru dan bergulirnya era Reformasi, keberadaan aktor-aktor politik ataupun segala sesuatu yang berkaitan erat dengan Orde Baru mengalami penurunan elektabilitas. Penurunan tingkat elektabilitas ini juga berdampak pada pengaruh seorang aktor politik yang sebelumnya erat dengan rezim Orde Baru untuk maju mencalonkan diri sebagai kepala pemerintahan baik dalam skala lokal ataupun nasional.

Dari penjelasan ini kita dapat mengetahui bahwa ketidakpercayaan masyarakat terhadap tokoh-tokoh yang identik dengan kekuasaan Orde Baru masih terbilang sangat tinggi sehingga sangat berdampak pada tingkat elektabilitas calon tersebut. Akan tetapi dinamika politik yang berbeda terjadi di Kota Pekalongan. Pada pemilihan Walikota Pekalongan tahun 2005, Basyir Ahmad berhasil terpilih menjadi Walikota Pekalongan berpasangan dengan Abu Mufachir sebagai wakilnya. Meskipun pada periode pertamanya ini pasangan Basyir Ahmad dan H. Abu Almafachir hanya didukung oleh Partai Golkar dengan jumlah 5 kursi di DPRD. Dari fakta tersebut menggambarkan hal ini merupakan dinamika politik

yang menarik bagi sebagian akademisi. Rahmah (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa data temuan dari proyek *Power Welfare and Democracy* (PWD) menyatakan bahwa terdapat di dalam proses demokrasi Indonesia terdapat penguatan politik berbasis figure yang mengarah kepada figur yang akan menduduki posisi publik seperti kepala daerah. Dalam konteks Kota Pekalongan, menurut temuan PWD, Basyir Ahmad sebagai aktor dominan yang berhubungan dekat dengan pemerintahan Orde Baru dapat menggunakan populismenya sebesar 70% dan berhasil menduduki jabatan publik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa memasuki era Reformasi, segala sesuatu yang berkaitan dengan rezim Orde Baru mengalami penurunan elektabilitas. Namun hal berbeda yang ditunjukkan di Kota Pekalongan menurut penelitian PWD justru Basyir Ahmad yang berkaitan dengan Orde Baru melalui jaringan politik Golkar mampu terpilih menjadi Walikota Pekalongan periode 2005-2010.

Dengan terpilihnya Basyir Ahmad sebagai Walikota Pekalongan, perolehan suara yang didapatkan Partai Golkar mengalami peningkatan yang cukup signifikan, setelah sebelumnya Kota Pekalongan di dominasi oleh PPP dalam dinamika politiknya. Hal ini berlanjut pada pemerintahan periode kedua Basyir Ahmad (2010-2015) dimana pada periode kedua ini Basyir Ahmad menggandeng Achmad Alf Arslan Djunaid (Alex) yang merupakan seorang pengusaha sebagai wakil walikota. Pasangan Basyir Ahmad dan Alf Arslan Djunaid pada saat itu hanya didukung oleh dua partai saja yakni Golkar dan juga Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan dukungan 10 kursi dari 25 kursi yang ada di DPRD Kota Pekalongan. Dalam susunanya, DPRD Kota Pekalongan periode 2014-2019 diisi oleh 8 Partai Politik hasil dari pemilihan umum legislatif di tahun 2014. Delapan partai politik yang mengisi susunan tersebut menduduki sejumlah 30 Kursi di DPRD Kota Pekalongan.

Adapun susunan partai politik di DPRD Kota Pekalongan pada pemilu legislatif 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7 : Jumlah Kursi DPRD Kota Pekalongan periode pemilihan legislatif 2014-2019

PARTAI	KURSI
Partai Golkar	9
PDIP	4
PPP	4
PKB	3
PKS	3
PAN	3
Partai Gerindra	3
Partai Demokrat	1
JUMLAH	30 Kursi

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan

Pada tanggal 6 Juli 2015, Basyir Ahmad mengundurkan diri dari jabatannya meskipun seharusnya jabatan sebagai Walikota Pekalongan tersebut berakhir pada tanggal 9 Agustus 2015. Pada saat itu berhembus kabar bahwa pengunduran diri dari Basyir Ahmad karena adanya indikasi bahwa dia akan mencalonkan istrinya Balqis Diab sebagai Calon Walikota Pekalongan pada Pilkada tahun 2015. Balqis Diab sendiri diketahui merupakan Ketua DPRD Kota Pekalongan pada masa periode 2014-2020. Adanya kabar bahwa Basyir Ahmad mengundurkan diri dari jabatannya lebih awal karena hendak menjadikan istrinya calon Walikota Pekalongan selanjutnya di respon oleh KPU-RI. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat menerbitkan surat edaran bernomor 302/KPU/VI/2015 sebagai respon atas pengunduran diri Basyir Ahmad dari jabatannya sebagai Walikota Pekalongan. Terbitnya surat edaran KPU RI ini dipertegas dengan PKPU No.9 Tahun 2015 Pasal 4 yang mengatur bahwa calon kepala daerah tidak diperbolehkan memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Akan tetapi setelah terbitnya surat edaran KPU-RI tersebut ditemukan fakta bahwa Basyir tidak jadi mencalonkan istrinya dalam kontestasi Pilkada Kota Pekalongan di tahun 2015. Sebagai gantinya, Basyir mendukung calon Walikota dari kader partai Golkar, Dwi Heri Wibawa yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2015 (Rahmah,2019).

Pada dinamika Pilkada Kota Pekalongan tahun 2015, selain perisapan yang dilakukan oleh partai Golkar partai-partai lain pun melakukan persiapannya. Salah satu diantaranya adalah koalisi antara PDIP dan PKB. Koalisi ini disesuaikan dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 yang membahas tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diajukan oleh partai politik ataupun gabungan partai politik dengan perolehan minimal 20% kursi di DPRD atau 25% Perolehan suara sah pada pelaksanaan Pemilu DPRD. Dengan dasar yang telah disebutkan koalisi terbentuk antara PDIP dengan PKB untuk mengusung pasangan Alf Arslan Djunaid dan Saelany Mahfudz di Pilkada Kota Pekalongan 2015.

Koalisi yang dilakukan antara PDIP dengan PKB di Pilkada Kota Pekalongan 2015 sangatlah membawa dampak signifikan dari perolehan suara yang di dapatkan pasangan Alf Arslan Djunaid dan Saelany Mahfudz mengingat antara PDIP dan juga PKB merupakan partai yang cukup besar dan Berpengaruh di Kota Pekalongan. Kedua partai baik PDIP maupun PKB mempunyai basis masa yang cukup besar di Kota Pekalongan, PDIP dengan basis masa nasionalis sedangkan PKB memiliki basis masa Islamis terutama sebagian besarnya adalah masyarakat kultur NU yang cukup dominan. Pelaksanaan Pilkada Kota Pekalongan 2015 ini menghasilkan pasangan Achmad Alf Arslan Djunaid dan Saelany Machfudz yang diusung oleh PDI-P dan PKB dengan perolehan 46,69% suara sebagai Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan periode 2015-2020.

Pemerintahan Achmad Alf Arslan Djunaid dan Saelany Mahfudz tidak bertahan lama. Hal ini disebabkan karena pada bulan September tahun 2017 , Achmad Alf Arslan Djunaid meninggal dunia sehingga jabatan Walikota Pekalongan di Plt kan kepada Wakil Walikota, Selany Mahfudz. Pada bulan November 2017, Saelany Machfudz menjadi Walikota Pekalongan setelah dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Setelah sekian lama posisi jabatan Wakil Walikota Pekalongan Kosong pada akhirnya DPRD Kota

Pekalongan melakukan pemilihan Wakil Walikota untuk mendampingi Saelany Mahfudz. Merujuk pada berita News.detik.com tertanggal 29 Maret 2019, dua nama calon yaitu Achmad Afzan Arslan Djunaid yang merupakan seorang pengusaha sekaligus adik kandung dari Walikota Pekalongan sebelumnya yakni Achmad Alf Arslan Djunaid dan Hj Fatimah yang merupakan kader dari PDIP diajukan sebagai calon Wakil Walikota Pekalongan untuk mengisi kursi sisa masa jabatan periode 2016-2021.

Hasil pemilihan ini menghasilkan keputusan Achmad Afzan Arslan Djunaid terpilih menjadi Wakil Walikota Pekalongan untuk mengisi sisa masa jabatan yang ada mendampingi H.M Saelany Machfudz. Achmad Afzan Arslan Djunaid memperoleh 29 suara dari total keseluruhan jumlah anggota DPRD Kota Pekalongan yang berjumlah 30 orang. Pasangan Saelany Machfudz dan Afzan Arslan Djunaid sebagai Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan memiliki waktu kurang lebih satu setengah tahun untuk menyelesaikan masa jabatannya. Memasuki tahun politik 2019, Golkar Kembali memperoleh kemenangan di pemilihan legislatif Kota Pekalongan usai serangkaian pemilihan umum serentak yang diadakan di seluruh Indonesia. Pemilihan serentak untuk memilih anggota DPRD Kota Pekalongan menghasilkan 35 nama yang akan menduduki jabatan sebagai anggota dewan. Merujuk pada *Pekalongankota.go.id* ditetapkan melalui rapat pleno terbuka KPU Kota Pekalongan. Adapun rincian hasil pemilihan legislatif Kota Pekalongan untuk periode masa jabatan 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 : Jumlah Kursi DPRD Kota Pekalongan periode pemilihan legislatif 2019-2024

PARTAI	KURSI
Partai Golkar	9
PKB	7
PDIP	5
PPP	4
PKS	3
PAN	3
Partai Gerindra	2
HANURA	1
NASDEM	1
JUMLAH	35

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan

Setelah dilakukan pelantikan terhadap 35 nama anggota DPRD Kota Pekalongan, selanjutnya DPRD Kota Pekalongan menetapkan komposisi pimpinan definitif DPRD untuk masa periode 2019-2024 melalui rapat paripurna. Golkar sebagai partai pemenang pemilu legislatif 2019 dengan perolehan jumlah kursi sebanyak 9 kursi memilih Balqis Diab untuk kembali menduduki jabatan sebagai ketua DPRD Kota Pekalongan untuk periode 2019-2024. Selain menunjuk ketua DPRD Kota Pekalongan, dalam rapat paripurna ini juga terpilih Nusron yang ditunjuk dari PKB sebagai Wakil Ketua I dan Edy Supriyanto dari PDIP sebagai Wakil Ketua II DPRD Kota Pekalongan periode 2019-2024.

3. Diskursus dan Dinamika Pilkada Kota Pekalongan 2020

Pada tahun 2020, Kota Pekalongan merupakan salah satu daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala daerah. Pilkada serentak tahun 2020 ini juga dilaksanakan serentak di 270 daerah di Indonesia yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Jawa Tengah sendiri akan diikuti oleh para pasangan calon peserta dari 21 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pada awalnya rangkaian Pilkada Serentak di Kota Pekalongan ini sempat ditunda selama kurang lebih tiga bulan akibat adanya dampak pandemi Covid-19. Sebelumnya rangkaian pelaksanaan Pilkada Kota Pekalongan ini sudah dimulai sejak bulan Maret 2020. Sedangkan Pada bulan Maret 2020 KPU Kota Pekalongan sendiri telah membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan juga pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Hal tersebut pada akhirnya harus ditunda untuk karena terdapatnya pandemi Covid-19 rangkaian pelaksanaan Pilkada ditunda untuk sementara waktu. Pada saat memasuki bulan Juni, rangkaian pelaksanaan Pilkada dimulai kembali. Rangkaian Pilkada ini kembali dilanjutkan setelah adanya ketetapan yang diatur dalam peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 mengenai tahapan , program dan jadwal pelaksanaan Pilkada 2020. Adanya peraturan tersebut sebagai perubahan atas aturan sebelumnya yang terdapat dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang Pilkada 2020. KPU kota

Pekalongan memulai kegiatan dengan melakukan pendataan daftar pemilih tetap. Pemetaan penduduk ini dibebankan KPU Kota Pekalongan kepada PPK dan PPS untuk mendata penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang meliputi Data Pemilih Tetap (DPT) ,data pemilih baru, data pemilih tambahan (DPTb). PPS melakukan pendataan tersebut dengan memberdayakan satu orang masyarakat dalam lingkup satu wilayah satu RT tiap TPS dan selanjutnya petugas tersebut melakukan pencocokan data pemilih dengan mendatangi langsung pemilih dari rumah-kerumah.

Pada tahap selanjutnya, KPU kota Pekalongan kembali melaksanakan rangkaian kegiatan Pilkada 2020 dengan melakukan pendaftaran pasangan calon yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus sampai dengan 3 September 2020. Pada Pilkada 2020 ini Golkar mengusung ketua DPRD Kota Pekalongan, Balqis Diab sebagai calon kandidat Walikota Pekalongan. Hal ini dilanjutkan dengan keluarnya rekomendasi dari PKB yang merekomendasikan Moch.Machrus untuk mendampingi Balqis. Rekomendasi ini dikeluarkan oleh PKB pada tanggal 7 Agustus 2020 sehingga dalam proses Pilkada Kota Pekalongan 2020 ini Golkar secara Resmi berkoalisi dengan PKB sebagai partai pengusung Balqis Diab dan Moch Machrus sebagai calon Kandidat Walikota dan Calon Wakil Walikota Pekalongan 2020. Balqis Diab yang notabene merupakan Ketua DPRD Kota Pekalongan ini merupakan salah satu tokoh kuat dan memiliki track record sebagai tokoh politik yang populis di kalangan masyarakat Kota Pekalongan. tidak hanya track recordnya sebagai seorang politisi,namun lebih jauh dari itu masyarakat Kota Pekalongan sudah sejak lama mengenal Balqis sebagai istri dari mantan Walikota Pekalongan Basyir Ahmad. Dengan memegang aturan yang tertulis dalam aturan UU No.8 Tahun 2015 yang salah satu poin persyaratanya mengatur minimal kursi koalisi partai di DPRD, Balqis Diab mantap maju sebagai Calon Walikota pada kontestasi Pilkada tahun 2020.

Pembacaan deklarasi pencalonan, seperti yang dikutip dari Radar Pekalongan 7 Agustus 2020, pasangan Balqis dan Machrus didukung oleh enam partai politik yang ada di DPRD Kota Pekalongan yakni

Golkar,PKB,PKS,PAN,GERINDRA dan Nasdem. Melihat komposisi partai koalisi yang mendukung pasangan Balqis-Machrus merupakan koalisi yang sangat kuat karena dari keseluruhan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kota Pekalongan, 6 partai mendukung dan hanya menyisakan PDIP dan Hanura yang tidak masuk kedalam koalisi. Dalam skema aturan yang ada, jumlah kursi yang diperoleh PDIP dan Hanura hanya sebanyak 6 kursi di DPRD Kota Pekalongan. Maka dapat dipastikan apabila PDIP dan HANURA melakukan koalisi tidak akan bisa mengajukan calon kandidat Walikota karena jumlah kursi yang didapatkan kurang. Hal ini disebabkan karena untuk mengajukan pasangan calon, partai koalisi dipersyaratkan minimal memiliki 7 Kursi di DPRD (20% dari jumlah Kursi di DPRD) (*SuaraMerdeka.com*, 8 Agustus 2020).

Pada mulanya pencalonan Balqis Diab dan M.Machrus bakal menjadi Pasangan Calon Tunggal di Pilkada Kota Pekalongan 2020. Siring dengan berjalanya waktu kembali terjadi dinamika politik dalam rangkaian Pilkada Kota Pekalongan. Dinamika terjadi di antara Partai-partai pendukung Koalisi Balqis-Machrus. Dewan Pimpinan Pusat PAN dan PPP tidak memberikan rekomendasinya kepada pasangan Balgis dan Machrus dan dengan demikian PAN dan PPP di Kota Pekalongan keluar dari koalisi pengusung pasangan Balgis dan Machrus. Keluarnya PAN dan PPP dari partai koalisi kemudian bergabung dengan PDI-P dan HANURA mengusung pasangan Afzan Arslan Djunaid dan Salahudin sebagai kubu penantang Balqis-Machrus. Afzan Arslan Djunaid dan Salahudin sendiri mencalonkan diri sebagai pasangan calon Kandidat Walikota dan calon Wakil Walikota Pekalongan setelah mendapatkan rekomendasi dari dewan pengurus pusat PDIP pada tanggal 2 September 2020. Hal ini menjadi lebih menarik karena pada akhirnya pasangan Balqis-Machrus bukan menjadi pasangan tunggal yang akan berkontestasi dalam Pilkada Kota Pekalongan 2020.

Pada proses selanjutnya KPU Pekalongan mengadakan penetapan dan pengundian nomor urut calon kandidat . pada proses penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon ini, Pasangan Afzan Arslan Djunaid dan Slaahudin mendptkan nomor urut 1 dan pasangan Balgis Diab dan Moch.Machrus

mendapatkan nomor urut 2. Setelah ditetapkan kedua pasangan calon ini melakukan proses kampanye yang dimulai dari tanggal 26 September hingga tanggal 5 Desember 2020. Pada proses kampanye Pilkada Kali ini, KPU Kota Pekalongan menekankan kepada kedua pasangan calon untuk melakukan kegiatan kampanye dengan memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penularan dampak Covid-19. Dampaknya, kedua pasangan calon ini kemudian menggunakan strategi kampanye untuk hadir ke tiap-tiap wilayah tempat tinggal masyarakat dan tidak melakukan kegiatan kampanye terbuka seperti pada pelaksanaan Pemilu-pemilu sebelumnya.

Proses Kampanye sebagai dinamika politik pasangan calon tidak bisa terlepas dari keberadaan masyarakat multietnis yang ada di Kota Pekalongan. Struktur masyarakat Kota Pekalongan yang multietnis tentu menjadi suatu perhatian khusus guna melihat lebih jauh terhadap pengaruh yang ditimbulkan dan dampaknya terutama dalam dinamika politik yang ada di Kota Pekalongan. Dalam berbagai banyak fenomena, Kota Pekalongan merupakan kota yang mayoritas penduduknya merupakan mayoritas beragama Islam. Terbukti dengan banyaknya pusat-pusat pengajian Islam didukung dengan sekolah-sekolah dan pondok-pondok pesantren yang ada di Kota Pekalongan semakin memperkuat identitas Kota Pekalongan sebagai Kota yang memiliki tingkat religius yang tinggi. Peran para habaib dan ulama seperti Habib Lutfi dan Habib Bagir tidak bisa dikesampingkan dalam perjalanan dinamika politik di Kota Pekalongan. Setiap orang yang hendak maju menjadi calon Walikota dan calon Wakil Walikota Pekalongan pasti akan menyempatkan dirinya untuk berkunjung (Sowan) ke kediaman Habaib dan ulama. Kondisi masyarakat Kota Pekalongan yang sangat fanatik dalam konteks religius tidak bisa dilepaskan dari sosok habaib dan ulama yang mereka junjung. Kuatnya pengaruh dari para habaib dan ulama juga berpengaruh kepada suara mayoritas masyarakat Kota Pekalongan. Oleh karena itu untuk memperoleh kemenangan dalam kontestasi pilkada di Kota Pekalongan seorang calon haruslah memperoleh doa restu dan dukungan dari para habaib dan ulama ini. Fenomena ini tentunya selalu menciptakan pola politik

tersendiri dalam dinamika perpolitikan di Kota Pekalongan. Pengaruh para habaib yang berasal dari etnis Arab dan juga para ulama yang notabene dari kalangan masyarakat Islam sama-sama memiliki basis masa yang besar sehingga bisa dipetakan seorang calon yang mendapatkan dukungan dari habaib dan ulama ini akan mendapatkan kesempatan kemenangan yang cukup besar pula.

Faktor lain yang berpengaruh pada dinamika politik Kota Pekalongan adalah keberadaan masyarakat etnis China. Masyarakat etnis china yang sebagian besar bergerak pada sektor-sektor ekonomi memiliki modal yang besar dalam kehidupan ekonomi Kota Pekalongan. Para pengusaha Kota Pekalongan yang notabene berasal dari masyarakat etnis China memiliki tak bisa dilepaskan dari dinamika politik yang ada. Politik elektoral dizaman sekarang ini tidak bisa begitu saja dilepaskan dari ikatan modal. Ikatan modal yang dimaksud adalah berupa bantuan modal atau bantuan ekonomi yang dibutuhkan seorang calon Kandidat untuk dapat memenangkan kontestasi pilkada. kekuatan modal inilah yang digunakan para pengusaha-pengusaha etnis china di Kota Pekalongan untuk memberikan pengaruhnya dalam dinamika politik yang ada. Selain memiliki modal ekonomi, etnis tionghoa di Kota Pekalongan memiliki kesolidan sendiri dalam penentuan suara elektoral yang mereka miliki. Kesolidan ini dapat dilihat dari kekompakan suara elektoral yang diberikan masyarakat etnis China kepada satu calon yang didukung sebagai timbal balik ketika para pengusaha etnis china telah membantu mendanai kampanye politik dari seorang calon kandidat tersebut.

Dari penjelasan tersebut dapat terlihat bahwa peran masyarakat multietnis yang berada di Kota Pekalongan memiliki pengaruhnya masing-masing dalam proses dinamika politik yang ada. Hal ini memunculkan dinamika perpolitikan yang menarik dimana dalam hal ini seorang calon Walikota yang akan memimpin di Kota Pekalongan yang cukup heterogen tersebut tidak bisa terlepas dari politik kepentingan masyarakat etnis-etnis tertentu. Hal-hal tersebut akan menciptakan sebuah kekuatan baru dan kepentingan tertentu dengan memunculkan dinamika Pilkada yang menarik dimana pada kelas atas akan menempatkan etnis tertentu

sebagai dominasi yang terkuat dari beberapa etnis masyarakat di Kota Pekalongan.

Pada proses selanjutnya, KPU Kota Pekalongan melaksanakan debat kandidat Calon Walikota pekalongan 2020. Debat kandidat ini dilaksanakan sebanyak dua kali. Debat pertama dilakukan pada tanggal 11 November 2020 yang bertempat di Hotel Dafam Kota Pekalongan dan Debat kandidat kedua dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2020. Dalam proses pelaksanaan debat kandidat ini, KPU kota pekalongan membatasi jumlah penonton karena adanya penerapan protokol kesehatan untuk menanggulangi dampak Covid-19. Namun KPU pekalongan menyediakan fasilitas live streaming bagi masyarakat yang ingin menonton jalannya debat kandidat calon Walikota dan Calon Walikota ini melalui kanal Youtube dan juga tayangan televisi lokal. Pada proses pelaksanaan debat kandidat yang berlangsung selama 120 menit ini masing-masing kandidat diberikan kesempatan untuk menyampaikan Visi dan Misinya serta penjabaran program-program yang ditawarkan apabila kandidat berhasil memenangkan kontestasi Pilkada Kota Pekalongan.

Mempasuki masa tenang pada tanggal 6-8 Desember 2020, KPU Kota Pekalongan dibantu dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan dan Bawaslu Kota Pekalongan melakukan pembersihan alat peraga kampanye yang digunakan masing-masing paslon. Selain dilakukan oleh tim penyelenggara pemilu, pembersihan atribut peraga kampanye ini juga dilakukan oleh tim sukses dari masing-masing calon kandidat. Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Sesuai dengan peraturan KPU yang terbaru, proses pelaksanaan Pilkada 2020 ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Pelaksanaan pemungutan suara sendiri dilaksanakan di tiap-tiap TPS di seluruh wilayah Kota Pekalongan dimulai dari pukul 7 Pagi hingga Pukul 13.00 siang hari. Selanjutnya dilakukan penghitungan suara di tiap-tiap TPS. Dari hasil hitung cepat ini, pasangan Afzan-Salahudin unggul dengan presentase suara sementara 54,141%. Perolehan suara ini mengungguli pasangan Balgis Machrus

dengan presentase suara sementara 45,932 (Jateng.tribunnews.com, 9 Desember 2020).

Rekapitulasi suara manual secara keseluruhan dilaksanakan berjenjang oleh KPU Kota Pekalongan dari tingkat kecamatan hingga tingkat kota dari tanggal 10-13 Desember 2020. Penetapan suara secara keseluruhan hasil Pilkada Kota Pekalongan diumumkan oleh KPU kota Pekalongan pada tanggal 15 Desember 2020 dan menghasilkan keputusan dengan kemenangan pasangan Afzan Arslan Djunaid dan Salahudin dengan perolehan suara sebesar 95.095 suara dengan presentase 55,2% sedangkan pasangan Balgis Diab dan Moch. Machrus memperoleh suara sebesar 77.159 atau dengan presentase 44,8%. Dengan perolehan suara ini maka KPU Menetapkan Pasangan Afzan Arslan Djunaid dan Salahudin sebagai pemenang dalam kontestasi Pilkada Kota Pekalongan 2020.

BAB IV

BALGIS DIABS SEBAGAI FIGUR KAJIAN

A. Profil Balgis Diab

1. Profil Genealogis Balgis Diab

Pembahasan mengenai perempuan dan politik bukanlah hal yang baru yang ada di Indonesia. Meningkatnya partisipasi perempuan di dalam posisi-posisi strategis terutama dalam posisi sebagai eksekutif menjadi gerakan baru untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Hal ini juga dimaksudkan agar kepentingan-kepentingan perempuan yang selama ini cenderung kurang diperhatikan menjadi lebih terakomodir. Kehadiran calon kepala daerah perempuan dianggap mampu membawa perubahan terutama pembaharuan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perempuan yang selama ini masih kurang diperhatikan. Pada prinsipnya demokrasi haruslah menghadirkan keseimbangan politik individu yang sama antara laki-laki dan perempuan. Dari sinilah muncul konsep *Politics of Presence* yang digagas oleh Anne Philips (1995), dimana kehadiran perempuan dalam politik memiliki dasar sebagai prinsip kesetaraan politik dimana tidak ada salah satu yang melebihi yang lain. Dalam arti lain, hal ini dimaknai bahwa kesempatan antara laki-laki dan perempuan di dalam partisipasi politik memiliki porsi yang sama.

Peningkatan peran dan partisipasi politik perempuan terutama pasca bergulirnya Reformasi merupakan satu langkah positif dalam dinamika politik Indonesia. Partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia pun menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas yang sama dengan laki-laki terutama dalam hal pemerintahan di tingkat lokal. Sudah banyak perempuan yang mampu menunjukkan kepada publik bahwa mereka layak untuk menempati posisi sebagai Kepala daerah. Memasuki tahun 2020, pemilihan kepala daerah kembali dilaksanakan salah satunya adalah di Kota Pekalongan. Pilkada tahun 2020 memunculkan dinamika Politik yang baru di Kota Pekalongan. hal ini

dikarenakan pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ini, terdapat calon kandidat kepala daerah perempuan di Kota Pekalongan yakni Balgis Diab. Balgis Diab merupakan tokoh perempuan keturunan etnis Arab di Kota Pekalongan. Balgis Diab lahir di Bandung pada tanggal 22 Juli tahun 1970. Masyarakat kota pekalongan mengenal sosok Balgis Diab karena Balgis merupakan istri dari seorang mantan Walikota Pekalongan sebelumnya yakni Basyir Achmad. Basyir sendiri juga merupakan dokter keturunan etnis Arab yang sudah sejak lama dikenal oleh kalangan masyarakat kota Pekalongan sebelum menjadi Walikota Pekalongan selama dua periode.

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa Kota Pekalongan merupakan sebuah kota yang multi etnis dengan tiga etnis besarnya yakni etnis Jawa, China, dan Arab. Ketiga etnis ini telah hidup berdampingan sejak lama sebagai struktur masyarakat Kota Pekalongan. Setelah menikah, Balgis dan Basyir bertempat tinggal di jalan Agus Salim Pekalongan. kompleks wilayah jalan Agus Salim ini terkenal dengan sebutan kampung Arab di Kota Pekalongan dikarenakan mayoritas penduduk di wilayah ini adalah etnis keturunan Arab. Dari pernikahan ini Balgis dan Basyir dikaruniai empat orang anak yang terdiri dari dua orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan. Balgis Diab bukanlah nama baru di Kota Pekalongan, kiprahnya sebagai pengusaha dan politikus sudah banyak dikenal di kalangan masyarakat Kota Pekalongan. Sosoknya yang populis dan dikenal dekat dengan masyarakat menjadikan elektabilitas Balgis Diab sangat tinggi terutama ketika namanya muncul dalam bursa calon kandidat Walikota Pekalongan pada Pilkada 2020.

2. Profil Pendidikan dan Pengusaha

Balgis Diab menempuh pendidikan dasarnya di SD Cimuncang IV Bandung pada tahun 1976 dan lulus pada tahun 1982. Setelah lulus ia melanjutkan sekolah menengah pertama pada tahun 1982 di SMP Negeri 16 Bandung dan lulus pada tahun 1985 dan melanjutkan ke sekolah menengah atas negeri 5 Bandung lulus pada tahun 1988. Setelah menyelesaikan sekolah menengah atas Balgis dipersunting oleh Basyir Ahmad Syawie yang merupakan seorang dokter. Dari

pernikahan ini Basyir Ahmad dan Balgis Diab dikaruniai 4 orang anak yakni Azmi Basyir, Amar Basyir, Izzati dan Iftinan.

Menikah bukan menjadi alasan Balgis Diab tidak berkembang. Balgis melanjutkan pendidikan strata satu di Universitas Pekalongan. Tidak hanya di Universitas Pekalongan, untuk memperdalam ilmu tentang agama, Balgis juga mengambil S-1 jurusan Pendidikan Agama Islam fakultas Tarbiyah di IAIN Walisongo (Sekarang UIN Walisongo) Semarang. Setelah menyelesaikan pendidikan S-1 nya di dua tempat, Balgis melanjutkan pendidikan S-2 nya dengan mengambil jurusan Manajemen di Universitas Diponegoro Semarang. Hal ini di konfirmasi langsung oleh Basyir Ahmad ketika peneliti melakukan wawancara pada tanggal 18 November 2020.

“ Jadi bu Balgis memang nikah dengan saya lulus SMA. Kemudian dia saya suruh kuliah di UNIKAL (Universitas Pekalongan) dia ambil S-1 di UNIKAL tapi bersamaan itu saya ingin dia menguasai agama saya minta dia kuliah juga di IAIN. Kuliah dua sekaligus paralel bareng-bareng, bisa dibayangkan sebagai seorang istri dan mengurus anak dia juga harus kuliah di dua tempat Jadi di UNIKAL dan di IAIN semua lulus. Meskipun latar belakangnya bukan dari sekolah agama sejak SD hingga SMA negeri semunya namun dia mampu kuliah agama dan lulus dari IAIN. Kemudian saya minta dia ambil S-2 di UNDIP ambil jurusan manajemen, lulus dengan IPK 3,975 dan menjadi lulusan terbaik ”

Selain kemampuan akademik dan intelektualnya yang mumpuni, Balgis Diab juga memiliki kemampuan manajemen bisnis. Balgis memiliki usaha batik yang diberi nama seperti namanya yakni Gies Batik Pekalongan. Dengan kemampuan manajemennya, Balgis sebagai pimpinan usaha mampu membawa Gies Batik berkembang pesat dengan mengikuti berbagai macam pameran batik baik di tingkat daerah dan tingkat nasional hingga mampu membuka cabang dimana-mana.

“Di saat usia pernikahan kira-kira dua tahun, saya terkena sakit jantung saya bilang ke dia, sudah kamu saya buatkan usaha batik gies. Jadi ketika nanti ada apa-apa dia bisa menolong anak-anaknya dari usahanya itu. Jadi dia juga jadi ketua pengusaha batik gies. Dengan manajemen tersebut akhirnya dia bisa pameran dimana-mana dan bisa

buka cabang di mana-mana.” (Wawancara dengan Basyir Ahmad, 18 November 2020)

Berkembangnya usaha batik Gies menunjukkan kapasitas dari seorang Balgis Diab sebagai pengusaha. Hal ini terlihat dari berbagai macam penghargaan yang diperoleh Balgis Diab dari bidang usaha batiknya di berbagai macam event yang pernah dia ikuti baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional. penghargaan-penghargaan yang diperoleh Balgis Diab dalam sepak terjangnya sebagai seorang pengusaha batik dapat diamati pada tabel berikut :

Tabel 4.1 : Penghargaan yang diterima Balgis Diab dalam bidang Wirausaha Batik

No	Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Stand Terbaik Sriwijaya Expo Kota Palembang	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	1996
2	Stand Terbaik Expo Jateng	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	2005
3	Juara Favorit Bidang Ekonomi dan Wirausaha	Suara Merdeka	2006
4	Juara Favorit Batik Carnival Jawa Tengah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	2013

Sumber : Tim Pemenangan Balgis-Machrus 2020

3. Kiprah Sosial Balgis Diab

Kemampuan akademik yang baik ditambah dengan Kemampuan manajemen yang mumpuni dari seorang Balgis Diab semakin disempurnakan dengan kemampuan interaksi sosial yang intensif di lingkungan masyarakat terutama masyarakat Kota Pekalongan. Hal ini nampak ketika Balgis Diab mendampingi suaminya, Basyir Ahmad yang menjadi Walikota Pekalongan dalam dua periode (2005-2010 & 2010-2015). Sebagai seorang istri Walikota Pekalongan, tentunya banyak kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh Balgis Diab terutama di dalam program pembangunan kesejahteraan masyarakat khususnya perempuan. Sepak terjang dalam berbagai kegiatan sosial masyarakat tersebut menjadikanya memperoleh posisi-posisi sentral dalam organisasi-organisasi sosial masyarakat yang di ikutinya. Beberapa Organisasi sosial masyarakat yang pernah di ikuti oleh Balgis Diab dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.2 : Organisasi-Organisasi Sosial Masyarakat yang di Ikuti Balgis Diab

NO	ORGANISASI	JABATAN	TAHUN
1	IWAPI	Penasehat	2006-2011
2	PERCASI Kota Pekalongan	Ketua	2010-2015
3	IGTKI	Pembina	2010-2016
4	GOW	Penasehat	2010-2017
5	HIMPAUDI	Penasehat	2010-2018
6	HWK Kota Pekalongan	Penasehat	2010-Sekarang
7	Al-Hidayh	Penasehat	2010-Sekarang
8	Dhrama Wanita	Penasehat	2010-2015
9	PKBI Pekalongan	Ketua	2010-2015
10	TP PKK Kota Pekalongan	Ketua	2010-2015
11	Klub Jantung Sehat Kota Pekalongan	Ketua	2012-Sekarang

Sumber : Tim Pemenangan Balgis-Machrus 2020

Dengan berbagai macam organisasi sosial masyarakat yang diikuti menjadikan Balgis Diab sebagai salah satu tokoh yang cukup populer di kalangan masyarakat Kota Pekalongan. Masyarakat Kota Pekalongan juga mengenal Balgis Diab sebagai salah satu politisi yang handal dari partai Golkar. Bersama dengan partai Golkar inilah Balgis mampu meraup suara terbanyak dalam pemilu legislatif dan berhasil menduduki puncak pimpinan dengan menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Pekalongan selama dua periode.

B. Perjalanan Karir dan Politik Balgis Diab

1. Tahapan Karir Politik Balgis Diab

Indonesia dengan sistem demokrasi yang dianut menghasilkan konsekuensi bahwa keberadaan tuntutan mengenai keterbukaan ruang-ruang publik haruslah jelas dan dijamin oleh undang-undang. Hal ini juga terkait dengan dinamika perpolitikan yang mengharuskan adanya jaminan dalam sistem *rekrutmen* politik Indonesia bersifat netral gender. Keterwakilan perempuan dalam kaitanya di struktur politik baik itu dalam partai politik ataupun lembaga-lembaga pemerintahan harus dijamin dan dipenuhi (Marwah, 2016). Hal semacam ini memang menjadi fokus perhatian dunia sehingga keterjaminan peran dan partisipasi perempuan dalam politik menjadi fenomena global yang beregerak

progresif untuk menghadirkan politik yang netral gender (Qomariyah et al, 2016). Hal ini sekaligus menganulir dominasi politik yang hanya didominasi oleh kaum laki-laki saja baik dalam infrastruktur maupun suprastruktur politik yang ada (Ardiansa, 2016). Diterbitkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan mengkonfirmasi penghapusan bentuk-bentuk diskriminatif terhadap kaum perempuan. Hal ini sekaligus menjadi jaminan bagi perempuan untuk dapat berperan aktif dalam segala aspek kehidupan tak terkecuali di dalam konteks politik. Keadaan ini semakin diperkuat dengan terbitnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang juga memberikan kepada perempuan untuk dapat mengisi keterwakilannya sebesar 30% dalam partai politik. Dari sinilah terhitung sejak bergulirnya masa Reformasi, peran dan partisipasi perempuan juga mengalami peningkatan dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat.

Balgis Diab sebagai seorang tokoh yang cukup populer di Kota Pekalongan dikenal masyarakat bukan hanya dari sepak terjangnya dalam kegiatan-kegiatan sosial saja akan tetapi juga kiprahnya dalam dunia politik. Dibawah bimbingan sang suami yang juga merupakan seorang politisi dari Partai Golkar, Balgis bertansformasi dari sekedar istri sekaligus pengusaha batik menjadi seorang politisi yang mumpuni. Balgis memulai kiprahnya dalam dunia politik ketika ditunjuk oleh sang suami yang pada saat itu menjadi ketua DPC Golkar Kota Pekalongan menjadi ketua dari KPPG (Kesatuan Perempuan Partai Golkar) Kota Pekalongan. Dalam Musda Partai Golkar Kota Pekalongan tahun 2008, Balgis terpilih untuk menggantikan suaminya, Basyir Achmad menjadi ketua DPC Partai Golkar Kota Pekalongan. Setahun setelah menjabat tepatnya pada pemilihan umum legislatif 2009, Balgis ikut serta dalam kontestasi Pileg tersebut dan berhasil menjadi anggota DPRD Kota Pekalongan untuk periode 2009-2014. Dalam kontestasi pemilihan legislatif, Balgis tercatat pernah mencalonkan diri di tiga dapil kecamatan yakni di Pekalongan Timur, Pekalongan Utara dan

Pekalongan Selatan. Dari ketiga Dapil Kexamatan ini balgis memperoleh kemenangan yang mutlak dengan suara yang banyak.

“Bu Balgis mendampingi saya ketika saya memimpin partai golkar Kota Pekalongan. dimulai dari dia memimpin KPPG (Kesatuan Perempuan Partai Golkar) dan saya menjadi anggota DPRD Kota Pekalongan tahun 1999-2004 dan dilanjutkan menjadi anggota DPRD kembali tahun 2004-2009. Nah ditengah jalan saya mencalonkan Walikota di tengah jalan dan jadi Walikota tahun 2005. Namun sejak tahun 2008 saya tidak mencalonkan lagi sebagai ketua DPC Golkar. Sehingga ibu menggantikan posisi saya sebagai ketua DPC Golkar dalam Musda Partai Golkar Kota Pekalongan dan di tahun 2009 ibu melanjutkan karir sebagai anggota DPRD Kota Pekalongan” (Wawancara dengan Basyir Ahmad, 18 November 2020)

Hal serupa juga disampaikan oleh Heri Dwi anggota DPRD Kota Pekalongan dari fraksi Golkar. Heri menyatakan bahwa sebelum terjun kedalam dunia politik , Balgis dikenal sebagai istri dari Basyir Achmad yang menjabat sebagai Walikota Pekalongan selama dua periode. Kemudian Balgis terjun ke dalam dunia politik dalam struktural partai Golkar Kota Pekalongan sebagai anggota dan mengikuti pemilihan legislatif sehingga terpilih menjadi anggota DPRD Kota Pekalongan. Karir politik Balgis semakin meningkat ketika dia berhasil terpilih menjadi ketua DPRD Kota Pekalongan selama dua periode berturut-turut yakni pada periode 2014-2019 dan periode 2019-2020. Kemampuan Balgis Diab dalam memimpin partai Golkar di Kota Pekalongan cukup piawai sehingga Golkar Pekalongan mampu mendulang suara yang signifikan dalam dua pemilihan legislatif terakhir yakni pada 2014 dan 2019. Ini sekaligus menjadi suatu fenomena tersendiri dalam dinamika politik partai Golkar dimana untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah, hanya di Kota Pekalongan partai Golkar memperoleh kemenangan signifikan. Di dalam pandangan anggota internal partai Golkar sendiri Balgis dianggap paling mampu untuk memimpin partai Golkar karena dia memiliki kapasitas kepemimpinan dan manajemen yang baik dan mumpuni.

“ Karir beliau di dalam partai Golkar cukup mumpuni,dimulai dari anggota hingga menjadi ketua DPC partai Golkar. Kemudian beliau mengikuti pemilihan legislatif dan berhasil menjadi ketua DPRD Kota Pekalongan selama dua periode setelah sebelumnya hanya menjadi

anggota. Dari sisi politik beliau sudah cukup lama di partai Golkar sekitar sepuluh tahunan lebih terjun ke dunia politik. Menurut kami di internal partai beliau yang paling siap untuk maju. Kepemimpinan beliau, kedekatan beliau ke masyarakat membuat beliau yang paling siap memimpin. Dari segi kapasitas intelektual beliau memadai dan dalam segi kepemimpinan beliau sangat berpengalaman ” (Wawancara dengan dr. Heri Dwi , 6 November 2020)

Hal ini jugalah yang membuat pimpinan wilayah partai Golkar Jawa Tengah mendaulat Balgis untuk tetap memimpin DPC Golkar Kota Pekalongan. Merujuk pada *RadarPekalongan.co.id*, Balgis Diab kembali terpilih menjadi ketua DPC Partai Golkar Kota Pekalongan untuk lima tahun mendatang. Balgis Diab terpilih kembali sebagai ketua DPC Partai Golkar Kota Pekalongan berdasarkan dari hasil keputusan Musyawarah Daerah (MUSYDA) Partai Golkar Ke X yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2020. Dalam acara Musyda ini Balgis terpilih secara aklamasi untuk kembali memimpin partai Golkar di Kota Pekalongan. Di bawah kepemimpinan Balgis Diab inilah Partai Golkar Pekalongan mampu menjadi satu-satunya yang memenangi pemilu legislatif dari 35 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah (*Radarpekalongan.co.id* 14 Agustus 2020)

Fenomena perempuan mampu memimpin partai politik seperti yang ditunjukkan oleh Balgis Dian ini merupakan salah satu contoh yang dapat ditunjukkan kepada masyarakat bahwa seorang perempuan memiliki kapasitas yang sama serta tidak kalah dengan laki-laki dalam dunia politik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik telah secara jelas memaparkan haruslah ada pemberian peran seluas-luasnya terhadap perempuan dalam partai politik. Yang menjadi fokus dalam hal ini terutama berkaitan dengan penyempurnaan kelembagaan partai tidak hanya sebatas adanya keterwakilan perempuan sebanyak 30% saja akan tetapi juga dalam rangka pengembangan potensi SDM Perempuan yang ada. Dalam hal ini Balgis Diab mampu menunjukkan bahwa dia sebagai perempuan bukan hanya menjadi pelengkap keterwakilan perempuan sebanyak 30% saja akan tetapi mampu menunjukkan

kapasitas SDM perempuan yang mumpuni dalam suatu sistem kelembagaan partai politik yang ada.

2. Kekuatan Jaringan Politik Balgis Diab

Tahun 2020 merupakan tahun politik dimana tahun 2020 ini diadakan Pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah yang dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Pilkada serentak tahun 2020 ini akan dilaksanakan di 270 daerah dan diikuti oleh 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Kota Pekalongan merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak di tahun 2020 ini setelah sebelumnya pada tahun 2015 Kota Pekalongan juga termasuk dalam salah satu daerah yang juga melaksanakan Pilkada serentak. Pada kesempatan Pilkada tahun 2020 ini, nama Balgis Diab kembali muncul dalam bursa Calon Walikota Pekalongan. Pilkada tahun 2020 ini bukan kali pertama nama Balgis Muncul sebagai calon kandidat Walikota Pekalongan. Sebelumnya di tahun 2015 nama Balgis Diab muncul dan digadang-gadang akan maju dalam kontestasi Pilwalkot Pekalongan setelah sebelumnya terjadi dinamika politik di Kota Pekalongan dimana Walikota Pekalongan saat itu, Basyir Ahmad mengajukan pengunduran diri dari jabatan Walikota Pekalongan. Kita semua mengetahui bahwa Basyir Achmad merupakan suami dari Balgis Diab dan fenomena pengunduran diri Basyir dari jabatan Walikota Pekalongan terindikasi bahwa Basyir akan mengajukan istrinya, Balgis untuk maju sebagai calon Walikota selanjutnya. Akan tetapi dinamika yang terjadi justru pada kontestasi Pilkada 2015 nama Balgis Diab tidak muncul sebagai kandidat calon Walikota Pekalongan. Partai Golkar Kota Pekalongan justru mengusung nama dr. Heri Dwi Wibawa yang merupakan kader Golkar sebagai kandidat calon Walikota Pada pilkada 2015 yang lalu.

Pada pilkada serentak 2020 ini, Balgis Diab benar-benar membulatkan tekadnya untuk maju sebagai kandidat Calon Walikota Pekalongan berpasangan dengan Moch. Machrus. Merujuk pada *Radar Pekalongan*, Deklarasi Pencalonan Balgis Diab sebagai Calon Walikota Pekalongan diadakan di Gedung Aswaja Kota Pekalongan. Di dalam deklarasi pencalonan tersebut, Balgis Diab dipasangkan

dengan M. Machrus Abdullah yang akan mendampingiya sebagai calon Wakil Walikota Pekalongan dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020. Kemunculan kandidat perempuan di dalam kontestasi Pilkada bukanlah menjadi fenomena baru bagi demokrasi Indonesia khususnya ketika memasuki Era Reformasi. Menurut Mahardhika dalam (Dewi, dkk 2020), sebanyak 24 dari 57 calon perempuan terpilih menjadi Bupati/Walikota pada Pilkada tahun 2015. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat pada kontestasi Pilkada tahun 2017 sebanyak 337 pasangan yang mendaftar Pilkada dengan presentase 92,6% laki-laki dan 7,4% Perempuan dan menghasilkan sebanyak 12 orang dari 45 atau (26,67%) calon kandidat perempuan yang berkontestasi menang dan terpilih sebagai kepala daerah di 12 daerah.

Pelaksanaan Pilkada merupakan salah satu mekanisme yang mampu untuk mewujudkan keterwakilan perempuan dalam jabatan politik di tingkat daerah. Secara kuantitas komposisi penduduk Indonesia baik laki-laki dan perempuan memiliki komposisi yang berimbang. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam UU No.8 Tahun 2015 atas perubahan UU No.1 Tahun 2015 mengenai tata cara pemilihan kepala daerah. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 bersifat netral dalam segi kompetisi politik antara laki-laki dan perempuan secara terbuka. Selain itu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah haruslah memenuhi asas LUBERJURDIL (Langsung , Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil) dan ditambah dengan semangat kebebasan sipil yang termasuk di dalamnya adalah kesetaraan partisipasi dalam politik antara laki-laki dan perempuan merupakan inti di dalam asas demokrasi.

Majunya Balgis sebagai calon kandidat Walikota merupakan yang pertama bagi Kota Pekalongan memiliki kandidat kepala daerah perempuan. Dalam sejarahnya sejak tahun 1906 sampai dengan saat ini Kota Pekalongan selalu dipimpin oleh Walikota laki-laki. Sebagai seorang politisi yang memiliki tingkat popularitas yang besar, Bbalgis diabt tentunya memiliki kesempatan yang besar di dalam pencalonanya sebagai calon Walikota Pekalongan pada kontestasi Pilkada 2020 ini. Dengan elektabilitas yang tinggi ini pada akhirnya membuat

sebagian besar dukungan dari fraksi-fraksi di DPRD Kota Pekalongan diberikan kepada Balgis Dalam pencalonannya, Balqis Diab didukung oleh enam Partai Politik yaitu Partai Golkar, PKB, PKS, PAN, Gerindra, dan Nasdem. Koalisi pengusungan Balgis ada 29 kursi dari 35 Kursi di DPRD yang mendukung dan hanya menyisakan PDIP dan Hanura. PDIP dan Hanura apabila berkoalisi belum bisa mengajukan calon kandidat Walikota. Hal ini dikarenakan partai koalisi dipersyaratkan memiliki 7 Kursi di DPRD atau 20% dari jumlah seluruh kursi di DPRD. (*RadarPekalongan.co.id* 7 Agustus 2020).

Pada dinamika selanjutnya, PAN dan PPP memutuskan untuk keluar dari koalisi pengusung Balgis dan memilih untuk bergabung bersama PDIP dan Hanura untuk mengusung pasangan Afzan Arslan Djunaid yang saat ini merupakan Wakil Walikota incumbent saat ini. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Basyir Ahmad. Menurut Basyir, elektabilitas Balgis yang tinggi membuat mayoritas fraksi DPRD mendukung Balgis sebagai calon Walikota. Basyir menyikapi keluarnya PPP dan PAN itu dikarenakan Dewan Pimpinan Pusat tidak mengeluarkan rekomendasi kepada Balgis.

“ Ibu ini didukung oleh banyak partai pendukung, biasanya kalo Pilkada sebelumnya itu saya sendiri dikeroyok banyak. Tapi kali ini ibu berpasangan dengan pak Machrus dari PKB serta dapat dukungan dari PKS, Gerindra dan Nasdem. Walaupun pada waktu deklarasi PAN dan PPP ikut, tapi kemudian tidak mendapatkan rekomendasi dari DPP, malah DPP nya memberikan rekomendasinya ke Aap (Afzan) nah begitu ceritanya. Jadi sebenarnya disini ini ibu sudah mendapatkan dukungan dari temen-temen di politiknya. Termasuk juga PAN dan PPP jawa tengah juga mendukung sebenarnya, tapi setelah dibawa ke pusat rekomendasinya tidak keluar dan pada akhirnya ibu tidak didukung oleh PAN dan PPP” (Wawancara dengan Basyir Ahmad, 18 November 2020)

Fenomena besarnya dukungan politik kepada Balgis menunjukan kompetensi manuver dan lobby politik yang baik dari Balgis Diab. Selain itu elektabilitasnya yang besar di masyarakat dapat terlihat dari dukungan masyarakat yang memberikan suaranya untuk memilih Balgis sebagai anggota DPRD ketika pemilihan legislatif. Dengan semua dukungan elektabilitas yang tinggi serta modal sebagai sosok populis di masyarakat menjadi basis kekuatan Balgis untuk

maju sebagai seorang kandidat calon Walikota Pekalongan perempuan pertama. Namun , dalam hal ini pencalonan Balgis Diab sebagai calon Walikota bukan tanpa tantangan. Struktur masyarakat Kota Pekalongan yang sangat religius dengan tingkat kepatuhan dan ke fanatisan yang tinggi kepada Ulama serta kontur budaya patriaki yang masih melekat di sebagian masyarakat Kota Pekalongan menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan Balgis. Elektabilitas yang tinggi bukanlah menjadi modal utama yang cukup. Sebuah sitem pemenangan sebagai strategi politik yang bagus perlu dibangun oleh Balgis untuk dapat menyusun mesin politik yang baik guna memobilisasi suara masyarakat dan dengan tujuan dapat memenangkan kontestasi Pilkada Kota Pekalongan. Pembahasan mengenai hal ini akan dibahas dalam bab selanjutnya.

BAB V

STRATEGI ELEKTORAL DALAM MEMBANGUN MESIN POLITIK

Pada bab ini, akan diuraikan data dan analisa temuan di lapangan mengenai strategi elektoral yang dilakukan oleh Balgis Diab dalam membangun mesin politik. Di dalam prosesnya Balgis Diab sebagai figur populis di Kota Pekalongan telah lama dikenal oleh masyarakat Kota Pekalongan. Peran dan partisipasi yang telah banyak dilakukannya sebagai politisi ataupun di dalam kegiatan-kegiatan sosial telah banyak menjadikan dirinya memiliki banyak jaringan di masyarakat. Analisa dilakukan setelah sebelumnya temuan-temuan lapangan didapatkan melalui dua proses pengumpulan data yakni melalui proses observasi, wawancara dan juga studi literatur dokumen-dokumen pendukung. Dalam bab ini analisa mendalam didasarkan dengan landasan teori mengenai strategi elektoral dan mesin politik guna menarasikan serta menganalisis strategi elektoral untuk membangun mesin politik dalam bentuk tim sukses yang dilakukan oleh Balgis Diab.

A. Jaringan sosial sebagai modal pembentukan mesin politik

Pasca runtuhnya Orde Baru, terjadi perubahan besar dalam tata pemerintahan di Indonesia. hal ini juga berpengaruh kepada berubahnya sistem politik yang dijalankan di negara ini. Perubahan-perubahan yang terjadi di dorong oleh berbagai macam faktor seperti demokratisasi dan desentralisasi. Selain dua faktor tersebut, perubahan sistem politik Indonesia juga berpengaruh pada sistem pemilihan umum dimana yang pada mulanya Indonesia menganut sistem pemilihan umum tidak langsung atau melalui perwakilan, kali ini Indonesia menganut sistem pemilihan umum secara langsung. Fenomena keterbukaan sistem politik Indonesia menghasilkan dampak semakin besarnya peran pemilihan (Aspinall & Berenschot, 2019).

Perubahan sistem pemilu dari pemilu tidak langsung menjadi pemilu langsung pada akhirnya memberikan kesempatan kepada para masyarakat sebagai konstituen untuk memilih pemimpinnya secara langsung tanpa melalui proses perwakilan seperti yang lazim dilaksanakan pada masa Orde Baru. Melihat fenomena ini menunjukkan bahwa pemimpin politik haruslah membangun jaringan klientelistik yang bisa menyentuh hingga ke tingkat masyarakat bawah (Lihat Aspinall & Berenschot, 2014) dengan melibatkan para Broker dan pemilih biasa di tingkat akar rumput. Sistem pemilihan secara langsung secara otomatis merubah peran dari partai-partai politik dalam menseleksi calon kandidat yang akan dijadikan sebagai petarungnya dalam kontestasi pemilu. Dalam kata lain, kandidat yang akan maju dalam kontestasi politik masih dinominasikan oleh partai politik dengan kriteria bahwa kandidat diusung oleh partai ataupun koalisi partai yang menguasai presentase suara tertentu di dalam pemilihan legislatif (*Threshold*) di pemilu sebelumnya. Dalam dinamika pencalonan kandidat terkadang muncul permasalahan-permasalahan dimana mesin politik partai yang tidak berjalan maksimal sehingga dalam konteks mobilisasi suara seorang calon kandidat yang diusung tidak mendapatkan hasil yang signifikan. Hal lantas mendorong para calon kandidat membangun tim suksesnya sendiri untuk tujuan dapat memobilisasi suara secara masif di masyarakat sehingga dapat memperoleh kemenangan di dalam kontestasi pemilu yang di ikuti (Tawakkal, Damayanti, Subekti, 2020).

Selain sebagai seorang kandidat calon Walikota perempuan pertama dalam sejarah perpolitikan Kota Pekalongan Balgis sendiri juga merupakan sosok figure yang populis yang sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat di Kota Pekalongan. dalam kontestasi Pilkada 2020 ini, Balqis yang sebelumnya merupakan ketua DPRD Kota Pekalongan akan menghadapi lawan yang merupakan Wakil Walikota Petahana saat ini. Meskipun dukungan mayoritas parlemen sudah ada dalam genggamanya namun bukan berarti Balgis tidak melakukan persiapan untuk membangun tim sukses untuk pemenangnya di Pilkada 2020 ini. Pembentukan tim sukses Balgis telah dimulai sejak bulan Desember 2019 yang

lalu. Tim sukses inilah yang akan membantu Balgis sebagai tim pemenangan dalam pilkada Kota Pekalongan 2020 ini. Pembentukan tim sukses ini dikonfirmasi oleh Basyir Achmad yang merupakan ketua dewan penasehat tim kampanye pasangan Balgis-Machrus sekaligus dewan penasehat Partai Golkar Kota Pekalongan. Pembentukan tim sukses jauh-jauh hari ini merupakan sebuah strategi yang dilakukan oleh Balgis dan Tim sukses untuk terlebih dahulu memetakan dinamika politik di Kota Pekalongan serta untuk mempelajari segala sesuatu yang mungkin terjadi sehingga dapat diantisipasi sedini mungkin.

“ Pembentukan Tim sukses kita sudah bentuk sejak akhir tahun 2019 yang lalu, ya pada saat itu memang belum terlihat pasangan kita siapa. Tim dari Golkar sendiri memang sudah saya bentuk sejak tahun lalu tinggal lihat siapa koalisinya. Nah kalau sudah tau siapa koalisinya baru kita mulai memetakan sebaran tim nya. Jadi pada akhir tahun 2019 itu sudah ada 1600 tim dari tingkat RT paling bawah. Sehingga kita bisa cur start dan mulai siap-siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi” (Wawancara dengan Basyir Ahmad, 18 November 2020).

Dalam pembentukan tim sukses ini, Balgis membangun tim sukses tidak hanya terdiri dari orang-orang partai saja akan tetapi juga mengandalkan dari jaringan sosial yang dimiliki oleh Balgis. Tim sukses yang dibangun Balgis sebagai mesin politik ini terbagi menjadi 4 Sektor utama yakni meliputi tim kota, tim kecamatan, tim kelurahan dan satu tim baru yakni tim RW dan tim RT.

1. Pembentukan Jaringan Tim Pemenangan Tingkat Kota

Struktur tim Kota yang merupakan tim inti yang dibangun oleh Balgis, berisikan nama-nama yang terdiri dari orang-orang non partai dan juga orang partai. Balgis mengandalkan jaringan sosial yang dimilikinya dengan menempatkan orang-orang relasinya yang justru bukan dari kalangan orang partai menempati jabatan-jabatan inti dalam struktural tim sukses ini. Dalam struktural inti Balgis menempatkan figur dari jaringan struktural NU sebagai ketua tim pemenangan di tingkat Kota. Selain itu posisi wakil ketua pemenangan tim tingkat kota diisi oleh kerabat dan juga relasi pengusaha-pengusaha yang memang sudah lama memiliki hubungan yang dekat dengan Balgis. Fenomena pembentukan tim kampanye pemenangan di luar orang-orang politisi dari partai

politik sebenarnya sudah lazim di dalam konteks pemilu Indonesia (lihat Aspinall, 2014; Aspinall dan Sukmajati, 2015; Triantini, 2015; Noor Rahman, 2015).

Penempatan figur-figur non partai dalam struktural tim pemenang Balgis Diab bukan semata-mata dibentuk begitu saja. Penempatan tokoh struktural NU menjadi ketua tim kemenangan pusat merupakan sebuah strategi yang digunakan untuk mendapatkan dukungan dari kalangan masyarakat NU di Kota Pekalongan. Balgis sadar sebagai calon kandidat perempuan pertama di Kota Pekalongan tidaklah mudah. Sebab, kultur masyarakat Kota Pekalongan yang masih kuat kultural NU, menjadikan sangat penting bagi Balgis untuk menempatkan figur yang merupakan orang non partai sekaligus merupakan struktural NU Kota Pekalongan sebagai ketua tim kemenangan. Di posisi wakil ketua juga diisi oleh orang-orang non partai. Seperti wakil ketua 1 tim kemenangan tingkat kota yang diisi oleh kalangan keluarga yakni diisi oleh sepupu dari Basyir Ahmad yang merupakan pengusaha batik skala besar. Setelah menempatkan orang-orang non partai dalam posisi inti struktural tim kemenangan barulah Balgis menempatkan orang-orang dari partai politik pendukung utama yakni Golkar dan PKB dalam struktural tim sukses. Apabila dilihat dari dua struktur utama tim kemenangan pusat yang dibentuk oleh Balgis ini dapat dipahami bahwa ini merupakan sebuah strategi elektoral yang dilakukan Balgis untuk dapat memperoleh dukungan suara yang besar yakni dari suara masyarakat kultural NU yang besar di Kota Pekalongan dan juga suara dari jaringan pengusaha-pengusaha batik yang notabene memiliki banyak karyawan.

“jadi struktural tim inti kota itu agak berbeda dengan tim yang ada di kecamatan ataupun kelurahan, kalau tim pusat kota itu kita juga merangkul pihak-pihak dari struktural NU, Sehingga beberapa orang NU misalnya dalam hal ini jadi ketua tim kemenangan ini merupakan struktural wakil ketua di NU dan bukan merupakan orang partai. Jadi ketua kemenangan tim kota pekalongan Balgis itu merupakan Wakil Ketua PCNU Kota Pekalongan dan bukanlah orang PKB. Sedangkan wakil ketua diisi oleh sepupu saya, ini dari unsur keluarga dan kembali dia bukan merupakan orang partai tapi memang pengusaha murni. Sepupu saya itu adalah pengusaha batik yang besar sekali dan dia memiliki karyawan yang

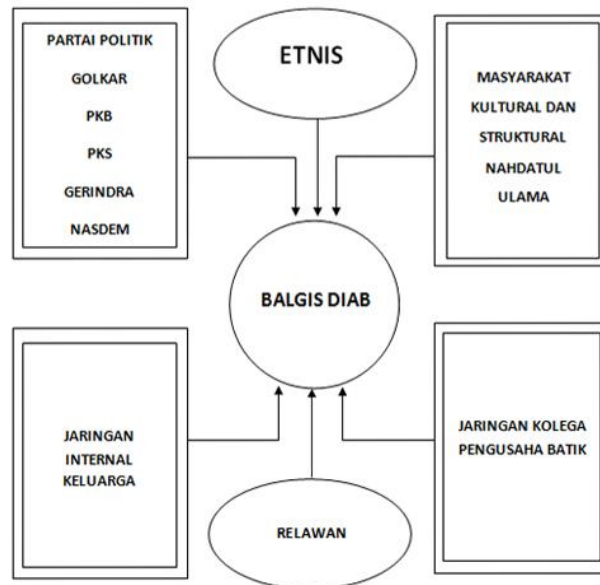
sangat banyak dan baru di wakil ketua berikutnya adalah dari struktural PKB ” (Wawancara dengan Basyir Ahmad, 18 November 2020).

Pembentukan tim sukses ini juga diperjelas dengan konfrimasi dari Heri Dwi Wibawa yang merupakan sekretaris tim pemenangan Balgis Diab sekaligus Kader Golkar. Heri menambahkan bahwa secara keseluruhan, tim inti Balgis terbagi atas dewan penasehat yang berisi elit-elit partai politik dan juga tokoh masyarakat dan juga tim pemenangan yang sekaligus menjadi tim sukses Balgis yang terbagi menjadi 4 struktural yakni di tingkat Kota , Tingkat Kecamatan, tingkat kelurahan dan juga tingkat RT.

“ Ya tentu strukturnya mulai dari semacam dewan penasehat, dewan penasehat itu bersikan dari unsur partai pengusung ya, dari senior-senior di Partai Golkar dan dari PKB juga ada kemudian juga dari unsur-unsur tokoh masyarakat. Kemudian dibawah itu baru ketua tim pemenangan atau tim sukses , kemdian ada wakil-wakil ketua, kita ambilkan dari ketua-ketua partai pengusung dan juga dari kalangan non partai. Setelah itu ada sekretaris dan wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara. Kemudian itu baru ke seksi, yakni seksi kampanye, seksi pengerahan massa, seksi hukum dan advokasi, seksi informasi dan komunikasi seksi logistik dan juga seksi saksi.seperti itu ” (Wawancara dengan dr.Heri Dwi Wibawa , 6 November 2020).

Dari dua penjelasan narasumber di atas menunjukan bahwa dalam pembentukan tim pemenangan di tingkat Kota, Balgis menggabungkan antara orang-orang dari partai politik pendukung dan juga orang-orang non partai. Hal ini Balgis lakukan karena Balgis memiliki jaringan sosial yang cukup luas baik itu di kalangan politik maupun di kalangan orang-orang non politik. Pemetaan jaringan sosial ini terdiri dari jaringan elit politik partai pengusung dan pendukung, jaringan internal keluarga, jaringan kultural serta struktural Nahdatul Ulama,jaringan kolega pengusaha, jaringan etnis dan tim jaringan relawan. Semua itu Balgis susun dalam sebuah jaringan mesin politik yang dapat digambarkan dengan bagam sebagai berikut:

Gambar 5.1 : Jaringan Mesin Politik Balgis Diab



Sumber : Analisis Data Primer

Dengan melihat gambar jaringan tersebut, dapat kita indikasikan mayoritas dukungan yang di dapatkan di parlemen membuktikan bahwa seorang Balgis Diab memiliki kapasitas komunikasi politik yang baik sehingga mampu membangun jaringan politik dengan hasil dukungan dari partai-partai politik di DPRD yang condong untuk mendukung Balgis Diab sebagai calon Walikota Pekalongan. Selain jaringan dari politik, balgis juga menempatkan orang-orang non parpol ke dalam struktural tim pemenangnya. Seperti dengan menempatkan wakil ketua PCNU kota Pekalongan sebagai ketua tim pemenangan kota dan juga beberapa anggota keluarga serta koleganya sesama pengusaha untuk masuk dalam struktural tim pemenangan. Hal ini merupakan sebuah strategi yang dibangun balgis dalam membangun mesin politiknya dengan menyeimbangkan modal jaringan sosial yang dimilikinya baik itu yang berasal dari politik maupun yang berasal dari relasinya di masyarakat.

Tabel 5.1 : Struktur inti Tim Pemenangan Balgis Diab tingkat Kota

Ketua Dewan Penasehat	H. M Basyir Achmad Syawie
Ketua Tim Pemenangan	H. Abdul Hakim Kurniawan
Wakil Ketua Tim Pemenangan	1. Zaim Syawie
	2. Nusron (PKB)
	3. Eko Kalungguh
Sekretaris	Heri Dwi Wibawa (Gokar)
Bendahara	Faisol Hanan (Golkar)

Sumber : Data Primer

2. Pemebentukan tim jaringan Elit Parpol, Keluarga, dan Kolega

Strategi Balgis dalam menempatkan orang-orang non partai dalam struktur inti tim suksesnya ini bukanlah hal yang baru dalam dinamika pemilu di Indonesia. Sejatinya pembentukan mesin politik diluar partai juga menjadi fenomena yang lazim dilakukan di berbagai negara diluar Indonesia dan juga hal semacam ini biasa hadir dalam proses demokratisasi terutama di dalam pemilihan umum. Beberapa diantaranya seperti yang terjadi di negara-negara Amerika Selatan seperti Venezuela, Meksiko, Brazil Argentina dan Paraguay. Selain di negara-negara Amerika Selatan, hal semacam ini juga terjadi di negara-negara Asia seperti China, Thailand bahkan di negara maju seperti Rusia pun juga melakukan pembangunan mesin politik diluar partai politik (lihat Tawakkal, dkk 2020). Hal ini dipengaruhi oleh perubahan dari sistem pemilu itu sendiri. Dengan diberlakukanya pemilihan kepala daerah secara langsung rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpinnya sendiri.

Partai politik pun masih memainkan perannya sebagai kendaraan utama seseorang bisa mencalonkan diri sebagai kandidat dalam kontestasi Pilkada. Akan tetapi, dengan pemilihan umum kepala daerah yang dilakukan secara langsung ini memiliki beberapa konsekuensi yang harus dihadapi oleh partai politik. Rakyat memilih pemimpinnya secara langsung berarti partai politik haruslah mengusung sosok calon kandidat kepala daerah yang populer di kalangan masyarakat. Selain dari mengusung calon kandidat yang memiliki popularitas tinggi di kalangan masyarakat, partai politik sendiri harus memahami struktur pemilihan yang

beragam. Ini menjadi sebuah tantangan bagi partai politik karena terkadang muncul permasalahan partai politik dalam mobilisasi suara masyarakat karena partai politik gagal dalam melihat struktur masyarakat pemilih. Dengan struktur masyarakat yang beragam, tak jarang hal ini juga menjadikan partai politik menyerahkan penyusunan struktur tim sukses kepada seorang calon yang maju dalam kontestasi pilkada. pada proses selanjutnya para calon kandidat terdorong untuk mengandalkan jaringan sosial yang telah lama mereka ia bangun di daerah mereka sebagai persiapan tim pemenangan daripada mengandalkan hubungan melalui partai politik (Aspinall dan Berenschot, 2019).

Akan tetapi dalam fenomena pencalonan Balgis Diab ini, struktur tim pemenangan yang dibangun Balgis merupakan tim kolaboratif antara orang-orang partai politik dan juga dari luar partai politik. Dengan temuan ini dapat dilakukan analisa bahwa jejaring sosial yang telah dibangun Balgis merupakan implementasi manuver politik Balgis selama kiprahnya dalam kancah politik di Kota Pekalongan. Balgis sadar bahwa pencalonannya sebagai calon Walikota tidak bisa dilepaskan dari peranan partai Golkar sebagai kendaraan politik utamanya. Menurut Aspinall dan Berenschot (2019), partai politik memiliki peranan penting sebagai penjaga gerbang. Penjaga gerbang disini berarti bahwa orang-orang yang ingin maju ke dalam kontestasi politik haruslah bisa meyakinkan partai politik untuk menjadikannya sebagai nominasi sebagai seorang calon kandidat. Selain berperan dalam menominasikan kandidat yang akan dicalonkannya, partai politik juga berperan penting dalam proses kampanye. Posisi Balgis sebagai ketua DPC Partai Golkar Kota Pekalongan, sangat berpengaruh pada dominasi dan pownya kepada struktural partai. Hal ini pada akhirnya digunakan oleh Balgis dalam memenuhi kepentingan tujuan kampanye pencalonannya. Sedangkan untuk struktural partai pendukung lainnya pada akhirnya terikat pada partai untuk mendukung pencalonan Balgis. Hal ini dikarenakan partainya merupakan partai yang tergabung di dalam koalisi yang dibangun. Ini sekaligus memperkuat pernyataan analisis (lihat Aspinall dan Berenschot,2019) yang mengatakan bahwa sangat sering fungsional partai di tingkat ranting atau di tingkat kelurahan

berutang budi dan kesetiaan pada calon yang didukung oleh partai politik semacam itu.

Adapun strategi Balgis dengan menempatkan orang-orang non partai dalam struktur tim kampanyenya hal ini tidak terlepas dari potensi yang dilihat bahwa figur-figur non partai tersebut merupakan sosok yang mampu untuk memobilisasi masyarakat suara pemilih secara signifikan. Sistem pemilihan umum yang bersifat langsung menyebabkan orientasi dukungan suara masyarakat tidak hanya dilihat dari fanatisme terhadap partai politik seperti yang terjadi pada Orde Baru akan tetapi orientasinya lebih kepada figur yang berpengaruh. Dengan demikian seorang calon kandidat akan lebih fokus berkampanye dengan sumberdaya yang dia miliki dari jaringan sosial yang telah terbangun lama (Aspinall, 2014). Balgis menggunakan jaringan keluarga dan jaringan kolega sesama pengusaha batik serta menempatkan Abdul Hakim yang merupakan struktur PCNU karena Balgis melihat figur-figur inilah yang mampu untuk menarik suara masyarakat.

Hadirnya figur-figur non partai terutama sosok Abdul Hakim yang merupakan struktural NU sebagai ketua tim kemenangan dalam tim sukses sangat dibutuhkan Balgis sebagai calon kandidat walikota Perempuan pertama di Kota Pekalongan. Hal ini bukan lantas menunjukkan ketidakmampuan Balgis untuk melakukan relasi hubungan ke masyarakat akan tetapi strategi untuk lebih menguatkan bahwa pencalonan seorang perempuan dalam Pilkada itu merupakan sesuatu hal yang wajar. Keberadaan Abdul Hakim dapat menolong Balgis dalam hubungan tidak langsung antara Balgis dengan masyarakat terutama masyarakat NU. Balgis melihat kuatnya fanatisme masyarakat kepada kultural NU di Kota Pekalongan bisa menjadi peluang bagi dia untuk dapat mempengaruhi suara masyarakat dengan signifikan. Strategi ini dilakukan bukan hanya merangkul Machrus sebagai wakil saja akan tetapi menempatkan Tokoh NU lainnya sebagai ketua tim Kemenangan pusat. Hal ini juga lah yang menjadi alasan utama Balgis menempatkan jaringan sosial keluarga serta kolega dari kalangan pengusaha sebagai Tim kemenangan. Jaringan keluarga yang dibentuk oleh Balgis tidak hanya terfokus pada keluarga internal saja akan tetapi hal ini juga menjalar kepada

jaringan etnis terutama jaringan keluarga keturunan etnis Arab di Pekalongan. seperti yang diketahui bahwa hubungan kekerabatan antar etnis keturunan Arab masih kental dengan hubungan kekerabatan berupa jaringan marga. Dari sinilah muncul strategi pembentukan jaringan keluarga sebagai mesin politik yang digunakan Balgis. Selain jaringan keluarga, jaringan kolega sesama pengusaha batik juga menjadi jaringan potensial yang mampu dibentuk Balgis. Mengingat Balgis juga merupakan pengusaha batik sehingga tidak sulit bagi Balgis untuk mengajak relasinya sesama pengusaha Batik menjadi mesin politiknya.

B. Strategi Jaringan Mesin Politik Politik Akar Rumput

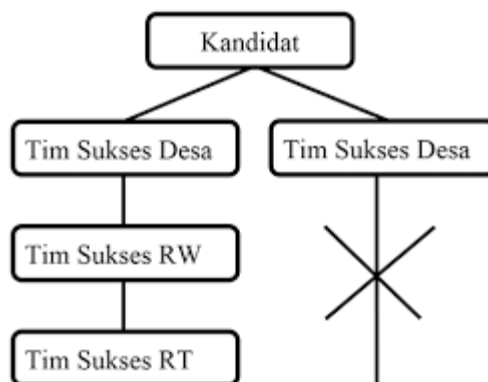
3. Pembentukan Tim Kecamatan, Kelurahan dan RT-RW

Selain menggunakan jaringan sosial untuk membangun struktur tim pemenangan di tingkat pusat, Balgis juga tidak lupa membangun mesin-mesin politiknya di akar rumput. Seperti yang telah disampaikan Basyir Ahmad bahwa tim pemenangan Balgis dibentuk kedalam empat tingkat yakni tingkat kota, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan dan tingkat paling bawah yakni di tingkat akar rumput (RT maupun RW). Struktural tim pemenangan di bawah struktural tim kota dimulai dengan tim penanggung jawab kecamatan (PK), tim penanggung jawab kelurahan (PL), dan tim kelurahan tersebut terdapat tim akar rumput yakni mereka yang bertugas di wilayah RT yang biasa disebut sebagai “*Pecut*” sebagai mesin politiknya. Dalam struktural tim pemenangan di tiga tingkat dibawah struktur tim kota ini, Balgis menggunakan sumber daya dari jaringan partai politik pendukung serta melibatkan relawan-relawan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat di tingkat struktural terkecil yakni di tingkat RT.

Tim di akar rumput ini sesuai dengan tupoksinya merupakan penghubung antara calon kandidat dalam hal ini Balgis Diab dengan masyarakat di arus bawah. Dengan adanya sistem pemilihan umum kepala daerah secara langsung membuat seorang calon kandidat perlu membangun hubungan dengan masyarakat hingga ketingkat bawah sebagai modal untuk mendulang suara menjadi lebih signifikan. Tim akar rumput yang menjadi penghubung antara calon kandidat dan pemilih ini

menurut Aspinall dikatakan sebagai *Broker Politik*. Di Indonesia istilah broker politik ini sering disebut sebagai Tim Sukses. Meskipun secara kompleksitas dan struktur dari tim sukses ini lebih sederhana dari broker politik yang sebenarnya, akan tetapi pada intinya memiliki tugas yang sama.

Gambar 5.2 : Sistematika Jaringan Tim Sukses Akar Rumput



Sumber : Edward Aspinall & Ward Berenschot (*Democracy For Sale*, 2019)

4. Tim Jaringan “Pecut” Akar Rumput

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Balgis membentuk mesin politik pemenangnya ke dalam struktural-struktural hierarkis dan diatur secara geografis yang sistematis dari tingkat Kota Hingga ke tingkat RT/RW. Tim sukses yang dibangun di akar rumput mengandalkan para “Pecut” yang merupakan relawan-relawan yang berasal dari tingkat RT untuk masuk dalam struktural tim pemenangan. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh salah satu tim pemenangan Balgis Diab di tingkat akar rumput seperti berikut:

“Dalam lingkup struktural tim sukses di bawah struktur kota itu terdiri dari Pelaksana Kecamatan, Pelaksanaan Kelurahan dan juga tim pecut di lingkup RT. Saya sendiri disini sebagai pelaksana kelurahan atau PL. Saya membawahi beberapa tim RW dan juga para pecut-pecutnya di tingkat RT. Tim pemenangan ini tidak menyangkut hanya satu partai jadi terdiri dari beberapa partai pendukung. Jadi dapat dikatakan struktural inti tim akar rumput itu dimulai di tingkat kecamatan, kelurahan hingga RT. Jadi tanggung jawab konstituen dibawah saya nanti saya laporkan langsung kepada tim pelaksana kecamatan” (Wawancara dengan Imam Suwongso, tim pemenangan Kelurahan Kandang Panjang, 6 November 2020).

Penjelasan serupa juga dikonfirmasi oleh struktur tim pemenangan kecamatan Pekalongan utara yang lebih menjelaskan mengenai struktural dilingkup kecamatan.

“Secara struktural di kecamatan Pekalongan Utara terdapat petinggi-petinggi yang diisi oleh orang-orang dari struktural partai politik koalisi. Jadi ketua tim pemenangan di tingkat kecamatan itu dijabat oleh anggota dewan dari DPRD. Di kecamatan Pekalongan utara ini sendiri, ketua Tim Pemenangan dijabat oleh Mas Azmi dari partai Golkar. Sedangkan untuk struktural kebawahnya diisi oleh orang-orang partai pengusung seperti PKB, Gerindra dan partai lainnya. Dibawahnya merupakan tim penggalangan masa.” (Wawancara dengan M. Syakur, 4 November 2020).

Ditematkannya para tim sukses “Pecut” yang memiliki arti cambuk atau pemacu dari kalangan warga dalam satu wilayah RT sendiri diharapkan akan mampu memobilisasi suara yang cukup signifikan untuk mendukung Balgis dalam pencalonannya di Pilkada Kota Pekalongan 2020. Peran para Pecut ini adalah untuk meyakinkan tetangga-tetangga mereka mengenai Visi dan Misi dari Balgis Diab dalam pencalonannya sebagai Walikota Pekalongan. Strategi penggunaan “Pecut” di akar rumput ini merupakan strategi tepat dibangun oleh tim pemenangan balgis di tingkat kota dengan memanfaatkan para pecut dari kalangan warga masyarakat lingkup tetangga sendiri, Balgis berharap para pecut ini mampu mendorong para snak keluarga ataupun tetangga sekitarnya untuk memberikan dukungan kepada Balgis dari sini strategi pemanfaatan jaringan sosial yang dibangun para “pecut” dengan tetangganya akan menimbulkan kepercayaan sosial (Social Trust) yang baik. Hal ini karena dengan melibatkan orang-orang yang sudah memiliki hubungan intim dan memiliki pengaruh terhadap para pemilih cenderung lebih efektif daripada ajakan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal (Aspinall dan Berenschot, 2019).

BAB VI

STRATEGI MOBILISASI SUARA MASYARAKAT DAN ANALISIS KEGAGALAN DALAM KAMPANYE BALQIS DIAB

Pada bab ini akan dibahas mengenai strategi elektoral yang dilakukan Balgis Diab untuk memobilisasi suara dukungan dari masyarakat dalam kampanye politik yang dilakukan pada kontestasi pilkada Kota Pekalongan tahun 2020. Bab ini akan terfokus pada sepak terjang Balgis dan mesin politik yang dibangunnya serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mendulang suara dalam kontestasi pilkada Kota Pekalongan. Akan tetapi, selain fokus pada strategi-strategi yang dilakukan Balgis diab dan tim pemenangan dalam memobilisasi suara, pada bab ini juga akan di analisis mengapa hasil perolehan suara Balgis dalam pilkada justru mengalami kekalahan dari pasangan lawan. Hal ini merupakan analisa tambahan yang di dapat pasca diselenggarakannya Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020. Data lapangan untuk menunjang penulisan pada bab ini diambil melalui observasi lapangan dan wawancara langsung dengan beberapa narasumber serta data-data pendukung yang diambil dari berbagai dokumen literatur yang sesuai. Selanjutnya dilakukan analisa terhadap data tersebut menggunakan teori-teori politik yang relevan agar menjadi suatu penulisan yang sistematis dan komprehensif.

A. Strategi Penguatan Jaringan Internal Mesin Politik

1. Penguatan Jaringan Elit Partai Politik

Majunya Balgis sebagai calon kandidat Walikota Pekalongan dalam kontestasi Pilkada serentak mengharuskan Balgis untuk segera membangun mesin politiknya. Mesin Politik inilah yang akan menjadi penggerak utama dalam memobilisasi suara dari masyarakat pemilih untuk mendukung Balgis di Pilkada. pembentukan Tim Pemenangan sebagai mesin politik Balgis sudah dimulai sejak akhir tahun 2019. Seperti yang dikonfirmasi oleh Basyir Achmad selaku ketua

dewan penasehat tim pemenangan Balgis bahwa penyusunan tim pemenangan ini dilakukan jauh-jauh hari untuk dapat mencuri start terlebih dahulu sehingga tim pemenangan memiliki banyak waktu untuk dapat lebih meyakinkan masyarakat untuk memilih Balgis. Tim pemenangan yang dibentuk terdiri dari empat struktur utama yakni tim pemenangan tingkat pusat (Kota), tim pemenangan tingkat kecamatan, tim pemenangan di tingkat kelurahan serta tim akar rumput di tingkat RT.

Dalam pelaksanaanya, strategi pertama yang dibentuk oleh Balgis adalah untuk dapat melakukan mobilisasi suara dukungan yang signifikan dari masyarakat adalah dengan mengoptimalkan kerja dari tim pemenangan sebagai mesin politik utamanya. Balgis melihat bahwa apabila tim ini solid dan kuat maka strategi untuk memobilisasi suara dari masyarakat akan berjalan sesuai target yang diinginkan yakni memperoleh kemenangan dalam Pilkada. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Basyir Achmad dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 November 2020, bahwa tim pusat yang dibentuk sejak akhir tahun 2019 pada awalnya hanya berisikan orang-orang yang berasal dari lingkup partai Golkar saja. Sembari mereka menunggu siapa yang akan menjadi koalisinya, mesin politik dari DPC partai Golkar sendiri sudah dipersiapkan untuk mengisi pos-pos tim pemenangan yang ada mulai dari tingkat kota sampai dengan tingkat RT. Bergabungnya PKB sebagai Koalisi dengan menempatkan kadernya yakni Machrus sebagai pendamping Balgis membuat skema susunan tim pemenangan pun bertambah. PKB juga memasukan kader-kadernya ke dalam struktural tim pemenangan yang telah dibentuk. Selain partai Golkar dan PKB, partai-partai pendukung lain seperti PKS, Gerindra dan Nasdem juga diberikan posisi di dalam struktur tim pemenangan Balgis. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Basyir Achmad, partai-partai pendukung yang lain menggerakkan kadernya di tiap-tiap wilayah. Selain masuk ke dalam struktur tim pemenangan di tingkat kecamatan dan kelurahan, partai-partai pendukung juga melakukan konsolidasi internal tiap-tiap partai untuk menggerakkan para kadernya di basis suara masing-masing partai tersebut.

“ Seperti yang saya bilang sebelumnya, pembentukan Tim sukses kita sudah bentuk sejak akhir tahun 2019 yang lalu, ya pada saat itu memang belum terlihat pasangan kita siapa. Tim dari Golkar sendiri memang sudah saya bentuk sejak tahun lalu tinggal lihat siapa koalisinya. Setelah PKB gabung sebagai koalisi kita sesuaikan juga di struktural tim pemenangan dibawah. Selain itu partai-partai pendukung lain seperti PKS, kemudian Gerindra dan Nasdem ya kita masukan juga. Di basis masyarakat misalnya disitu PKS kuat ya kita masukan orang orang PKS disana, kemudian di utara itu ada basis Gerindra dan Nasdem ya kita juga tempatkan orang-orang kita dari Gerindra dan Nasdem disana ” (Wawancara dengan Basyir Achmad, 8 November 2020).

2. Penguatan Jaringan Sosial Kultural NU

Selain membentuk struktural tim pemenangan dari orang-orang partai politik, Balgis juga melibatkan jaringan sosial dan jaringan keluarga yang notabene bukan merupakan orang partai politik di dalam tim pemenangnya. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam tim pemenangan yang dibentuk, Balgis mengkolaborasikan struktur tim nya dengan orang-orang partai dan non partai. Struktur seperti ini merupakan pilihan tepat karena sebagai seorang calon kandidat, ia tidak bisa lepas dari peran partai politik (lihat Aspinall dan Berenschot, 2019) sebagai pengusung dirinya sehingga dirinya mampu maju sebagai calon kandidat Walikota. Sedangkan partai politik pengusung sendiri memiliki kepentingan untuk memunculkan calon kandidat populis dikalangan masyarakat supaya di dalam pemilihan mampu memperoleh kemenangan. Hal ini disesuaikan dengan kondisi perubahan sistem pemilu di Indonesia. Pemilihan umum secara langsung menyebabkan para calon kandidat juga harus membentuk mesin politik dari kalangnya sendiri. Munculnya tokoh Abdul Hakim sebagai tokoh NU kota Pekalongan sebagai ketua tim pemenangan merupakan langkah tepat yang dilakukan Balgis dalam pembentukan struktur tim pemenangnya. Hal ini mengingat bahwa pengaruh kultural NU yang sangat besar di kalangan masyarakat Kota Pekalongan sehingga penguatan jaringan NU dalam tim pemenangan merupakan langkah yang perlu dilakukan. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Basyir Ahmad sebagai berikut :

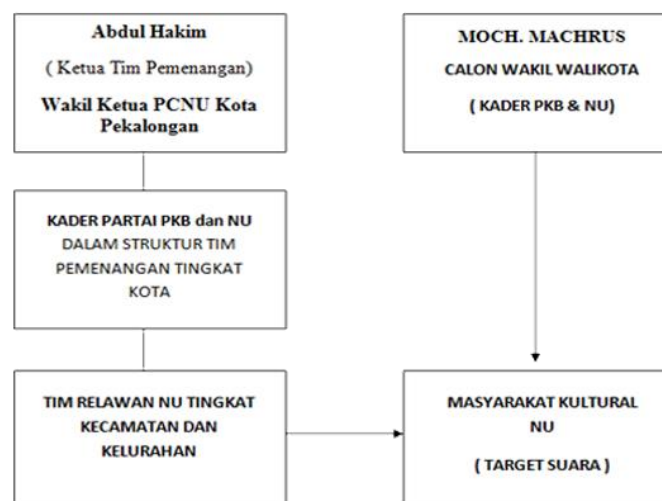
“kita melakukan penguatan tim pemenangan kita. Seperti tadi saya jelaskan, tim pusat kota itu kita juga merangkul pihak-pihak dari

struktural NU, Gus Aing (Abdul Hakim)misalnya dalam hal ini jadi ketua tim pemenangan ini merupakan struktural wakil ketua di NU dan bukan merupakan orang partai. Jadi ketua pemenangan tim kota pekalongan Balgis itu merupakan Wakil Ketua PCNU Kota Pekalongan. Alhamdulillah, wakil nya ibu , Mas Machrus dari PKB backgroundnya juga NU dengan demikian selain orang-orang PKB dalam struktur kita juga menguatkan jaringan NU kita di masyarakat sebagai strategi memenangkan suara ibu” (Wawancara dengan Basyir Ahmad, 8 November 2020).

Hal serupa juga dikonfirmasi oleh Muhammad Syakur yang merupakan struktural tim pemenangan dari PKB. Syakur menyatakan bahwa penguatan struktural NU juga dilakukan dengan melibatkan beberapa tokoh-tokoh NU diluar struktural sebagai tim penggerak di dalam jaringan mesin politik yang dibangun Balgis

“ Saya dari PKB jelas paham betul bahwa PKB tidak bisa dilepaskan dari pengaruh NU. maka ketika saya sering mengawal pak Machrus juga melakukan pendekatan serta penguatan jaringan sosial. Penguatan yang kita lakukan yakni adalah dengan melalui sowan kepada tokoh-tokoh kyai NU yang berpengaruh. Karena basicnya pak Machrus itu kan dari santri dan dari NU maka dari itu pendekatan kita adalah mempersolid hubungan dengan massa dari NU” (Wawancara dengan M. Syakur, 4 November 2020).

Gambar 6.1 : Jaringan Nahdatlul Ulama dalam mesin politik Balgis Diab



Sumber : Data Primer

3. Penguatan Jaringan Keluarga dan Kolega

Selain dari tokoh NU, Balgis juga memperkuat jaringan mesin politiknya dengan menempatkan jaringan keluarga dan juga jaringan kolega dalam struktural tim pemenangan. Dalam struktural tim pemenangan balgis terdapat nama Zaim Syawie yang merupakan keluarga dari Balgis Diab. Selain nama Zaim Syawie juga terdapat nama Eko Kalungguh yang merupakan salah seorang pengusaha batik di Kota Pekalongan dan juga merupakan kolega pengusaha dari keluarga Balgis Diab. Di dalam struktural tim pemenangan, baik Zaim Syawi maupun Eko Kalungguh menempati posisi sebagai wakil ketua tim pemenangan. Menariknya adalah mereka berdua bukan merupakan orang parta politik meskipun menurut pendapat pribadi Basyir Ahmad, Eko merupakan simpatisan PPP namun dengan melihat bahwa dalam tim koalisi PPP tidak tergabung ke dalam tim pemenangan Balgis, maka Eko dapat dikatakan sebagai orang non struktural PPP.

“Kita menggunakan jaringan keluarga dan kolega, dalam tim pemenangan tingkat kota wakil ketuanya dijabat oleh pak Zaim Syawie itu sepupu saya selain itu wakil ketua selanjutnya dari relawan, memang dia orang PPP tapi dukung ke ke kita sebagai kolega bukan sebagai struktural partai. Relawan ini namanya Eko Kalungguh jadi penguatannya juga dilakukan di sini mas jaringan ini orang-orang yang berasal dari keluarga dan kolega” (Wawancara dengan Basyir Ahmad, 8 November 2020).

Ini menunjukkan bahwa penguatan struktural tim pemenangan dilakukan bukan hanya dengan penguatan antar koalisi partai politik saja. Balgis juga melakukan penguatan dengan menempatkan orang-orang seperti relawan masyarakat, jaringan atas dasar kedekatan sebagai keluarga ataupun kolega sebagai tim pemenangan. Tim ini dikenal dengan sebutan tim inti yang berisikan hubungan teman-teman, kerabat, kolega partai atau rekan lainnya yang memiliki kedekatan khusus dengan calon. Tim inti ini biasanya diberikan tugas sebagai pekerjaan khusus dalam tim pemenangan seperti manajemen keuangan, hubungan dengan media dan juga bidang-bidang lain yang penting (Aspinall dan Berencshot, 2019).

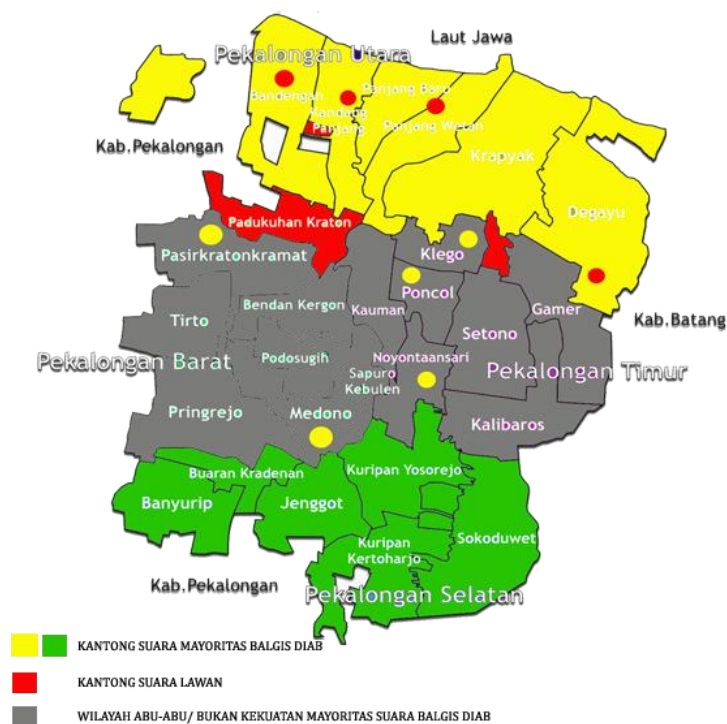
B. Pemetaan Wilayah Sebagai Basis Pengumpulan Dukungan Suara

Setelah melakukan penguatan jaringan mesin politik yang dibangun, selanjutnya tim pemenangan Balgis mulai melakukan strategi pemetaan wilayah untuk melakukan memetakan wilayah-wilayah yang diprediksi akan memberikan dukungan suara yang signifikan bagi Balgis. mesin politik yang terbagi menjadi empat sektor mulai dari tim pemenangan pusat hingga tim RT mulai melakukan kinerjanya untuk melakukan pemetaan wilayah. Menurut wawancara terhadap Basyir Achmad, pemetaan wilayah ini sudah dilakukan sejak awal tahun 2020 dengan menerjunkan tim-tim RT ke warga masyarakat. Hal ini dilakukan agar mengetahui wilayah mana yang berpotensi besar sebagai lumbung suara Balgis di dalam kontestasi Pilkada Kota Pekalongan 2020 ini. Pada saat melakukan penguatan jaringan mesin politik, para tim pemenangan balgis ini juga mulai merencanakan strategi yang dilakukan untuk menghitung jumlah suara yang mereka butuhkan sebagai target kemenangan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk dapat mengamankan kemenangan. Tim pemenangan ini selanjutnya akan memetakan wilayah sebagai identifikasi geografis di mana potensi wilayah dengan potensi suara dukungan akan mereka peroleh. Pemetaan wilayah ini disesuaikan dengan pembagian wilayah administratif yang ada guna melakukan identifikasi mengenai potensi kekuatan atau kelemahan calon kandidat di wilayah tersebut (Aspinall dan Berenschot, 2019).

Hasil dari pemetaan wilayah yang dilakukan oleh tim pemenangan Balgis , dari empat wilayah kecamatan di Kota Pekalongan terdapat dua kecamatan yang memiliki potensi perolehan suara yang signifikan. Dua kecamatan yang dimaksud merupakan Kecamatan Pekalongan Utara dan Kecamatan Pekalongan Selatan. Menurut data lapangan yang peneliti peroleh, Kecamatan Pekalongan Utara dan Kecamatan Pekalongan selatan memang memiliki Basis masa yang besar. Kecamatan Pekalongan utara sendiri merupakan basis masa Golkar yang besar dimana partai Golkar mendapatkan suara signifikan pada pemilihan legislatif 2019 yang lalu. Selain merupakan basis masa dari Partai Golkar, di Pekalongan utara juga merupakan basis Partai Nasdem dan juga Partai Gerindra yang juga

merupakan partai pendukung dalam pencalonan Balgis. Sementara itu di Kecamatan Pekalongan Selatan juga menjadi basis masa dari PKB yang merupakan partai pengusung pasangan Balgis, Moch.Machrus. Selain sebagai basis masa PKB, kecamatan Pekalongan selatan juga merupakan basis kuat dari masyarakat Kultural NU. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pondok-pondok pesantren dengan corak kultural NU di wilayah Pekalongan Selatan. Temuan yang menarik adalah bahwa di dua wilayah kecamatan tersebut, Balgis Diab pernah mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD dari dapil utara dan juga dapil selatan hingga berhasil memperoleh kemenangan. Dengan adanya fakta ini maka tim pemenangan Balgis segera diterjunkan dan bergerak intens dalam kampanye di dua wilayah ini.

Gambar 6.2 : Peta Kekuatan Suara Balgis Diab dalam Pilkada 2020



Sumber : Analisis Data Primer

Pemetaan wilayah yang menjadi potensi kantong suara Balgis Diab dalam Pilkada dilakukan dengan menerjunkan tim survey yang berasal dari internal Partai Golkar. Dari hasil survey ini memang menunjukkan bahwa potensi kekuatan suara terbesar bagi Balgis terdapat di wilayah Pekalongan utara dan di wilayah Pekalongan Selatan. Hal ini dikonfirmasi oleh Basyir Achmad sebagai berikut:

“ Yak, jadi pada saat membentuk tim pemenangan itu, sudah ada survey yang dilakukan oleh teman-teman. dan dari survey tersebut Golkar ini sebenarnya menang di empat kecamatan, dan PKB nomor duanya ini juga menang di empat kecamatan. Jadi gabungan antara Golkar dan PKB ini sebenarnya menang di semua kecamatan mas. Nah hal ini ditambah lagi dengan PKS dan Gerindra yang memiliki suara cukup di parlemen. Jadi kita itu persebarannya di seluruh kecamatan dan target kita semuanya harus menang. Akan tetapi pada saat kita melakukan survey kita mendapatkan hasil kalau yang paling lemah memang di Kecamatan Pekalongan Timur, suara Golkar hanya lima persen. Sedangkan yang paling kuat di wilayah Pekalongan Selatan. Karena di selatan itu masyarakatnya sangat anti dengan PDI-P. Hal ini karena di wilayah selatan itu agamisnya kuat. Nomor dua yang kuat di wilayah Kecamatan Utara di utara kita kuat ” (Wawancara dengan Basyir Achmad, 8 November 2020).

Hal serupa juga dikonfirmasi oleh Muhammad Latief yang merupakan sekretaris tim pemenangan Balgis di wilayah kecamatan Pekalongan Selatan dan M Syakur yang merupakan tim pemenangan Balgis di Pekalongan Utara sebagai berikut :

“ Sementara ini setelah dilakukan pemetaan oleh tim, di Selatan itu kita paling kuat. Hal ini disamping karena kulturalnya dari Nahdliyin itu kuat dan ini mendukung penuh pada pasangan bu Balgis. kemudian Golkar sendiri di sini juga kuat. Bukan hanya Golkar, di sini juga PKB nya kuat sehingga Golkar dan PKB sama-sama kuat di selatan sehingga insyallah bu Balgis akan mendapatkan suara yang cukup telak di sini ” (Wawancara dengan Muhammad Latief, 5 November 2020).

“ Kalo pemetaan kekuatan, itu tersebar di wilayah Utara dan Selatan dan yang paling lemah di Timur. Kalo selatan itu kan basis PKB dan kalo utara basis Golkar ” (Wawancara dengan M.Syakur, 4 November 2020).

Balgis dan tim pemenangan pusat melakukan strategi elektoralnya secara sistematis. Strategi yang perlu dilakukan setelah pembentukan dan penguatan jaringan internal mesin politik adalah dengan melakukan screening atau pemetaan wilayah di empat kecamatan Kota Pekalongan sebagai dasar menyusun strategi berikutnya. Pemetaan wilayah ini dilakukan untuk mengetahui dimanakan wilayah yang merupakan basis potensi suara signifikan dan mana yang tidak. Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa narasumber, di dapatkan data bahwa dari empat kecamatan yang ada di Kota Pekalongan, Balgis berpeluang memperoleh suara dukungan yang signifikan dari dua kecamatan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa di dua wilayah kecamatan tersebut menjadi basis suara Balgis di dalam kontestasi Pilkada tahun 2020 ini.

Suatu wilayah dapat dikatakan sebagai basis suara dapat diklasifikasikan kedalam beberapa faktor. Faktor pertama bahwa dalam wilayah yang menjadi basis dimana calon memiliki potensi yang kuat hal ini dapat dikarenakan wilayah tersebut mungkin daerah tersebut merupakan daerah asal atau tempat tinggal dari calon kandidat. Faktor yang kedua suatu wilayah dapat dikategorikan sebagai basis suara dari kandidat karena merupakan wilayah yang dihuni oleh kelompok masyarakat dengan latar belakang etnis, agama, dan sosial budaya yang sama. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa wilayah yang menjadi basis suara bagi Balgis adalah di kecamatan Pekalongan Utara dan Kecamatan Pekalongan selatan. Namun hal ini bukan lantas menjadikan wilayah Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Barat bukan menjadi basis suara. Seperti yang telah disebutkan bahwa faktor suatu wilayah dapat dikategorikan sebagai basis adalah selain faktor kuatnya elektabilitas kandidat juga karena wilayah tersebut merupakan wilayah tempat tinggal dari calon kandidat.

Balgis sendiri tinggal di wilayah yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Pekalongan Timur. Secara pemetaan kecamatan Pekalongan Timur merupakan wilayah dengan potensi kemenangan yang kecil akan tetapi di situ terdapat suatu pemukiman dari etnis Arab di Kota Pekalongan. Balgis sendiri merupakan salah satu penduduk yang bertempat tinggal di wilayah tersebut dan Balgis juga

merupakan etnis keturunan Arab. Dari sini dapat disimpulkan bahwa meskipun kecamatan Pekalongan Timur dianggap sebagai wilayah paling kecil potensi kemenangan bagi Balgis akan tetapi pada wilayah tersebut tetap ada basis masa sebagai basis dukungan terhadap Balgis Diab dalam kontestasi Pilkada Kota Pekalongan. Seperti data yang telah penulis jabarkan sebelumnya bahwa etnis Arab di Kota Pekalongan memiliki hubungan kekeluargaan yang kuat. Selain itu jaringan keluarga sesama etnis Arab ini juga yang dimanfaatkan Balgis untuk dimasukan dalam mesin politiknya.

1. Pengamatan Segmentasi Pasar dan Targeting Masyarakat

Sama seperti dengan tugas tim kemenangan lainnya, tim kemenangan Balgis juga melakukan strategi pemasaran politik melalui strategi kampanye kepada masyarakat calon pemilihnya. Pembentukan tim kemenangan ini sebagai sebuah strategi kelembagaan (Institusional Strategy) yang dibentuk oleh Balgis Diab guna menjalankan kemampuan tim kemenangan untuk melakukan kampanye program dan personal branding dari seorang Balgis Diab kepada masyarakat sebagai sebuah pemasaran politik. Namun, Sebelum melaksanakan kampanye program, para tim kemenangan Balgis melakukan pemetaan terhadap potensi wilayah dan juga melihat target kondisi struktural masyarakat di wilayah tersebut. hal ini dilakukan untuk melihat potensi dari segmentasi pasar masyarakat yang ada. Dengan melihat segmentasi pasar dari masyarakat, seorang calon dapat lebih memahami kelompok-kelompok masyarakat sebagai target untuk dapat melakukan mobilisasi suara di suatu wilayah tersebut.

Tabel 6.1 : Pemetaan segmentasi pasar masyarakat yang dilakukan oleh tim kemenangan Balgis Diab dalam Pilkada 2020

PEKALONGAN UTARA	PEKALONGAN TIMUR	PEKALONGAN BARAT	PEKALONGAN SELATAN
1. INFRASTRUKTUR	WILAYAH ABU-ABU	PEMILIH RASIONAL	1. MASYARAKAT KULTURAL NU
2. PENANGGULANGAN BENCANA ROB			2. UMKM BATIK
			3. INFRASTRUKTUR

Sumber : Analisis Data Primer

Tim pemenangan Balgis sebagai merasa perlu untuk melihat segmentasi pasar masyarakat di seluruh wilayah Kota Pekalongan sebelum menerjunkan tim nya untuk melakukan targeting dan kampanye. Dengan melihat segmentasi pasar inilah Balgis dan tim pemenangnya akan mampu mengetahui segmentasi apa yang ada dan kelompok masyarakat mana yang dibidik di tiap-tiap wilayah Kota Pekalongan. Dengan demikian Balgis dan tim pemenangnya akan mampu merumuskan produk politik apa yang akan dipasarkan pada saat kampanye berlangsung. Selanjutnya hal ini akan menjadi senjata utama tim pemenangan Balgis diab untuk dapat memberikan *Patronage goods* yang sesuai dengan apa yang di inginkan masyarakat di suatu wilayah (Asppinall, 2019). dengan demikian masyarakat akan tertarik untuk melakukan mobilisasi suara dan memberikan dukunganya kepada Balgis.

Pemetaan segmentasi pasar masyarakat yang pertama dilakukan oleh Balgis adalah dengan fokus kepada dua wilayah basis suara utama yakni di Kecamatan Pekalongan Utara dan di Kecamatan Pekalongan Selatan. Balgis dan tim pemenangnya melihat bahwa terdapat dua segmenatasi pasar dari dua kelompok masyarakat dengan latar belakang yang berbeda di dua wilayah basis masa di dua kecamatan ini. Seperti pada pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa kecamatan Pekalongan Selatan merupakan basis suara masyarakat NU. Hal tersebut dilihat sebagai sebuah peluang Bagi Balgis terlebih hadirnya sosok Mochammad Machrus sebagai calon kandidat Wakil Walikota semakin sesuai dengan segmentasi pasar di wilayah selatan. Menurut Muhammad Latief yang hadirnya Machrus sebagai wakil menjadikan mobilisasi suara dengan target adalah pemilih dari kalangan masyarakat kultural NU menjadi cukup signifikan bagi Balgis.

“Untuk diselatan dari timses kita sudah melakukan survey dan didapatkan bahwa di selatan itu kultur Nahdliyin itu kuat. terlebih hadirnya pak Machrus sebagai Kader PKB dan juga kader NU semakin menguatkan keyakinan masyarakat untuk memilih pasangan bu Balgis dan Pak Machurs. Karena perlu diketahui bahwa hampir keseluruhanya pondok pesantren di selatan itu podok pesantren Nahdliyin dan kita juga sudah

bersilaturahmi kepada para sesepuh pondok, kyai mulai dari tingkat kota hingga ke tingkat ranting. dan kita melihat ini sebagai peluang suara dan dukungan terutama yang sesuai dengan segmentasi warga Pekalongan Selatan yang merupakan warga Nahdliyin” (Wawancara dengan Muhammad Latief, 5 November 2020).

Muhammad Latief menambahkan bahwa kombinasi yang dibangun antara koalisi Golkar dan PKB dengan mengusung Balgis dan Machrus sudah disesuaikan sedemikian rupa dengan kebutuhan masyarakat pemilih. Latief menambahkan bahwa tim pemenangan di pekalongan selatan sudah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai Visi dan Misi pasangan Balgis dan Mchrus beserta program-program yang akan dibawanya disesuaikan dengan latar belakang kehidupan masyarakat yang memiliki kultur NU yang kuat di wilayah tersebut.

Berbeda dengan wilayah selatan, di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara pun memiliki segmentasi dan target masyarakat yang berbeda. Menurut hasil pemetaan wilayah yang dilakukan oleh tim pemenangan Balgis, di Wilayah Pekalongan utara, kebutuhan masyarakat atas penanganan bencana banjir rob masih menjadi isu utama. Seperti yang diketahui bahwa wilayah Pekalongan utara merupakan wilayah yang langsung berbatasan dengan laut jawa. Semakin naiknya permukaan air laut tak jarang wilayah Pekalongan Utara ini sering mengalami bencana banjir rob atau banjir yang disebabkan oleh naiknya permukaan laut. Akibat adanya bencana banjir rob ini pada akhirnya mengganggu mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat serta menghambat kinerja pemerintah (Mahsun, 2020).

Permasalahan lain yang dihadapi oleh warga masyarakat di wilayah Pekalongan Utara adalah mengenai permasalahan infrastruktur berkaitan dengan bencana penanganan banjir rob yang sering terjadi. Keberadaan infrastruktur drainase yang tidak berfungsi maksimal menyebabkan air rob tidak bisa tersedot. Hal ini karena drainase yang ada tertimbun dan tersumbat oleh sampah (lihat Mahsun dan Rofiq, 2020). Hal inilah yang semakin memperparah banjir rob yang terjadi di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Permasalahan ini dilihat oleh Balgis dan Tim Pemenangan sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat Pekalongan utara dengan memanfaatkan isu Banjir

Rob ini sebagai sebuah peluang untuk melakukan strategi berkampanye. Tim pemenangan di tingkat kecamatan diterjunkan ke wilayah-wilayah yang sering dilanda oleh banjir rob. Dari sinilah tim pemenangan balgis di kecamatan pekalongan utara mulai memetakan segmentasi permasalahan yang ada untuk kemudian memberikan bantuan kepada masyarakat di wilayah kecamatan Pekalongan Utara sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

M, Syakur sebagai salah satu tim pemenangan Balgis Diab di Wilayah Pekalongan Utara menjelaskan bahwa tim pemenangan sebelumnya sudah melihat segmentasi masyarakat yang terjadi di tiap –tiap wilayah. Ia menambahkan bahwa Isu yang bisa diangkat tiap-tiap wilayah juga berbeda. Dari segmentasi serta pengangkatan isu yang berbeda inilah menjadi dasar dari Tim Pemenangan untuk merancang sebuah strategi pendekatan kepada masyarakat di tiap wilayahnya. Untuk wilayah Pekalongan utara sendiri menurut syakur isu mengenai banjir rob ini menjadi isu yang utama. Banyak masyarakat di wilayah pekalongan utara yang menginginkan bantuan penanganan dampak bencana rob ini. Hal tersebut kemudian direspon oleh tim sukses Balgis untuk membuka tampungan aspirasi masyarakat Pekalongan Utara. Selanjutnya dari aspirasi masyarakat yang masuk kepada tim sukses tersebut akan diteruskan kepada calon tim pemenangan pusat untuk selanjutnya akan diberikan bantuan langsung ataupun tidak langsung.

“Tentunya pendekatan tim kepada masyarakat disesuaikan dengan wilayahnya ya mas, kalo pendekatan regilius itu kebanyakan di wilayah selatan karena memang di sana basisnya sedangkan kalau di utara ini pendekatannya lebih kepada menampung aspirasi masyarakat. Sesuai dengan isu di Pekalongan Utara ini kan banjir rob. Memang banyak masyarakat yang pada saat kita datang meminta bantuan kepada kita terutama untuk penanggulangan bencana rob ini dan kita tampung aspirasi mereka. Selanjutnya nanti kita laporkan kepada tim pusat dan kepada ibu untuk selanjutnya diberikan bantuan sesuai dengan aspirasi mereka. Bantuan ini biasanya akan diberikan melalui dewan atau ketika nanti apabila ibu menjadi walikota” (Wawancara dengan M.Syakur, 4 November 2020).

Khusus di wilayah Pekalongan Utara mesin-mesin politik partai Golkar sendiri sudah bekerja jauh sebelum tim pemenangan balgis terbentuk. Pekalongan utara merupakan basis suara partai Golkar di Kota Pekalongan. Hal ini diperkuat

dengan fakta bahwa Kecamatan Pekalongan utara merupakan Dapil yang menghantarkan Balgis memperoleh kemenangan pada pemilu legislatif di tahun sebelumnya, sehingga mempermudah mesin-mesin politik Balgis khususnya dari partai golkar lebih mudah untuk memetakan segmentasi masyarakat di wilayah ini.

Terjadinya bencana rob yang melanda wilayah Kecamatan Pekalongan utara membuat sebagian besar infrastruktur yang ada di masyarakat menjadi rusak. Salah satu yang paling nyata terlihat adalah rusaknya sebagian besar aspal jalan yang terendam dan tergerus oleh air rob tersebut. mesin-mesin partai golkar melalui anggota-anggota DPRD yang berasal dari dapil utara memberikan bantuan. Salah satu yang berperan dalam bantuan tersebut adalah Balgis Diab sebagai ketua DPRD yang juga merupakan kader Partai Golkar. Bantuan yang diberikan para kader golkar di DPRD berupa lobby anggaran kepada pemerintah untuk dialokasikan dalam proyek pengecoran jalan di wilayah kecamatan Pekalongan utara dan hal ini berhasil dilakukan. Dari sinilah kiprah dan sepak terjang partai Golkar sudah dirasakan oleh masyarakat di wilayah Pekalongan Utara sejak sebelum masa Pilkada dimulai.

Kuatnya pengaruh Golkar di Kecamatan Pekalongan utara ini pada akhirnya berdampak positif pada meningkatnya elektabilitas Balgis Diab yang maju sebagai calon kandidat Walikota pada kontestasi Pilkada Kota Pekalongan. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Sri Hadi Eko yang merupakan sekretaris tim pemenangan Balgis di Pekalongan utara. Eko mengatakan bahwa kiprah bu Balgis dan partai Golkar kepada masyarakat terutama masyarakat di wilayah kecamatan Pekalongan Utara sejak lama. Dengan demikian tidak sulit bagi mesin-mesin politik partai Golkar memberikan pengaruh dan memobilisasi suara masyarakat di wilayah Pekalongan Utara untuk mendukung Balgis Diab.

“Jadi sebetulnya kami sudah banyak berkiprah, tidak hanya ketika pada proses Pilkada seperti ini. Mungkin panjenengan sudah tau kiprah kami di masyarakat di dalam pemenuhan aspirasi masyarakat di wilayah Pekalongan utara ini. Baik itu melalui program-program dikelurahan, maupun di kecamatan dan juga program-program pemerintah

daerah. termasuk dalam hal ini bantuan pengecoran jalan yang rusak karena rob itu juga kami yang membawa aspirasi masyarakat ini di dewan sehingga turun bantuan untuk pengecoran jalan. Itu yang kami lakukan jauh sebelum Pilkada jadi kami sudah banyak memberikan bantuan kepada masyarakat. Nah apalagi sekarang selama proses mendekati Pilkada jadi kami sudah tidak terlalu sulit untuk mendekati masyarakat” (Wawancara dengan Sri Hadi Eko, 3 November 2020).

Pendapat lain disampaikan oleh Azmi Basyir Syawie selaku ketua tim pemenangan Balgis di Kecamatan Pekalongan utara. Menurut Azmi strategi yang dilakukan oleh para tim pemenangan di dalam memahami segmentasi yang ada melalui isu-isu yang dibicarakan masyarakat bawah dapat dijadikan sebagai strategi pendekatan signifikan kepada masyarakat. Azmi memandang bahwa strategi tim pemenangan dalam rangka mobilisasi suara masyarakat akan lebih berdampak positif apabila tim memahami isu yang terjadi di masyarakat.

“Tim kita bekerja, melihat kesempatan yang ada dengan memperhatikan isu-isu yang beredar dari mulut ke mulut di kalangan masyarakat. Seperti di utara kita menghadapi bencana rob kan seperti itu. Karena dari isu-isu tersebut tim bisa merumuskan strategi-strategi baru yang kita konversikan kedalam program-program yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat. Jadi banyak inisiatif-inisiatif yang bagus dari tim kita untuk menangkap isu-isu tersebut sehingga bisa memobilisasi suara masyarakat tersebut nantinya” (Wawancara dengan Azmi Basyir, 17 November 2020).

Azmi juga menambahkan bahwa melalui pemahaman isu-isu yang diangkat langsung dari masyarakat, menjadikan tim pemenangan lebih mudah dalam menentukan strategi pendekatan dalam suatu wilayah tersebut. Segala macam bentuk aspirasi yang disampaikan masyarakat mampu dikonversi tim pemenangan sebagai sebuah program kampanye yang ditawarkan kembali kepada masyarakat. Pendekatan kepada masyarakat melalui penawaran program-program kampanye yang notabene diangkat dari aspirasi masyarakat sendiri menjadikan strategi untuk memobilisasi suara menjadi lebih komprehensif dan efisien.

2. Positioning Politik Tim Pemenangan Balgis Diab

Setelah melakukan upaya untuk mengidentifikasi serta memetakan struktur yang sesuai dengan karakteristik masyarakat melalui strategi Segmentasi dan targeting politik, pada tahap selanjutnya tim kampanye akan melakukan strategi

lanjutan yakni melalui positioning politik (Firmanzah, 2008). Positioning politik sendiri memiliki merupakan aktifitas yang dilakukan untuk memberikan gambaran kepada para konstituen agar konstituen mampu membedakan produk yang dihasilkan dari organisasi politik yang bersangkutan seperti yang ditulis oleh Rise dan Trout (1981) (lihat Firmanzah, 2011). Dalam kata lain Positioning politik merupakan upaya yang dilakukan oleh Calon kandidat ataupun tim pemenangan suatu kandidat untuk menciptakan sebuah image yang mencirikan sebuah produk politik yang diproduksinya sesuai dengan segmentasi dari masyarakat. Hal ini menjadi lazim digunakan dalam kontestasi Pilkada oleh seorang calon kandidat ataupun tim sukses dengan tujuan masyarakat mampu membedakan citra yang ditampilkan antara calon kandidat satu dengan calon kandidat lainnya melalui image, produk, pesan serta program kerja yang dimunculkan (Suherman dan Mansur, 2018)

Setelah berhasil memetakan potensi wilayah dan juga melihat segmentasi yang ada, tim pemenangan Balgis segera berkoordinasi untuk melakukan strategi *positioning* dalam rangka menciptakan produk-produk politik yang akan dijadikan sebagai sebuah “*barang dagangan*” di dalam melakukan kampanye kepada masyarakat. Pasangan Balgis dsan Machrus yang diusung oleh Partai Golkar dan PKB merupakan pasangan calon yang mengusung image sebagai pasangan yang nasionalis dan agamis. Hal ini bukanlah tanpa tujuan, hadirnya pasangan Balgis dan Machrus yang di image kan sebagai pasangan Nasionalis Agamis merupakan sebuah strategi positioning yang dilakukan oleh tim pemenangan Balgis untuk menarik simpati dari masyarakat di Kota Pekalongan. Dengan melihat struktur masyarakat Kota Pekalongan yang multi etnis dan agama, pengusungan image sebagai pasangan nasionalis dan agamis diharapkan mampu menampung aspirasi seluruh aspirasi wara Kota Pekalongan dari kalangan lintas etnis dan lintas budaya.

Menurut Myhammad Syakur Koalisi Golkar dan PKB merupakan formula yang pas apabila disesuaikan dengan struktur masyarakat kota pekalongan yang nasionalis dan agamis. Hal iini semakin diperkuat setelah tim pemenangan

memetakan basis kekuatan yang meliputi wilayah Palongan utara dan juga Palongan selatan yang memiliki basis masa dengan kultural berbeda. Selanjutnya dari positioning tim sukses membangun strategi untuk mengkombinasi image keduanya dalam bentuk program kerja dan strategi kampanye dari pasangan balgis-machrus. Hal ini seperti yang disebutkan dalam kutipan wawancara kepada Muhammad Syakur sebagai berikut :

“Disini pencalonan Bu Balgis dan Pak Machrus ini merupakan komposisi yang berimbang. Dari sisi nasionalisnya kita tau sepak terjang bu balgis dengan golarnya seperti apa, kemudian dari segi religiusnya juga bu balgis dapat kan. Begitupuka dengan pak Machrus dengan background santri nya dan juga kultur NU nya juga kental sekali sehingga bersatunya kalangan nasionalis dan religius yang ada pada keduanya saya rasa kombinasi yang pas. Hal ini sehingga bagi kita sebagai tim bisa mempermudah dalam penyusunan program untuk kesejahteraan seluruh warga masyarakat Kota Pekalongan Seperti tag line kita yakni untuk kemajuan Kota Pekalongan Yang Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur” (Wawancara dengan M. Syakur, 4 November 2020).

Dalam hal ini Syakur Menambahkan bahwa strategi lanjutan yang dilakukan oleh tim pemenangan Balgis adalah membuat manuver sebagai sebuah strategi politik yakni dalam bentuk berkunjung atau Sowon ke kediaman para ulama dan kyai yang berpengaruh di Kota Pekalongan. Hal ini dimaksudkan sebagai sebuah strategi untuk menjciptakan image branding bahwa pasangan Balgis-Machrus sudah merupakan kolaborasi yang religius dan juga sudahmendapatkan restu dari para ulama dan Kyai. Pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia juga berdampak pada penerapan strategi kampanye yang dilakukan tim pemenangan Balgis. mereka mensiasati dalam kunjungan untuk sowan kepada para Kyai dan Ulama ini dilakukan secara begantian baik untuk Balgis dan juga Machrus. Menurut Syakur dengan penerapan strategi ini menjadi lebih efisien dan juga kinsentrasi masa tidak bertumuk di satu titik. Karena memang di dalam aturan kampanye yang terbaru tidak diperkenankan untuk menimbulkan kerumunan sebagai bentuk penerapan protokol kesehatan. Selain itu dengan jumlah Kyai dan Ulama yang banyak di Kota Pekalongan, membuat strategi ini lebih efisien karena dapat menjangkau keseluruhan kediaman Kyai dan Ulama yang menyebar di berbagai tempat denganwaktu secara bersamaan.

Selain melakukan sowan kepada Kyai dan Ulama, untuk semakin memperkuat image Balgis sebagai pemimpin yang Nasionalis dan Religius Balgis dan tim pemenangan menyusun program-program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas pusat-pusat pendidikan berbasis Islam Seperti TPQ, Pondok Pesantren dan Madrasah-madrasah serta yayasan-yayasan pendidikan terkait yang ada dan hal ini termasuk juga peningkatan kualitas kesejahteraan guru honorer dan juga guru madrasah di Kota Pekalongan. Implementasi nyata ini tertuang dalam 20 program unggulan yang ditawarkan Balgis kepada para pemilihnya.

“Ya sowan kepada kyai dan ulama itu memang kita lakukan kemudian kita juga membuat program untuk mensejahterakan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren dan juga TPQ. Selain itu juga ini fokus ingin meningkatkan kualitas guru-guru honorer dan guru-guru madrasah jadi program pembangunan kualitas kesejahteraan untuk guru honorer dan madrasah itu juga masuk ke dalam program” (Wawancara dengan Muhammad Syakur, 4 November 2020)

Selain strategi membangun image sebagai pribadi yang dekat dengan kalangan religis seperti Kyai dan Ulama, tim pemenangan balgis juga melakukan strategi positioning lain yakni dengan memunculkan sosok Balgis sebagai pribadi yang dekat dengan masyarakat hal tersebut dilakukan tim pemenangan balgis dengan melakukan kampanye langsung dengan mendatangkan Balgis ke beberapa wilayah pemukiman masyarakat. Selain mendatangkan sosok Balgis secara langsung ke masyarakat, tim balgis gencar membangun narasi bahwa Balgis merupakan sosok yang memahami betul aspirasi aspirasi yang diberikan oleh masyarakat. Namun tidak hanya sampai disitu saja, pembangunan image Balgis sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat di implementasikan oleh Balgis dan Tim kedalam program-program kerja yang pro terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai sektor mulai dari sektor ekonomi, sosial, dan juga kesehatan.

Seperti yang disampaikan oleh Dwi Heri, bahwa sosok Balgis yang sudah familiar di kalangan masyarakat Kota Pekalongan menjadikan Balgis mudah masuk dan diterima diseluruh lapisan masyarakat. Dari situlah tim pemenangan

mampu menyusun program-program kerja dan kebijakan yang akan dilakukan oleh Balgis apabila ia terpilih menjadi Walikota Pekalongan di tahun 2020.

“Selain menyusun program-program yang memiliki nilai-nilai pendekatan kepada religiusitas, selain itu kami juga menyusun program-program prioritas yang kami tawarkan kepada warga terutama program yang pro terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada saat itu juga kami melakukan pengenalan sosok dari Bu Balgis dan Pak Machrus ini seperti apa kepada masyarakat. Kalau kita ketahui kan ibu Balgis itu merupakan sosok yang sudah dikenal kiprahnya di masyarakat, nah dari situ kita semakin tingkatkan lagi kampanye kepada masyarakat bahwa bu Balgis merupakan sosok yang sangat peduli dengan masyarakat dan itu kami jadikan ke dalam program yang kami tawarkan kepada masyarakat” (Wawancara dengan Dwi Heri Wibawa, 6 November 2020).

Pendapat Heri ini diperkuat oleh Basyir Ahmad yang mengatakan bahwa masyarakat Kota Pekalongan sudah sejak lama mengenal sosok dan kiprah dari seorang Balgis dan secara tidak langsung menurut Basyir, image Balgis sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat terbangun dengan sendirinya di kalangan masyarakat. Hal inilah yang menjadi dasar bagi tim sukses untuk menyusun program-program yang akan dapat meningkatkan lagi elektabilitas Balgis di masyarakat dengan program-program yang pro dengan kesejahteraan masyarakat. Basyir mengklasifikasikan program unggulan Balgis menjadi kedalam tiga klasifikasi yakni Kesejahteraan Pendidikan, Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi dan Kesejahteraan Kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Selain kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Basyir menambahkan bahwa Balgis dan tim pemenangnya juga menyusun program-program yang berkaitan dengan perbaikan tata kelola birokrasi pemerintahan. Basyir menganggap bahwa kedekatan dengan masyarakat perlu di imbangi dengan strategi tata kelola pemerintahan yang baik sehingga pendekatan program yang dilakukan oleh Balgis dan tim suksesnya meliputi kedua hal tersebut.

“ Berbicara mengenai sepak terjang nya di masyarakat, kita sudah tau kiprah ibu seperti apa dan saya rasa masyarakat pun juga sudah tau akan tetapi kita tetap atur strategi tersebut ke dalam Visi dan Misi yang kita bangun. Visi dan misi kan intinya kebutuhan dasar masyarakat itu apa dan

ditambah tugas-tugas birokrasi yang akan dilakukan sebagai Walikota nanti. Nah kebutuhan dasar masyarakat yang kita jadikan visi dan misi kita itu ada tiga. Yang pertama bagaimana ekonominya supaya tidak miskin, yang kedua kesehatannya terjamin dan yang ketiga pendidikan nya terjamin. Hal ini ditambah pula dengan visi misi pemerintahan yakni bagaimana birokrasinya berjalan, kemudian perijinan tak lupa juga di masalah lingkungan itu juga kita angkat sebagai program” (Wawancara dengan Basyir Ahmad, 18 November 2020).

Dari penjelasan Basyir Ahmad, strategi positioning yang dilakukan untuk membangun image seorang Balgis merupakan sosok yang dekat dengan Masyarakat di implementasikan oleh Balgis dan Tim pemenangnya kedalam Visi dan Misi pencalonan. Adapun penjabaran program-program unggulan sebagai implementasi visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi
 - a. Membangun Kembali Pasar Induk Banjarsari sebagai penggerak perekonomian masyarakat
 - b. Mendorong pertumbuhan UMKM dengan menjamin ketersediaan bahan baku, ditunjang dengan peningkatan kualitas produksi, fasilitas kebutuhan permodalan dan hak paten serta menambah jaringan pasar
 - c. Penguatan kelembagaan ,pemberdayaan perempuan dan partisipasi masyarakat
2. Bidang Pembangunan Infrastruktur
 - a. Mendorong Pemerintah Pusat untuk membangun pelabuhan perikanan onshore di pantai slamaran untuk menunjang program optimalisasi potensi perikanan tangkap dan budidaya
 - b. Membangun fasilitas sarana dan prasarana penanggulangan banjir, rob serta melakukan revitalisasi drainase secara komprehensif dan berkelanjutan
 - c. Mendorong dan memfasilitasi pembangunan jalur lingkar utara (JALINGKUT)

- d. Pengembangan infrastruktur, sarana prasarana dan sistem pendukung Ilmu Pengetahuan dan teknologi Informasi secara terintegrasi.
 - e. Membangun kembali fasilitas olahraga seperti kolam renang, menata dan membenahi stadion Hogeng dan menata kembali lapangan Sorogenen sebagai ruang publik
3. Bidang Kesehatan dan lingkungan
- a. Meningkatkan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu, perlindungan ibu hamil dan anak serta lanjut usia
 - b. Mengoptimalkan upaya pencegahan , pengendalian dan penanganan penyakit menular khususnya Covid-19 dengan gerakan penerapan protokol kesehatan, testing, tracking dan treatment
 - c. Mewujudkan kebersihan sungai dari kotoran, sampah, dan pencemaran limbah
 - d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau
 - e. Penataan kawasan dan permukiman menuju kawasan bebas kumuh dan layak huni
4. Bidang Pendidikan
- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas TPQ Serta kesejahteraan guru Honorer, guru madrasah dan guru TPQ, pengasuh pondok pesantren termasuk juga takmir masjid dan mushala serta guru mengaji
 - b. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah membangun SMA Negeri di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat
 - c. Pemberian Bantuan bagi siswa dari kalangan keluarga kurang/ tidak mampu dan siswa beprestasi.

5. Bidang Birokrasi dan Pemerintahan

- a. Peningkatan kapasitas, kualitas, kecepatan dan kemudahan pelayanan perizinan usaha guna menambah investasi dalam rangka menambah lapangan pekerjaan baru
- b. Mewujudkan birokrasi yang melayani, disiplin, bersih dan efektif dengan penerapan teknologi informasi komunikasi (TIK) secara terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*Integrated e-Government*)

6. Bidang Kebudayaan dan Kesenian

- a. Peningkatan Penyelenggaraan event-event seni dan budaya yang berkembang di masyarakat dengan melibatkan komunitas-komunitas seni budaya sebagai sebuah daya tarik wisata

Strategi positioning selanjutnya yang dilakukan tim pemenangan Balgis adalah dengan menguatkan relasi dengan seluruh lapisan masyarakat Kota Pekalongan yang multietnis. Balgis dan tim pemenangannya membangun sebuah strategi untuk membangun jaringan relasi dengan etnis etnis lain di Kota Pekalongan. Hal ini dilakukan dengan meyakinkan kepada masyarakat dari etnis-etnis lain yang ada di Kota Pekalongan bahwa Balgis akan mengakomodir segala macam aspirasi dan masukan dari masyarakat lintas etnis di Kota Pekalongan. hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Basyir Ahmad. Menurut Basyir relasi yang telah terjalin dengan etnis-etnis lain seperti etnis Arab, Jawa dan China pada saat basyir masih menjadi Walikota akan tetap dijalin dengan baik oleh Balgis. adapun strategi yang dilakukan oleh tim pemenangan Balgis untuk memobilisasi suara dari etnis-etnis masyarakat adalah dengan mendirikan posko-posko pemenangan di wilayah-wilayah etnis tersebut tinggal. Hal ini dilakukan karena pendekatan yang bisa dilakukan untuk memobilisasi suara dari golongan suatu etnis masyarakat tertentu adalah dengan memanfaatkan tokoh-tokoh etnis itu sendiri.

“Kita tetap datang kepada teman-teman dari etnis-etnis lain seperti etnis Arab dan Etnis Tionghoa dan kita mendirikan posko-posko pemenangan di kawasan pemukiman masyarakat etnis tersebut. jadi kita sudah pengalaman bahwa orang-orang etnis Arab dan orang tionghoa tidak mau

masuk ke dalam tim pemenangan. Namun kita menempatkan orang-orang kita disana. Jadi strategi kita adalah memanfaatkan tokoh-tokoh dari kalangan mereka sendiri untuk menarik suara masyarakat. Yang bisa memengaruhi etnis Tionghoa ya orang-orang tionghoa sendiri dan yang bisa mempengaruhi orang arab adalah orang-orang arab sendiri” (Wawancara dengan Basyir Achmad, 18 November 2020).

Basyir menambahkan bahwa suara dari etnis-etnis lain seperti etnis Tionghoa dan etnis Arab merupakan target yang penting, karena masyarakat dari kedua etnis tersebut memiliki masa yang besar selain dari etnis Jawa sendiri. Oleh karena itu penyusunan strategi kampanye kepada etnis-etnis ini adalah membangun forum komunikasi antar etnis sebagai wadah penyampaian aspirasi etnis-etnis tersebut.

Strategi positioning selanjutnya yang digunakan oleh tim pemenangan Balgis adalah dengan membangun image bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin. Majunya Balgis Diab dalam kontestasi Pilkada sebagai calon kandidat Walikota merupakan yang pertama dalam sejarah Kota Pekalongan. Karena hal ini menjadi hal yang baru bagi Kota Pekalongan oleh karenanya baik Balgis maupun tim pemenangan fokus pada hal ini. Tim pemenangan Balgis melihat fenomena ini dalam dua dimensi yakni menjadi sebuah peluang dan juga menjadi sebuah tantangan. Pencalonan Balgis dilihat sebagai sebuah peluang apabila dilihat bahwa apabila Balgis memenangkan kontestasi pilkada maka ada sejarah baru bagi Kota Pekalongan karena untuk pertama kalinya Kota Pekalongan akan memiliki seorang Walikota Perempuan pertama. Selain itu peluang lain yang ditangkap oleh tim sukses apabila Balgis menang adalah akan adanya inovasi kebijakan. Balgis akan berpeluang menciptakan kebijakan-kebijakan baru sekaligus juga memungkinkan untuk memunculkan kembali kebijakan-kebijakan populis yang dulu sempat menjadi kebijakan di Basyir Ahmad. Adapun tim pemenangan juga melihat ini sebagai tantangan dikarenakan majunya Balgis sebagai calon kandidat perempuan pertama tentu membutuhkan strategi tambahan guna semakin memantapkan masyarakat calon pemilih untuk memilihnya. Dengan melihat peluang dan tantangan tersebut pada akhirnya tim pemenangan balgis melakukan

terobosan strategi untuk meyakinkan masyarakat agar masyarakat memilih Balgis di Pilkada nanti.

Heri dwi wibawa menjelaskan bahwa dalam menghadapi hal ini, tim pemenangan Balgis telah mengambil persiapan dari jauh-jauh hari. Menurut Heri strategi yang disusun tim pemenangan adalah dengan mengambil langkah edukasi persuasif kepada masyarakat. Tim pemenangan Balgis yang tersebar di seluruh wilayah Kota Pekalongan mulai dari tim pusat hingga tim RT melakukan kampanye dengan mengedukasi masyarakat bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam politik dan memiliki kapasitas yang setara untuk menjadi seorang pemimpin. Namun menurut Heri, strategi ini merupakan strategi yang menjadi satu kesatuan integral dengan strategilainya. Dari pernyataan Heri ini, peneliti melakukan analisa bahwa yang dimaksud sebagai sebuah strategi yang menjadi satu kesatuan integral dengan strategi lainnya adalah bahwa kampanye image branding mengenai sosok pemimpin perempuan haruslah disandingkan dengan fakta-fakta penguatan yang ada.

Fakta-fakta penguatan yang menjadi kunci utama suksesnya strategi ini adalah yang pertama dengan membangun image bahwa pencalonan Balgis Diab sebagai seorang calon kandidat walikota perempuan pertama direstui oleh ulama-ulama di Kota Pekalongan. Kunjungan Balgis dan tim sukses ke kediaman para Kyai dan Ulama bukan hanya semata-mata memohon doa restu dan dukungan saja akan tetapi juga untuk mendapatkan fatwa bahwa majunya perempuan sebagai seorang pemimpin itu diperbolehkan dalam Islam. Dengan fatwa inilah tim pemenangan balgis mulai melakukan kampanye edukatif kepada masyarakat bahwa memilih perempuan sebagai seorang pemimpin daerah adalah diperbolehkan. Dengan menggunakan strategi edukatif ini tim pemenangan balgis mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan suaranya kepada Balgis.

Fakta penguatan kedua adalah sepak terjang Balgis yang berpengalaman di dalam pemerintahan. Ini juga digunakan oleh tim pemenangan Balgis untuk meyakinkan masyarakat bahwa kapasitas dan kemampuan Balgis di dalam politik

dan pemerintahan tidak diragukan lagi. Tim pemenangan kembali melakukan kampanye persuasif dengan menggunakan strategi ini kepada masyarakat. Bahkan Tim Pemenangan menjadikan kapasitas dan kemampuan Balgis dalam pemerintahan sebagai jargon kampanye. Jargon kampanye yang bertuliskan “*Wadon Dudu Pawon, Wadon Biso Lakon*” atau yang memiliki makna seorang perempuan bukan hanya di dapur tetapi perempuan juga bisa menjadi seorang lakon (Pemimpin), menjadi jargon yang cukup ampuh untuk menggaet suara masyarakat. Heri menambahkan dua fakta penguatan ini disempurnakan oleh tim pemenangan dengan menyusun program-program unggulan sebagai implementasi dari Visi dan Misi Balgis sebagai daya jual yang diberikan kepada masyarakat terutama bagi kalangan perempuan. Hal ini di implementasikan Balgis dan tim pemenangnya dengan melakukan kunjungan-kunjungan kepada organisasi-organisasi pemberdayaan perempuan seperti Fatayat, Aisyiah Himpaudi dan lain sebagainya.

“ Secara internal tim pemenangan kita menyusun strategi untuk melakukan pendekatan kepada organisasi-organisasi pemberdayaan perempuan. Mengingat secara kuantitas jumlah masyarakat perempuan itu lebih banyak sehingga dukungan dari suara masyarakat perempuan sangat dibutuhkan” (Wawancara dengan Heri Dwi Wibawa, 6 November 2020).

Dengan melakukan strategi demikian Balgis tidak hanya menunjukan terpenuhinya *Affirmative Action* perempuan sebagai eksistensi perempuan di dalam politik saja akan tetapi menjunjung harkat dan martabat dari pemilih perempuan dengan membuat program-program yang pro terhadap peningkatan kesejahteraan perempuan. Dengan hadir nya Balgis sebagai calon kandidat Walikota di dalam kontestasi Pilkada secara tidak langsung menunjukan kapasitas perempuan sebagai pelengkap saja akan tetapi perempuan juga mampu menunjukan kiprahnya dalam posisi-posisi strategis di ranah perpolitikan yang selama ini di dominasi oleh kaum laki-laki.

3. Pendataan Konstituen

Setelah pemetaan wilayah untuk mengukur potensi suara dilakukan, tim pemenangan Balgis segera melakukan koordinasi untuk menjalankan strategi selanjutnya yakni melakukan pendataan kepada masyarakat yang berada di wilayah basis kekuatan tersebut. Tim pemenangan di tingkat akar rumput ini dapat dikatakan pula sebagai seorang Broker politik yang langsung menjadi penghubung antara calon yakni Balgis Diab dengan para pemilih. Seperti yang disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, tim pemenangan Balgis di tingkat akar rumput yang disebut “Pecut” ini bertugas untuk mempengaruhi masyarakat sehingga dapat memberikan suaranya kepada Balgis dalam kontestasi Pilkada Kota Pekalongan. Para Pecut mempromosikan Balgis di struktural terkecil masyarakat yakni di wilayah RW dan RT. Para pecut ini sebagai broker politik bekerja dengan motivasi imbalan materi dan selain itu apa yang dikerjakan merupakan salah satu strategi yang disusun oleh struktural tim pemenangan di tingkat atasnya dimana memang para broker ini bekerja untuk melakukan distribusi material dari Calon kandidat kepada para pemilih (Darwin, 2017).

Setelah melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang menjadi basis suara, tim pemenangan Balgis selanjutnya melakukan pendataan terhadap masyarakat calon pemilih dalam satu wilayah yang telah dipetakan. Para tim pecut Balgis di tingkat RT dan RW sebelumnya telah membuat semacam daftar nama-nama warga masyarakat dalam satu wilayah lingkup RT/RW. Daftar ini disusun oleh para tim pecut dengan melalui dua proses, yakni yang pertama dipetakan terlebih dahulu siapa-siapa saja masyarakat yang berpotensi untuk memberikan dukungan suaranya atau kedua juga bisa dilakukan secara langsung dan menyeluruh. Pendataan ini dilakukan tim pecut dengan melalui sistem pintu ke pintu. Hal ini seperti yang dijelaskan langsung para tim pecut Balgis diab sebagai berikut:

“ Kita sebagai tim sukses atau disini biasanya disebut Pecut bekerja dalam satu jaringan. Setiap jaringan ini dikomndaoi oleh pelaksana kelurahan atau PL yang menaungi satu RW dan beberapa RT dan tiap RT itu pecutnya satu sampai dua orang bahkan ada yang sampai lebh dari dua

orang. Nah strategi yang dilakukan itu kita dari pintu ke pintu. Kita sebelumnya sudah membuat daftar data pemilih di lingkup satu RT tersebut selanjutnya kita datangi satu persatu. Bilamana seorang konstituen atau pemilih itu berminat untuk mendukung bu Balgis ya kita akan data dan kita akan data dan kita akan minta fotokopi KTP nya selain itu dimintai tandatangan sekaligus sebagai penjamin bahwa konstituen tersebut akan mendukung Ibu di Pilkada nanti. Nah setelah itu data tersebut kita serahkan ke pelaksana kecamatan untuk selanjutnya diteruskan ke tim pusat” (Wawancara dengan Imam Suwongso, 2 November 2020).

Tim pemenangan Balgis di tingkat akar rumput bekerja secara sistematis. Seperti apa yang disampaikan oleh Imam Suwongso selaku salah satu tim pemenangan di tingkat kelurahan bahwa tim pemenangan akar rumput bekerja secara jaringan. Setiap jaringan berkoordinasi dengan struktural di atasnya untuk meleakaukan pendataan pemilih guna melakukan mobilisasi suara pemilih untuk mendukung pencalonan Balgis dalam Pilkada.

Sistem seperti ini memang sangat sering dijumpai dalam kontestasi pemilihan umum. Dimana jumlah masyarakat yang sangat besar ditambah dengan pembagian administratif wilayah suatu daerah yang berbeda-beda membuat seorang calon akan membutuhkan para broker ini sebagai jaringan perantara (Aspinall dan Berenschot, 2019). Para broker akan bekerja untuk menghubungkan pemilih dengan calon kandidat. Dalam hal memobilisasi suara, para broker ini akan melakukan pendataan di tingkat struktural paling dasar seperti RT dan RW. Pendataan dilakukan dengan mencatat identitas dari calon pemilih atau dalam praktiknya biasanya para calon pemilih ini akan dimintai fotokopi KTP sebagai bukti. Selain pendataan dan penyerahan identitas diri dari calon pemilih, pemetaan pemilih juga dilakukan dengan memberikan tanda berupa stiker atau gambar calon pada rumah-rumah calon pemilih tersebut sebagai bagian dari strategi pemetaan pemilih (Triantini, 2015). Setelah broker melakukan pendataan, selanjutnya daftar data calon pemilih ini akan digunakan oleh para broker untuk menyalurkan barang balas jasa atau yang dikenal sebagai *Patronage good* dari calon kandidat kepada masyarakat. Setelah melakukan jual beli suara dengan memberikan barang patronase baik berupa barang ataupun uang, pada broker akan melanjutkan

mobilisasi suara masyarakat pada proses kampanye dan mengawalnya hingga pada saat hari pemilihan. Broker disini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa para calon pemilih yang telah didata tadi hadir pada hari pemilihan untuk memberikan suaranya kepada calon kandidat yang diusung (Aspinall dan Berenschot, 2019).

C. Analisis Gagalnya Strategi Elektoral Balgis Diab dalam Mobilisasi suara masyarakat

Fenomena pemilihan kepada daerah selalu memiliki suatu hal yang menarik untuk dikaji. Hal ini didasari karena proses pilkada itu sendiri merupakan salah satu proses penting sebagai sebuah proses demokrasi guna menentukan pemerintahan di tingkat lokal. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi proses dalam dinamika pilkada yang terjadi di tiap-tiap daerah. beberapa diantaranya seperti dinamika partai politik pengusung, koalisi antar partai politik, calon yang diusung dan yang paling penting adalah strategi yang digunakan untuk memenangkan kontestasi pilkada tersebut. pada dasarnya strategi politik elektoral dibangun oleh seorang kandidat memang semata-mata untuk memperoleh kemenangan pada kontestasi pemilu yang di ikuti.

Strategi elektoral sebagai sebuah strategi pemenangan seorang kandidat dalam kontestasi pilkada juga dibangun dengan mempertimbangkan banyak faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya seperti popularitas calon kandidat, mesin politik, jaringan sosial, modal dan lain sebagainya. Fenomena ini tentunya semakin menarik ketika di dalam suatu kontestasi pilkada muncul seorang calon kandidat yang merupakan seorang perempuan. Fenomena ini didasari karena partisipasi perempuan dalam politik masih terhitung belum signifikan. Majunya calon kandidat perempuan ini menarik. Hal ini karena pada dasarnya pelaksanaan Pilkada ini sebagai sebuah kontestasi demokrasi yang secara substantif memberikan kesempatan yang sama bagi kandidat baik laki-laki maupun perempuan untuk mengikuti proses pilkada ini. Selain itu munculnya seorang kandidat perempuan dalam pilkada juga membawa suatu pertanyaan menarik yakni bagaimana calon kandidat perempuan tersebut menggunakan strategi

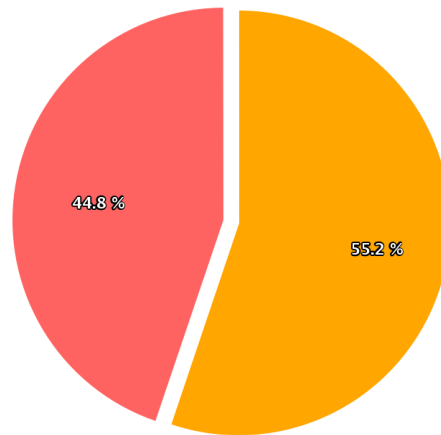
elektoralnya sebagai modal untuk membangun mesin politik dan memobilisasi suara masyarakat pemilih.

Majunya Balgis Diab di dalam kontestasi Pilkada menjadi hal yang baru pertama kali terjadi dalam dinamika politik elektoral Kota Pekalongan. Sosok tokoh populis dalam kiprahnya kepada masyarakat dan ditunjang dengan karir politiknya yang baik, membuat majunya Balgis dalam kontestasi Pilkada sebagai calon kandidat walikota mendapatkan respon positif dari banyak pihak. Hal ini ditunjang dengan didapatkannya dukungan mayoritas partai politik di DPRD kota Pekalongan membuat posisinya sebagai calon kandidat semakin kuat dan mantap. Dengan dukungan koalisi mayoritas partai di parlemen dan modal jaringan sosial yang dimiliki, Balgis segera membentuk mesin-mesin politiknya ke dalam suatu bentuk tim pemenangan di dalam Kontestasi Pilkada.

Pembentukan tim pemenangan yang terstruktur dan sistematis dari tingkat pusat hingga tingkat akar rumput semakin meyakinkan bahwa Balgis akan mampu membentuk strategi pemenangan yang tepat untuk memenangkan kontestasi Pilkada tahun 2020. Akan tetapi pada kenyataannya, Balgis yang mengalami kekalahan pada kontestasi Pilkada Kota Pekalongan 2020. Menurut hasil akhir rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU, pasangan Balgis-Machrus mengalami kekalahan dari pasangan Afzan-Salahudin. Pasangan Balgis-Machrus hanya mendapatkan suara sebanyak 76.916 suara dengan presentase sebesar 44,8% suara sementara itu pasangan Afzan-Salahudin mendapatkan sebanyak 94.971 suara dengan presentase 55,2% suara dari total suara sah yang keseluruhan berjumlah 171.887 suara. Hasil rekapitulasi pilkada Kota Pekalongan bahkan menunjukkan bahwa pasangan Balgis-Machrus mengalami kekalahan pada seluruh wilayah Kecamatan di Kota Pekalongan. Adapun data rekapitulasi perolehan suara dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 6.2

Diagram Presentase dan Tabel Perolehan Suara Pilkada Kota Pekalongan tahun 2020



● (01) H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE. – H. SALAHUDIN, STP.
 ● (02) Hj. BALGIS DIAB, SE, S.Ag, MM. – H. MOCH. MACHRUS, Lc, M.Si.

Wilayah	Afzan-Salahudin	Balgis-Machrus
Pekalongan Barat	29.641	24.073
Pekalongan Timur	21.908	17.047
Pekalongan Utara	23.818	19.840
Pekalongan Selatan	19.604	15.924

Sumber : Pilkada2020.kpu.go.id

Melihat hasil rekapitulasi suara tersebut, melakukan melakukan analisis lebih dalam untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kegagalan strategi elektoral yang dibangun oleh Balgis Diab. Dari pengamatan yang peneliti lakukan, peneliti melakukan klasifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan Balgis Diab dalam memobilisasi suara masyarakat dan peneliti menghasilkan bahwa terdapat 4 faktor utama yang mempengaruhi kegagalan mesin politik Balgis Diab dalam memobilisasi suara masyarakat. Penjabaran mengenai faktor-faktor tersebut akan dijabarkan dan di analisis dalam pembahasan pada bagian ini.

1. Permasalahan Internal Mesin politik Balgis Diab.

Analisa pertama mengenai faktor penyebab kegagalan Balgis dalam memobilisasi suara masyarakat diawali dengan analisa internal mesin politik Balgis sendiri. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Balgis membentuk jaringan struktur politiknya secara sistematis dari tingkat Kota hingga ke tingkat RT dan RW. Struktur jaringan mesin politik yang dibangun Balgis ini terdiri dari jaringan partai politik pengusung dan partai politik pendukung, jaringan keluarga dan kolega serta juga jaringan relawan akar rumput. Peneliti menemukan temuan menarik terkait analisa ini yakni bahwa tidak seluruh tim pemenangan merupakan tim yang solid mendukung Balgis Diab. Hal ini berdasarkan temuan hasil wawancara peneliti dengan beberapa orang tim pemenangan Balgis Diab di tingkat Kecamatan, Kelurahan, RT dan RW.

Dari hasil wawancara yang berhasil peneliti lakukan, peneliti mendapatkan temuan bahwa ketidak solidan tim pemenangan mesin politik Balgis dikarenakan pecahnya fusi dukungan tim pemenangan yang berasal dari simpatisan PKB dan juga kultural NU. Pada temuan ini, terdapat fakta yang menjelaskan bahwa terdapat perpecahan dukungan suara di internal simpatisan PKB dan kultural NU dikarenakan bahwa sosok Salahudin yang maju sebagai calon walikota dari pasangan pesaing Balgis merupakan salah satu tokoh pendiri PKB di Kota Pekalongan. Hal ini dikonfirmasi oleh salah satu relawan simpatisan Balgis Diab yang secara kebetulan tidak berkenan disebut namanya. Relawan tersebut menjelaskan bahwa terbelahnya dukungan suara kultural NU dan juga simpatisan PKB kepada Balgis Diab dikarenakan karena dua tokoh yang maju menjadi calon kandidat wakil walikota sama-sama merupakan kader NU dan juga merupakan tokoh yang sama sama lahir dari PKB. Meskipun secara dukungan kepartaian PKB memberikan rekomendasinya kepada Machrus, akan tetapi masyarakat kota Pekalongan tidak bisa melupakan bahwa sosok Salahudin. Salahuddin merupakan salah satu tokoh yang ikut mendirikan PKB di Kota Pekalongan sekaligus mantan ketua DPRD Kota Pekalongan periode 2004-2009.

“Tidak bisa dipungkiri kekalahan kita memang salah satu penyebabnya adalah kurang solidnya para relawan-relwan kita terutama dari simpatisan PKB dan masyarakat NU sendiri. Meskipun hal ini tidak bisa digeneralisasi akan tetapi saya akui memang terjadi perpecahan dukungan dari kalangan tersebut. tokoh Pendiri PKB terpecah jadi dua satu ada di Bu Balgis sebagai ketua pemenangan satunya lagi di kubu sebelah. In berpengaruh terhadap kurangnya suara yang masuk ke paslon 2. Ya tidak bisa memungkiri memang dia (Salahuddin) juga pernah menjabat jadi ketua DPRD ya mas sebelum bu balgis. jadi pengaruhnya itu masih ada” (Wawancara dengan salah satu relawan Balgis-Machrus, 14 Desember 2020).

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Nur (bukan nama sebenarnya), salah satu masyarakat NU yang berhasil peneliti wawancarai. Menurut Nur, memang secara struktural PKB mendukung Balgis akan tetapi tidak ada jaminan seluruh kader NU mendukung. Nur menambahkan bahwa yang melakukan pendekatan dengan kyai-kyai NU tidak hanya pasangan Balgis dan Machrus saja akan tetapi juga dilakukan oleh pasangan pesainya yakni Afzan-Salahudin. Salahudin yang juga merupakan calon wakil walikota yang mendampingi Afzan juga merupakan kader NU dan juga merupakan salah satu pendiri PKB di Kota Pekalongan. Dengan alasan ini lah, pasangan Afzan dan juga Salahudin sebagai penantang pasangan Balgis Machrus juga melakukan strategi yang sama yakni dengan pendekatan kepada Kyai dan Ulama NU untuk memperoleh dukungan dalam pilkada.

“ Nah gini mas, sebenarnya itu yang sowan ke kyai-kyai NU bukan hanya Balgis-Machrus saja akan tetapi Afzan-Salahudin juga. Kita tau bahwa terdapat dua kader NU di masing-masing paslon. Mas Machrus di paslon nomor dua dan ada Pak Salahudin di Paslon nomor satu sehingga ini ya jelas membuat suara terbagi. Terlebih lagi pak salahudin dahulunya ikut mendirikan PKB itu juga mungkin yang jadi pengaruh di masyarakat simpatisan PKB. Meskipun tidak didukung oleh struktural partai akan tetapi ya karna sesama NU mungkin jadi tetap berpengaruh menurut saya” (Wawancara dengan Pak Nur (bukan nama sebenarnya), 16 Desember 2020).

Selain karena hal tersebut. peneliti kembali melakukan penggalian data kembali untuk menemukan penyebab-penyebab lain pecahnya suara masyarakat NU yang menjadi salah satu faktor kekalahan Balgis di Pilkada 2020. Peneliti menemukan hasil bahwa selain Salahuddin , terdapat tokoh Kyai NU yang cukup berpengaruh akan tetapi tidak memberikan dukungannya kepada pasangan Balgis.

Tokoh yang dimaksud merupakan tokoh forum kerukunan umat beragama di Kota Pekalongan. Menurut Syakur , sangat disayangkan ketika seorang tokoh ini tidak memberikan dukungannya kepada Balgis sehingga, secara langsung ataupun tidak langsung hal ini berpengaruh terhadap perolehan suara Balgis.

“Nah ini sedikit menyinggung ke paslon sebelah, jadi gini tokoh ini sangat disayangkan, karena malah dari awal ini malah mendukung dan berjalan di paslon satu. Jadi seperti saya ini yang termasuk salah satu kultural NU juga sangat menyayangkan akan hal ini. Tokoh ini lah yang membawa paslon satu untuk sowan ke kyai-kyai NU. Nah akhirnya kita dari kalangan PKB seperti merasa rumah kita Nahdlatul Ulama itu seperti diacak-acak suaranya dan itu berpengaruh mas terhadap nantinya terhadap perolehan suara” (Wawancara dengan Syakur, 4 Desember 2020).

Permasalahan kurang solidnya mesin politik dalam mendukung pencalonan Balgis juga sempat diungkap oleh Basyir Achmad. Menurut Basyir kurang solidnya mesin politik PKB sudah dilihat Basyir sejak saat sebelum Pilkada. Basyir mengatakan bahwa sosok Saleany Machfudz selaku ketua DPC PKB Kota Pekalongan kurang memihak dirinya dan tim pemenangan Balgis. Tidak Maksimumnya peran Saelany Machfudz menurut Basyir berdampak juga pada kurang maksimumnya dukungan simpatisan PKB lainnya. Hal ini dilihat Basyir berdasarkan survey yang dilakukan oleh tim pemenangan Balgis ketika memetakan wilayah-wilayah yang ditarget menjadi basis suara Balgis-Machrus.

“Sebenarnya tim kita sudah disebar di empat kecamatan. Jadi kita sudah melakukan survey yang dilakukan oleh teman teman di kecamatan. Dan apabila dilihat dari perolehan suara legislatif sebenarnya Golkar menang di 4 kecamatan kemudian PKB menyusul di nomor dua juga ada suaranya di empat kecamatan. Nah berdasarkan ini kan setidaknya kita bisa mengamankan suara di empat wilayah kecamatan tersebut apalagi ada PKS dan Gerindra juga. Artinya apa , gabungan Golkar dan PKB kita menang di seluruh wilayah kecamatan kan begitu harusnya. Akan tetapi terdapat wilayah-wilayah yang tidak maksimumnya teman teman PKB seperti di Pekalongan Timur karena kebetulan pak Saelany sebagai ketua PKB tidak memihak kepada kita” (Wawancara dengan Basyir Achmad, 18 November 2020).

Pada pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa tugas dari seorang tim pemenangan adalah sebagai broker politik yang menghubungkan antara calon kandidat dengan pemilih. Dalam strategi kinerjanya, seorang broker mempengaruhi masyarakat agar memilih salahsatu calon kandidat tertentu dengan mengharapkan sebuah imbalan sebagai balas jasa dari seorang calon kandidat terhadap kinerja para broker yang telah membantunya. Namun terkadang terdapat para broker yang terlihat masuk dalam suatu struktural tim pemenangan suatu calon akan tetapi faktanya broker tersebut tidak memiliki loyalitas dari kepada calon yang didukungnya. Pada akhirnya upaya-upaya yang dilakukan seorang calon kandidat untuk memobilisasi suara dari masyarakat dengan jasa seorang broker menjadi tidak maksimal. Dalam kasus tim pemenangan Balgis, peneliti mendapatkan informasi mengenai para broker terutama mereka yang berada di akar rumput tidak menjalankan loyalitas sebagaimana mestinya.

Beberapa tim pemenangan Balgis di akar rumput atau yangbiasa disebut dengan *Pecut* tidak menjalankan loyalitas kinerja sebagaimana mestinya. Penelti menemukan informasi bahwa terdapat beberapa orang *Pecut* terafiliasi dengan kelompok organisasi masyarakat tertentu yang notabene organisasi masyarakat tersebut justru condong untuk mendukung calon kandidat yang menjadi lawan Balgis. peneliti mendapatkan informasi ini dari salah seorang tim pemenangan yang tidak berkenan disebutkan nama aslinya.

Informan ini merupakan salah satu tim relawan pemenangan Balgis di tingkat RT yang terafiliasi dengan salah satu organisasi masyarakat yang ada di Kota Pekalongan. sebagai seorang relawan tim pemenangan ia menjalankan tugas sebagai seorang broker dengan melakukan pemasaran politik dari calon kandidat Balgis Diab seperti relawan pemenangan pada umumnya yakni dengan strategi pintu-ke pintu dan mendata setiap identitas masyarakat untuk mengamankan suara Bagi Balgis Diab. Akan tetapi , informan juga merupakan anggota dari salah satu organisasi masyarakat yang terafiliasi memberikan dukunganya kapada calon lain dan data diri dari joko sekeluarga sudah didata oleh ormas tersebut sebagai database dukungan suara kepada paslon lawan.

“saya ini sebenarnya relawan dari ibu, tapi saya juga anggota ormas dan ormas saya itu lebih condong ke paslon sebelah mas. Saya sudah mencoba menjelaskan kepada teman-teman saya di ormas kalo saya menjadi relawan dari ibu tetapi data saya dan keluarga sudah di data oleh temanormas saya untuk memilih paslon sebelah. Tapi saya tetap menjalankan tugas saya sebagai tim sukses ibu, tetangga-tetangga di wilayah RT saya sudah saya data per KTP dan saya ajak untuk mendukung ibu. Kalo boleh Jujur saya dilema tapi mau tidak mau ya dijalani” (Wawancara dengan salah satu *Pecut* Tanggal 12 Desember 2020).

Menurutnya, dia bukanlah satu-satunya tim relawan pemenangan Balgis yang menjalankan hal tersebut. Joko tidak menyebutkan secara jumlah spesifiknya akan tetapi Joko mengatakan bahwa beberapa rekanya yang juga merupakan relawan Balgis juga merupakan rekanya di ormas yang sama. Dalam setiap kontestasi elektoral, peran broker sangatlah penting karena para broker inilah yang meyakinkan pemilih untuk memilih pasangan kandidat yang didukungnya sekaligus sebagai perantara untuk memberikan *patronage good* kepada pemilih di akar rumput. Terjadinya fenomena seperti para broker yang mengalami permasalahan kesetiaan dalam hubungannya kepada politisi yang mencalonkan diri dalam Pilkada bukanlah hal yang baru.

Kejadian seperti apa yang dilakukan oleh tim-tim pemenangan Balgis seperti yang dijelaskan diatas biasa terjadi dalam lingkungan politik Indonesia yang kental dengan nuansa transaksional seperti sekarang. Para broker terkadang hanya memanfaatkan kesempatan yang ada hanya untuk kepentingan pribadi. Permasalahan yang terjadi di dalam internal mesin politik dan tim pemenangan Balgis diab ini adalah permasalahan loyalitas politiknya. Pecahnya suara dan dukungan yang notabene berasal dari satu mesin politik yang sama menandakan adanya hubungan yang renggang atau tidak harmonis antara calon kandidat dengan mesin politik yang dibangunnya (Aspinall dan Berenschot, 2019). Sedangkan permasalahan broker seperti Joko yang terafiliasi dengan ormas dimana ormas tersebut justru terafiliasi dengan calon kandidat lain bisa dikatakan sebagai pembelotan. Broker seperti ini terkadang hanya mengelak dan beralibi bahwa dia tetap menjalankan pekerjaannya sebagai broker ganya untuk mendapatkan imbalan sebagai balas jasa atas apa yang dilakukannya akan tetapi

yang terjadi sebenarnya adalah dia hanya mengeluarkan sedikit usaha atau bahkan tidak sama sekali melakukan usaha elektoral.

Pada praktiknya, seorang broker hanya berpikiran pragmatis terhadap kontestasi pilkada. Pola pikir dari para broker ini hanya berorientasi pada kemenangan kandidat dalam pemilihan umum. Sehingga mereka akan berpikir untuk mencari peluang dari kemenangan calon kandidat pesaing lainnya. Bagi para tim kemenangan yang berasal dari partai politik masih dapat menggunakan jalur partai politiknya untuk memperoleh manfaat dari seorang kandidat meskipun kandidat ini kalah pada kontestasi pilkada, akan tetapi tidak bagi broker yang berasal dari relawan non partai. Aspinall dan Berenschot (2019), melihat apa yang fenomena elektoral seperti ini sebagai jejaring gelindingan roda lepas yang tidak menawarkan prospek apapun yang seupa pada para tim kemenangan. Dalam fenomena ini para relawan tidak akan mengharap imbalan apapun karena calon kandidat yang diusung mengalami kekalahan, akan tetapi pola pikir transaksional dari para relawan akan berpikiran bahwa mereka harus mencari peluang lain yang tetap menghasilkan bagi mereka meskipun peluang itu berasal dari kemenangan calon kandidat lain.

2. Isu Gender dan RAS dalam Pilkada Kota Pekalongan

Pelaksanaan Pemilihan umum termasuk juga Pilkada merupakan penerapan nilai-nilai demokrasi. Pelaksanaan pemilu pada umumnya haruslah memenuhi unsur-unsur bebas dan adil (Free and Fair) melalui semangat Civil Liberties yang dibangun (Marwah, 2016). Dengan berlandaskan asas bebas dan adil memaknai bahwa kontestasi pemilu harus memunculkan kesetaraan politik individu baik antara laki-laki dan juga perempuan. Kesetaraan politik yang dimaksud tidak hanya di tingkat nasional saja akan tetapi juga diberlakukan di tingkat lokal. Hal ini karena pada dasarnya politik bersifat netral gender. Dengan demikian kehadiran perempuan di dalam politik memenuhi prinsip kesetaraan politik tersebut. sesuai dengan konsep *politics of presence*, kesetaraan politik ini mengasumsikan bahwa setiap orang dihitung sebagai satu dan tidak boleh ada

satupun yang melebihi orang yang lain. Dengan demikian baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama (Phillips, 1995).

Indonesia sebagai sebuah negara yang menganut asas demokrasi menjamin setiap hak-hak setiap warganegaranya dengan kedudukan yang sama. Hal ini tertuang dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan disini memiliki makna bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak serta kesempatan yang sama terlibat di dalam kancah sosial dan politik. Afirmasi terkait munculnya representasi perempuan dalam politik semakin diperkuat dengan kebijakan afirmasi perempuan yang diatur di dalam Undang-Undang kepemiluan yang dimulai sejak tahun 2004. Dimulainya Pilkada langsung yang diatur di dalam UU No. 32 Tahun 2004 membuka kesempatan bagi tiap-tiap individu maju sebagai calon kandidat kepala daerah dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Dalam perjalanannya UU No.32 Tahun 2004 ini diperbaharui dalam UU No.1 Tahun 2015 yang mengatur mengenai tata cara atau mekanisme dalam pemilihan Kepala Daerah. UU No.1 Tahun 2015 kembali mengalami perubahan menjadi UU No.8 Tahun 2015 dengan substansi yang sama. Dalam aturan UU No.8 Tahun 2015 tidak ada tata cara khusus yang mengatur pencalonan individu baik laki-laki maupun perempuan dalam pemilihan kepala daerah. Dengan Hal ini menandakan bahwa tata cara pemilihan kepala daerah bersifat netral gender. Dengan demikian pelaksanaan Pilkada di Indonesia haruslah menjadi salah satu mekanisme politik yang mampu menghadirkan representasi politik yang imbang antara laki-laki dan perempuan.

Majunya kandidat perempuan dalam politik mengalami peningkatan semenjak bergulirnya Reformasi hingga sekarang. Dalam perjalanannya juga banyak figur-figur perempuan yang berhasil menduduki jabatan-jabatan publik di tingkat lokal seperti kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini pulalah yang mendasari Balgis Diab maju dalam kontestasi Pilkada Kota Pekalongan di tahun 2020 ini. Memang pada faktanya majunya kandidat Balgis Diab sebagai calon kandidat perempuan merupakan yang pertama kali terjadi di Kota Pekalongan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa politik merupakan sesuatu hal yang netral

gender dan Pilkada merupakan salah satu mekanisme yang dapat dilakukan untuk menghadirkan representasi perempuan dalam politik tersebut.

Oleh karena itu, sebagai seorang kandidat kepala daerah perempuan pertama, Balgis membuat strategi-strategi khusus untuk meyakinkan masyarakat bahwa tidak ada salahnya seorang perempuan maju sebagai kepala daerah. Beberapa strategi yang dilakukan salah satunya dengan positioning politik. Strategi positioning yang dilakukan Balgis adalah dengan menanamkan kesan dalam benak masyarakat pemilih untuk dapat membedakan strategi dan produk kampanye politik Balgis dengan calon kandidat lainnya dengan menciptakan sebuah image politik tertentu. Image yang dibangun Balgis antara lain adalah *Pertama*, kiprah politiknya yang telah berjalan sejak lama dan jabatannya sebagai ketua DPRD Kota Pekalongan selama dua periode. Strategi ini adalah untuk memunculkan image bahwa perempuan juga memiliki kapasitas dan kemampuan yang kompeten dalam bidang politik dan Balgis menunjukkan bahwa dirinya berpengalaman menduduki jabatan politik sebagai ketua DPRD Kota Pekalongan. *Kedua*, silaturahmi kepada ulama dan kyai-kyai berpengaruh di kota Pekalongan. Strategi ini menunjukkan bahwa majunya Balgis sebagai calon kandidat Walikota Perempuan pertama sudah mendapatkan restu dan dukungan dari Kyai dan Ulama di Kota Pekalongan. Hal ini dilakukan Balgis dan tim pemenangnya sebagai bentuk antisipasi terhadap isu gender yang mungkin akan mereka hadapi.

“Secara survey yang kita lakukan, Bu Balgis sudah memiliki elektabilitas yang baik di masyarakat hanya saja kita juga harus memikirkan strategi yang bisa kita lakukan untuk menghadapi isu-isu krusial salah satunya adalah isu mengenai gender. Kita bikin strategi untuk sowan ke ulama-ulama selain untuk meminta doa restu yang mencari fatwa penguatan bahwa majunya seorang perempuan itu tidak menjadi persoalan yang besar. Dari hasil bertemu dengan ulama dan kyai tersebut kita mendapatkan jawaban bahwa majunya perempuan sebagai seorang kepala daerah itu dilihat manfaat dan madharatnya untuk umat. Hal ini didasarkan kebanyakan dari kyai-kyai yang kita datangi kediamannya itu tidak begitu menyukai sepak terjang PDIP dalam politik dan dianggap sebagai sebuah mudhorot untuk umat. Nah majunya ibu ini dinilai lebih banyak manfaatnya untuk umat. Nah ibu ini maju di tingkat kota, kami rasa tidak begitu besar sekali masalahnya jika perempuan yang maju, mungkin lain cerita kalau di tingkat nasional. Nah pada intinya itu yang kita bangun, pertama bahwa ibu

mampu membuktikan kemampuannya dalam politik karena sebagai ketua DPRD dua periode dan kita sudah mendapatkan dukugan dari ulama dan kyai sebagai penguatan bahwa perempuan boleh menjadi kepala daerah” (Wawancara dengan Basyir Ahmad, 18 November 2020).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh para tim pemenangan Balgis seperti Heri Dwi Wibawa, Muhammad Syakur dan Muhammad Latef. Pada intinya menurut mereka tim pemenangan Balgis melakukan edukasi-edukasi kepada masyarakat dengan meyakinkan masyarakat bahwa tidak ada larangan perempuan menjadi pemimpin. Selain itu para tim pemenangan juga dibekali dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan agama yang juga menyatakan bahwa sejatinya Allah, Yuhan yang Maha Kuasa menjadikan manusia baik laki-laki dan perempuan itu setara dan memiliki hak yang sama karena yang membedakan hanyalah amal perbuatan yang diperbuatnya.

Namun pada kenyataannya pilkada Pekalongan menghasilkan keputusan bahwa Balgis Kalah suara dari lawanya. Salah satu yang menjadi faktor kekalahan Balgis ini salah satunya adalah karena digaungkanya isu gender dalam pilkada Kota Pekalongan ini. Temuan yang peneliti dapatkan bahwa sebagian struktur sosial masyarakat masih kuat dengan budaya Patriaki. Selain itu terdapat polarisasi pandangan di antara masyarakat pemilih tentang bagaimana mereka menyikapi hadirnya pemimpin perempuan. Hal ini peneliti dapatkan setelah melakukan pengamatan tambahan dan wawancara kepada beberapa masyarakat di Kota Pekalongan. Peneliti pemetaan terhadap pendapat masyarakat Kota Pekalongan mengenai pandangan mereka terhadap pemimpin perempuan. Dari hasil pemetaan tersebut peneliti kelompokkan ke dalam dua golongan. Golongan pertama adalah kelompok masyarakat yang masih berpikir tradisional bahwa peran perempuan adalah hanya di ranah lokal dan Golongan kedua adalah golongan rasional. Dari golongan masyarakat yang masih berpikiran tradisional, sebagian besar respon dari masyarakat yang peneliti dapatkan adalah bahwa masyarakat masih melihat pemimpin dan politik adalah ranah yang dipegang oleh seorang laki-laki. Dan perempuan berkedudukan sebagai penguat dan pendukung laki-laki dari belakang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Supartinah (bukan

nama sebenarnya), salah satu masyarakat pemilih yang berasal dari wilayah Pekalongan Selatan:

“Ya gimana ya mas, imam sholat aja kan laki-laki, imam keluarga juga laki-laki dan saya rasa kalau kepala daerah ya harusnya laki-laki. Sepinter-pinternya perempuan itu tetap perempuan mas, dia harusnya mendukung laki-laki dari belakang. Ini juga sesuai dengan pepatah dibelakang laki-laki sukses ada perempuan hebat. Jadi ya sehebat-hebatnya perempuan ya dia kembali lagi harusnya mendukung dari belakang tidak terjun secara langsung ke politik.” (Wawancara informan, 10 Desember 2020).

Dari apa yang disampaikan oleh Supartinah ini terlihat bahwa sebagian pola pikir masyarakat banyak yang masih memegang kuat pola pikir tradisional yang memandang bahwa ranah perempuan adalah hanya ranah lokal sedangkan ranah publik seperti politik merupakan ranah bagi kaum laki-laki. Meskipun Supartinah bertempat tinggal di wilayah Pekalongan Selatan yang notabene basis PKB dan NU serta banyak tim Balgis yang telah mengkampanyekan bahwa tidak ada larangan bagi pemimpin perempuan, namun masih banyak masyarakat yang masih terjebak pada stigma Patriarki yang melekat erat dengan budaya khususnya di budaya Jawa. Golongan kedua adalah mereka yang tidak memilih pemimpin perempuan dengan alasan rasional. Golongan rasional ini mengatakan bahwa mereka tidak memilih Balgis dengan memunculkan alasan bahwa strategi perempuan itu mudah untuk mendapatkan pengaruh dari orang lain dan juga perempuan kurang bisa mendapatkan tekanan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu anggota organisasi pergerakan perempuan sebagai berikut :

“ Memang Pada dasarnya figur beliau memang dekat dengan masyarakat terutama perempuan, kemudian program-program yang ditawarkan juga memuat unsur-unsur pemberdayaan perempuan, itu sih bagus ya menurut saya. Namun ada yang membuat saya tidak memilih beliau. Sehebat apapun beliau, beliau itu perempuan dan kita tau beliau itu istrinya mantan walikota sebelumnya kan pak Basyir, apakah ada jaminan nantinya beliau bebas intervensi? Apakah ada jaminan dia tidak bisa terpengaruh oleh suaminya? Nah disini sih yang saya pikirkan, kalo secara pribadi dan sepak terjang beliau bagus ya. Apalagi jadi ketua DPRD seorang perempuan itu hebat sekali. Nah ini juga perempuan di politik itu syarat dengan intervensi dan biasanya perempuan kalo dapat intervensi kurang bisa menggunakan logikanya pasti mengedepankan perasaannya, nah nanti bagaimana kalo ketika dia membuat kebijakan atas dasar perasaannya

karena dia tertekan sehingga tidak menggunakan logika? Mungkin kalo untuk dukungan saya lebih memilih beliau untuk aktif di masyarakat tanpa harus menjadi walikota pun tidak masalah seperti itu” (Wawancara Informan, tanggal 10 Desember 2020).

Dari pernyataan narasumber ini dapat kita analisis bahwa terdapat masyarakat pemilih yang juga merupakan seorang perempuan namun dia tidak memberikannya suara dukungannya kepada Balgis. meskipun narasumber ini mengakui kiprah dan sepak terjang dari seorang Balgis Diab, namun narasumber ini tidak serta merta memilih Balgis. isu gender yang dimainkan disini adalah mengenai Stereotip terhadap sosok perempuan yang dia anggap sebagai sosok yang kurang independen karena dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak lain dan juga stereotip terhadap perempuan yang kurang bisa menggunakan logikanya ketika perempuan dalam keadaan tertekan dengan asumsi apabila seorang pemimpin perempuan hanya mengandalkan perasaannya saja ketika merumuskan kebijakan maka kebijakan tersebut tidak akan memiliki muatan yang bagus.

Masih adanya masyarakat yang berpikiran tradisional dengan terjebak pada stigma Patriarki dan juga terdapatnya masyarakat yang melakukan stereotip negatif terhadap perempuan Inilah yang kurang bisa tertangkap oleh Balgis dan Tim pemenangnya. Dengan demikian analisa peneliti mengenai hal ini adalah bahwa tim pemenangan yang disusun Balgis kurang bisa memetakan serta mengkolaborasikan isu-isu gender di lapangan dengan sebuah strategi pemasaran kandidat serta komunikasi politik yang baik. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak faktor. Faktor utamanya adalah kurangnya konsolidasi internal tim pemenangan untuk menangkap fenomena ini dan juga kurangnya para tim pemenangan di akar rumput yang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan isu gender seperti ini. Pada dasarnya pemilihan kepala daerah sebagai suatu proses yang berkelanjutan haruslah memberikan ruang yang setara baik antara laki-laki dan perempuan. Ini dapat dilakukan dengan cara memunculkan kesetaraan gender dalam politik dimana tidak adanya diskriminasi jenis kelamin dalam alokasi sumber daya dan akses yang menjamin hak-hak azasi yang ada. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk mengintegrasikan kesadaran di kalangan masyarakat

mengenai proses rancangan, penerapan serta evaluasi kebijakan-kebijakan untuk memastikan bahwa tidak ada yang dirugikan antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya pengarus utamaan gender, permasalahan-permasalahan seperti stereotip politik dapat dihadapi dan disikapi dengan baik (IFES, 2014).

Selain menghadapi isu gender, Balgis juga menghadapi isu yang berkaitan dengan SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan). Bahkan isu inilah yang juga menjadi alasan mengapa strategi untuk memobilisasi suara dari masyarakat menjadi kurang signifikan dan menyebabkan kekalahan Balgis dalam Pilkada. Kampanye sara yang dihadapi Balgis ini memang tidaklah ditunjukan secara terang-terangan, namun melalui istilah atau jargon-jargon kampanye yang di gunakan tim lawan. Bahkan penggunaan istilah ini sudah dilakukan sejak masa kampanye awal Balgis ketika mencalonkan diri. Seperti yang diungkapkan Basyir Achmad dalam wawancara sebagai berikut:

“Ya hambatan itu ada mas, untuk menanggulangi hal tersebut seperti yang saya katakan tadi mas, kita datang ke teman-teman etnis tionghoa dan etnis lainnya untuk menjalin relasi supaya tidak ada isu SARA seperti yang kita harapkan. Kita sudah dihajar dengan isu gender nah kalo dihajar lagi dengan isu SARA kan repot kita mas. Tapi ya memang kenyatannya gitu ada dan itu cukup merepotkan. Mereka kan ngomongnya Milih Wonge Dewe. Memang mereka tidak secara jelas nyebut milih Wong Jowo, tapi milih wonge dewe. Tapi kan kita tau maksudnya kan jelas bahwa mereka mengkampanyekan untuk memilih calon yang berasal dari etnis yang sama yakni dari etnis jawa” (Wawancara dengan Basyir Achmad, 18 November 2020).

Basyir menambahkan bahwa tagline “*Milih Wonge Dewe*” atau yang memiliki arti “Pilih Orang Kita Sendiri” yang digunakan tim lawan sebagai tagline kampanye mereka itu salah satu indikasi bahwa mereka memainkan isu sara dalam kampanye Pilkada ini. Menurut Basyir, meskipun tidak disebutkan secara langsung akan tetapi orang awam pun dapat memahami maksud dari tagline tersebut. Isu sara ini sendiri Bahkan yang paling berperan dalam menurunnya elektabilitas Balgis Diab di masyarakat. Hal ini seperti yang kembali diperkuat oleh Basyir Achmad bahwa elektabilitas Balgis menurun drastis dari yang sebelumnya 67% turun hingga 55% karena dampak isu politik sara ini.

Selama kampanye pemenangan, tim Balgis sudah bekerja ekstra untuk mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan kembali elektabilitas Balgis yang terkena dampak isu politik SARA ini, akan tetapi tetap saja hal tersebut tidak bisa membuahkan hasil yang maksimal. Indonesia yang memiliki keberagaman yang terbingkai dalam semboyan Bhineka tunggal ika haruslah menghindari politik yang syarat dengan isu-isu yang sensitif seperti ini terutama di dalam proses Pilkada. pelaksanaan pilkada haruslah menghadirkan pemilu yang berintegritas sehingga benar-benar mampu memunculkan calon kandidat yang memiliki kapabilitas dan dapat menciptakan kompetisi yang benar-benar fair (Wawancara dengan Balgis Achmad, 18 November 2020).

3. Jaringan Pengusaha, Modal dan Vote Buying

Perubahan sistem pemilu yang terjadi di Indonesia menjadi pemilihan secara langsung berdampak pada pergeseran dinamika politik terutama munculnya dinamika politik *patronase* dan *klientelisme* (Aspinall & Berenschota, 2019). Patronase sendiri, seperti yang dirujuk dari Shefter (1995) (dalam Aspinall & Sukmajati, 2015), dimaknai sebagai sebuah pembagian keuntungan dari kalangan politisi guna memberikan sesuatu kepada masyarakat pemilih, pekerja kampanye dengan tujuan guna mendapatkan dukungan politik. Sedangkan Klientelisme merujuk pada Hutchcroft (2014) (dalam Aspinall & Sukmajati, 2015), merupakan suatu hubungan antara politisi dengan masyarakat yang berbentuk tukar jasa dimana para politisi memberikan keuntungan material kepada para masyarakat pemilih yang ditukar dengan suara pemilih dalam dukungan politik.

Pada proses Pilkada Kota Pekalongan 2020 baik Balgis maupun pesaingnya sama-sama menggunakan strategi Patron-klient dalam proses untuk mempengaruhi suara masyarakat guna memobilisasi dukungan suara masyarakat untuk mendukung calon kandidat. Kegiatan patron-klient dalam pilkada biasanya dilakukan oleh seorang kandidat melalui perantara jasa dari broker politik (Aspinall & Berenschot, 2019). Balgis sendiri menggunakan jaringan keluarga serta kolega nya sesama pengusaha sebagai broker-broker di dalam struktur tim pemenangnya di pilkada ini. Penempatan jaringan keluarga dan kolega

pengusaha merupakan strategi yang dilakukan Balgis selain untuk membantu modal kampanyenya saja akan tetapi juga sebagai strategi untuk menciptakan patron-klien guna memobilisasi suara masyarakat. Akan tetapi strategi Balgis ini tidak berjalan maksimal dalam upaya memobilisasi dukungan suara masyarakat. Setelah melakukan analisis lebih dalam, kurang maksimalnya strategi jaringan yang dibangun Balgis Diab ini tidak bisa terlepas dari kurangnya dukungan jaringan pengusaha khususnya dari kalangan pengusaha-pengusaha yang beretnis tionghoa sebagai pemberi modal dalam kampanye pemenangan yang dilakukannya.

Peneliti berhasil melakukan wawancara kepada salah seorang masyarakat yang bekerja kepada salah satu pengusaha dari etnis tionghoa di Kota Pekalongan yang menjadi dasar argumen peneliti untuk melakukan analisis terhadap fenomena yang terjadi. Peneliti mewawancarai narasumber bernama Anton (bukan nama sebenarnya) yang merupakan salah satu masyarakat yang bekerja kepada salah satu pengusaha tionghoa. Menurut Anton, jaringan pengusaha-pengusaha dari etnis tionghoa sering melakukan pertemuan tertutup untuk membahas dinamika politik yang terjadi di Kota Pekalongan. dari pertemuan tersebut jaringan pengusaha-pengusaha tionghoa ini sepakat untuk mendukung pasangan calon pesaing Balgis dalam Pilkada. Anton mendapatkan informasi ini secara langsung dari atasannya ketika secara tidak sengaja mendengar atasannya tersebut membicarakan hal ini melalui telepon ketika sedang menelfon koleganya sesama pengusaha etnis tionghoa.

“benar mas, waktu itu saya memang mendengar bahwa pak bos saya telfon dengan temanya mungkin yang sesama pengusaha, kalimat yang disampaikan seperti ini, yawis berarti merah liong mendukung G1 Satu ya” (Wawancara dengan Informan, 12 Desember 2020)

Dari penjelasan Anton ini ada menambahkan bahwa merah itu merujuk pada partai politik pengusung pesaing balgis yakni PDIP dan selain itu anton mengatakan bahwa penyebutan warna merah juga digunakan orang-orang etnis tionghoa sebagai kode mereka. Akan tetapi Anton tidak benar-benar yakin dengan

argumen keduanya tersebut dan lebih meyakini pendapatnya yang pertama yakni warna merah merujuk pada PDI. Sedangkan untuk *Liong* sendiri menurut Anton merujuk pada hewan naga dalam mitologi China. Anton sangat yakin bahwa kata *Liong* disini adalah jaringan pengusaha-pengusaha etnis tionghoa yang ada di Kota Pekalongan sedangkan G-1 Sendiri merupakan kode untuk jabatan Walikota Pekalongan dan kata *Satu* merujuk pada nomor urut satu yang merupakan nomor urut paesaing Balgis di dalam Pilkada.

Dari penuturan anton ini dapat dijadikan dasar argumen peneliti untuk menyatakan bahwa memang pasangan pesaing Balgis mendapatkan dukungan dari para pengusaha-pengusaha etnis tionghoa akan tetapi informasi dari anton bukanlah satu-satunya informasi yang peneliti dapatkan. Informasi kedua peneliti dapatkan dari seorang masyarakat etnis tionghoa bernama Ester yang merupakan seorang relawan dan calon pesaing Balgis dalam pilkada. Menurut Ester memang tim pemenangan dari Balgis juga mendekati etnis tionghoa dan juga jaringan pengusaha-pengusaha tionghoa sebagai bekal modal jaringan sosial di dalam pilkada bahkan tim pemenangan Balgis mendirikan posko pemenangan di kawasan jalan belimbing yang merupakan kawasan pemukiman etnis Tionghoa di Kota Pekalongan. Ester menambahkan bahwa popularitas Balgis memang sudah lama dikenal di kalangan masyarakat tak terkecuali di masyarakat tionghoa, namun hal tersebut bukanlah menjadi jaminan yang mutlak bahwa etnis tionghoa akan memberikan dukungannya kepada Balgis. dalam penjelasannya ini Ester memang tidak menyebutkannya secara general. Ester juga mengkonfirmasi masih banyak juga etnis masyarakat Tionghoa yang memberikan dukungannya kepada Balgis. Ketika peneliti menanyakan perihal apakah Balgis mendapatkan dukungan dari pengusaha-pengusaha tionghoa, Ester memberikan jawaban bahwa kemungkinan kecil pengusaha-pengusaha tionghoa memberikan dukungannya kepada Balgis. Hal ini karena pengusaha-pengusaha tionghoa yang memiliki jaringan yang kuat lebih memilih untuk mendukung calon kandidat yang menjadi lawan dari Balgis.

Jaringan pengusaha memang tidak bisa dilepaskan dari faktor penentu kemenangan dalam kontestasi politik di Indonesia saat ini. Hal ini dikarenakan kepemilikan modal mereka yang cukup besar untuk dapat membantu seorang kandidat secara finansial ketika seorang kandidat tersebut maju di dalam kontestasi politik. Para kandidat berpikir bahwa kontestasi pilkada langsung seperti saat sekarang tidak memungkinkan apabila hanya berpegangan kepada mesin partai politik saja akan tetapi seorang kandidat perlu membentuk struktur tim pemenangnya sendiri (Aspinall & Berenschot 2019). Dalam membentuk struktur politik inilah bergabungnya jaringan-jaringan pengusaha sangat berpengaruh kepada modal yang akan diperoleh oleh seorang kandidat yang mana modal tersebut nantinya digunakan sebagai sebuah *Patronage Goods* yang berguna untuk membeli suara dan memobilisasi suara dukungan masyarakat dalam Pilkada atau yang biasa disebut dengan *Vote Buying* (Aspinall & Sukmajati, 2015).

Seperti yang disampaikan Basyir Achmad bahwa secara struktural etnis-etnis Tionghoa dan juga etnis Arab tidak menghendaki masuk kedalam struktural tim kemenangan dan memilih untuk menjadi sekedar relawan. Begitupula yang terjadi pada jaringan pengusaha di masing-masing kandidat. Balgis sendiri juga didukung oleh para aktor-aktor pengusaha dalam kemenangannya. Terbukti di dalam struktural tim kemenangannya terdapat orang-orang yang berasal dari latar belakang pengusaha. Namun, yang menjadi titik lemah disini adalah pengusaha-pengusaha yang memberikan dukungan kepada Balgis merupakan pengusaha sukarela dan bukan merupakan pengusaha yang berjejaring. Argumen peneliti mengenai Hal ini seperti yang dijelaskan oleh M.Latief sebagai berikut :

“Kalo pengusaha –pengusaha yang menukung pencalonan Bu Balgis ini ada mas. Terutama di Pekalongan selatanbanyak pengusaha-pengusaha batik lokal yang mendukung ibu, namun dukungan yang diberikan atas dasar inisiatif perseoangan. Jadi ya dia memang mengeluarkan uang pribadinya untuk mengkampanyekan ibu kepada masyarakat. Jadi ya dukungannya sebatas itu tanpa harapan timbal balik” (Wawancara M.Latief, 5 November 2020).

Dari apa yang disampaikan oleh Latief berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Ester. Memang kedua calon kandidat sama sama didukung oleh pengusaha namun dalam bentuk yang berbeda. Munculnya jaringan pengusaha di kubu kandidat pesaing Balgis pada akhirnya berdampak pada dukungan suara masyarakat di kelas bawah. secara pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dari hasil wawancara dengan narasumber-narasumber sebelumnya, dapat peneliti analisis bahwa sebenarnya untuk jaringan pengusaha-pengusaha khususnya pengusaha tionghoa ini tidak menunjukan sepak terjangnya secara langsung dalam hal memberikan dukungannya kepada calon terutama calon kandidat pesaing Balgis. Sama seperti apa yang disampaikan Basyir bahwa mereka tidak mau masuk ke dalam struktural tim pemenangan. Namun kemudian hal ini diperkuat dengan argumnen bahwa tidak masuk struktural tim pemenangan belum tentu tidak mendukung. Jaringan pengusaha ini pada akhirnya berperan sebagai aktor-aktor politik yang bekerja secara tidak langsung sebagai makelar suara yang memberikan pengaruh terhadap suara pemilih melalui modal-modal yang diberikan.

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai studi strategi elektoral Balgis Diab dalam Pilkada Kota Pekalongan 2020 dapat diarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Balgis merupakan salah satu tokoh yang populer di Kota Pekalongan. Kiprah Balgis Diab di kalangan masyarakat Kota Pekalongan sudah cukup terkenal. Balgis merupakan salah satu tokoh yang populis di masyarakat hal ini dikarenakan kiprah Balgis yang merupakan istri dari mantan Walikota Pekalongan Basyir Achmad Syawie yang mendampingi suaminya selama dua periode (2005-2015). Sebagai seorang istri walikota kiprah balgis di masyarakat sangatlah banyak. Hal ini dapat dilihat dari beberapa organisasi sosial kemasyarakatan yang di ikutinya seperti diantaranya Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekalongan (2005-2015), Ketua Penasehat Himpaudi Kota Pekalongan (2010-2015), dan Ketua PKBI Kota Pekalongan (2010-2015). Selain aktif dalam kiprah sosial masyarakat, Balgis juga dikenal sebagai sosok politisi yang cukup mumpuni di Kota Pekalongan hal ini dibuktikan dengan karir politiknya yang cemerlang di Kota Pekalongan. beberapa jabatan politik pernah ia pegang seperti Ketua DPC Partai Golkar Kota Pekalongan dan pada tahun 2009-2014 dia berhasil menjadi anggota DPRD Kota Pekalongan dari fraksi Golkar. Tidak hanya berhenti disitu karir politik Balgis terus meningkat dengan berhasil terpilih untuk nmenjadi Ketua DPRD Kota Pekalongan untuk dua periode yakni (2014-2019) dan (2019-2024). Pada tahun 2020 Balgis maju sebagai calon Walikota Pekalongan berpasangan dengan Mochammad Machrus dari PKB sebagai calon kandidat Wakil Walikota Pekalongan. dalam pencalonan di Pilkada ini Balgis di dukung oleh kima partai dari jumlah seluruh partai yang ada di DPRD kota Pekalongan yakni Golkar, PKB, PKS, Gerindra dan Nasdem.

Mengenai strategi elektoral yang dilakukan oleh Balgis Diab dalam membentuk mesin politik adalah dengan melibatkan orang-orang yang berasal dari unsur partai politik pengusung seperti Golkar dan PKB ditambah dengan partai pendukung lainnya seperti PKS, Gerindra, dan Nasdem. Selain melibatkan orang-orang dari unsur partai politik di dalam struktural tim pemenangan yang dibentuk, Balgis juga melibatkan tokoh-tokoh non partai politik. Tokoh-tokoh yang bukan berasal dari partai politik tersebut berasal dari jaringan keluarga dan juga berasal dari jaringan kolega sesama pengusaha. Di dalam struktural tim pemenangan, Balgis juga melibatkan tokoh yang berasal dari jaringan kultural NU selain dari jaringan internal keluarga dan jaringan kolega pengusaha. Hal ini terlihat dari ketua tim pemenangan tingkat kota yang dijabat oleh seorang tokoh yang merupakan wakil ketua PCNU Kota Pekalongan. Selain membentuk tim pemenangan di tingkat pusat, Balgis juga menggunakan strateginya untuk membentuk tim pemenangan di bawah struktural tim pemenangan pusat. Tim di tingkat bawah ini terbagi menjadi tiga tingkatan struktural yakni tim kecamatan, tim kelurahan dan tim RT/RW. Khusus di tingkat RT/RW, Balgis membentuk lagi sebuah tim yang dinamakan sebagai Pecut yang pada intinya merupakan sebuah tim jaringan perantara atau yang biasa disebut dengan broker politik. Para tim pecut ini selain dibentuk sebagai perantara Balgis sebagai calon kandidat dengan masyarakat kalangan bawah, juga dibentuk untuk memobilisasi suara masyarakat terutama masyarakat bawah.

Di dalam upaya memobilisasi suara masyarakat, Balgis menggunakan beberapa strategi yakni sebagai berikut :

a. Strategi penguatan jaringan Mesin Politik

Strategi ini dilakukan dengan konsolidasi dan penguatan mesin politik yang dibangun oleh Balgis. Penguatan dilakukan agar di dalam melakukan kerja kampanye, tim ini mampu bekerja sesuai dengan arah dan strategi yang terstruktur dan sistematis mulai dari pusat hingga ke tingkat RT/RW

b. Strategi Pemetaan Wilayah

Strategi ini dilakukan untuk memetakan wilayah-wilayah yang menjadi basis suara untuk pemenangan Balgis Diab .

c. Strategi Pengamatan Segmentasi dan Targeting Pemilih

Strategi ini dilakukan sebagai tindak lanjut setelah dilakukan pemetaan wilayah. Strategi ini dilaksanakan dengan melihat segmentasi isu di tiap-tiap wilayah dan juga melihat struktur sosial masyarakat di wilayah tersebut

d. Strategi Positioning

Strategi ini dilakukan setelah melihat segmentasi dan target masyarakat, strategi positioning dilakukan sebagai dasar pembentukan program-program yang ditawarkan tim balgis kepada masyarakat di tiap wilayah

e. Strategi pendataan masyarakat dengan cara pintu ke pintu

Hal ini dilakukan oleh tim pemenangan di tingkat akar rumput. Tim pemenangan mendata identitas tiap calon pemilih. Data ini kemudian digunakan sebagai modal mengawal suara hingga ke TPS pada hari pemilihan.

Dalam pelaksanaan pilkada Kota Pekalongan 2020, Balgis Mengalami kekalahan dari kandidat lawan. Analisa kekalahan Balgis ini disebabkan oleh beberapa faktor utama yakni:

a. Permasalahan ketidak solidan di internal tim pemenangan Balgis Diab

Terdapat tim-tim pemenangan yang tidak solid di dalam struktur mesin politi Balgis Diab. Hal ini meliputi pecahnya suara dukungan NU dan PKB di tambah dengan masalah tidak loyalnya tim sukses di akar rumput. Sehingga membuat kinerja dari tim pemenangan balgis ini menjadi terganggu dan berpengaruh pada tidak maksimalnya upaya mobilisasi suara masyarakat.

b. Serangan isu gender dan SARA terhadap Balgis Diab

Masih terdapatnya sekelompok masyarakat yang memandang bahwa perempuan tidak boleh jadi pemimpin hal ini dikarenakan masih kuatnya budaya patriarkh dalam struktur masyarakat di Kota Pekalongan. selain masalah gender terdapat kampanye isu SARA yang dilakukan tim lawan sehingga balgis mengalami penurunan elektabilitas dan berpengaruh pada penurunan suara

c. Jaringan Pengusaha sebagai modal politik

Balgis tidak didukung oleh jaringan pengusaha terutama dari pengusaha-pengusaha etnis tionghoa. Jaringan pengusaha ini memberikan dukungannya kepada kandidat yang menjadi lawan dari Balgis diab sehingga menyebabkan secara modal finansial di dalam kampanye tim lawan memiliki modal yang lebih besar dan mampu memobilisasi suara masyarakat dengan membeli suara masyarakat.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang bisa peneliti sampaikan sebagai dasar bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pentingnya Pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk mengedukasi masyarakat bahwa pada dasarnya baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam politik salah satunya di dalam pilkada.
2. Perlunya peningkatan pemahaman bahwa diperlukan strategi elektoral yang baik di dalam penyusunan tim kampanye bagi seorang kandidat. Selain itu membangun kesolidan di internal tim pemenangan untuk menghadapi segala kemungkinan yang bisa saja terjadi.
3. Perlunya memberikan edukasi kepada sesama generasi muda mengenai pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi tanpa harus menggunakan politik transaksional dan politik uang agar kehidupan demokrasi Indonesia kedepanya menjadi lebih baik.

4. Lebih ditingkatkan kembali edukasi kepada pemilih bahwa suara mereka haruslah didasarkan pada logika rasionalitas yang benar–benar berkualitas. Masyarakat harus jeli terhadap calon pemimpin yang akan menjadi pemimpinnya. Oleh karena itu sebaiknya masyarakat jangan dengan mudah memberikan suaranya hanya dengan iming –iming sejumlah uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Substansi

- Aspinall, Edward & Ward Berenschot. 2019 *“Democracy For Sale: Pemilihan Umum, Klientelism, dan Negara di Indonesia”* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Aspinall, Edward & Mada Sukmajati. 2015 *“Politik Uang di Indonesia : Patronase dan Klientelisme dalam Pemilu Legislatif 2014”* Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Elizabeth, Misbah Zulfa. 2019 *“Resistensi Perempuan Parlemen : Perjuangan Menuju Kesenjangan Gender.”* Depok: LP3ES.
- Fakih, Mansour. 1966 *“Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial.”* Depok: LP3ES.
- Firmanzah. 2008 *“Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas.”* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Firmanzah. 2011 *“Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi.”* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Phillips, Anne. 1995 *“The Politics of Presence”* United States Of America : Oxford Press.

Buku Teori

- Budiardjo, Miriam. 2008 *“Dasar-Dasar Ilmu Politik* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fakih, Mansour. 1999 *“Analisis Gender & Transformasi Sosial”* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Rian. 2011 *“Gender dan Strategi Pengarus-Utamannya di Indonesia”* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Schroder, Peter. 2013 "*Strategi Politik*" Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung Fur die Freiheit, Indonesia..

Stokes, Susan C. 2000 "*Perverse Accountability :A Formal Model Of Machine Politics With Evidence From Argentina*" American Political Science Review

Buku Metodologi

Marsh, David & Gerry Stoker. 2017 "*Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*" Bandung : Penerbit Nusa Media

Moleong, Lexy J. 2014 "*Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*" Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Sugiyono. 2012 "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* " Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Sugiyono. 2010 "*Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* " Bandung : Alfabeta

Jurnal Penelitian

Abdullah, J "Kesetaraan Gender dalam Islam", *Journal Musawa* Vol.1 No. 1, 2009.

Alfiyan, Dwi Noprianto, dkk "trategi Pemenangan Pasangan Idza Priyanti-Narjo (IJO) dalam Pemilikada Kabupaten Brebes", *Journal of Politic and Government Studies* Vol.2 No. 2, 2013.

Darwin, Rizkika Lhena, dkk "The Power of Female Brokers: Local Elections In North Aceh", *Countemporary Southeast Asia* Vol.39 No. 3, 2017

Fadli,Yusuf "Islam, Perempuan dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi", *Journal of Government and Civil Society* Vol.1 No. 1, 2017

Hidayat,Muhattir "Strategi Politik Pemenangan Pasangan Kandidat Vonnie Anneke Panambunan -Joppi Lengkong dalam Pemilukada

- Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015”, *Journal Politico* Vol.1 No. 1, 2016
- Jumriani “Perempuan dan Politik (Strategi Komunikasi Politik untuk Pemenangan Bupati Indah Putri pada Pilkada Luwu Utara 2015)”, *Jurnal Commercium Kajian Masyarakat Kontemporer* Vol.2 No. 1, 2019.
- Kartika, Ika “Modal Kandidat Perempuan dalam Pilkada Tahun 2017 (Studi Kasus: Tjhai Chui Mie Sebagai Walikota Terpilih di Kota Singkawang)”, *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* Vol.15 No. 1, 2019.
- Lerah, Arifin “Strategi Incumbent Dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sitaro Tahun 2013”, *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2015.
- Machmud, Hadi “Perempuan dan Politik Lokal (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah di Sulawesi Tenggara”, *Izzah : Jurnal Hasil Penelitian* Vol.14 No. 1, 2019.
- Mahsun, Muhammad dan Rofiq. Laporan Penelitian “Demokrasi dan Rezim Lokal Kontemporer: Studi di Kota Semarang dan Kota Pekalongan”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.
- Marwah, Shofa “Perempuan dan Pilkada Langsung”, *Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak* Vol.3 No. 1, 2008.
- Marwah, Shofa “Representasi Perempuan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak di Jawa Tengah Tahun 2015”, *Jurnal Politik* Vol.1 No. 2, 2016
- Maula, Atiqotul “Perempuan dan Politik dalam Kontestasi Pilkada di Jombang”, *In Right : Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* Vol.6 No. 1, 2016
- Morse, Jordan Gans, dkk “*Varieties Of Clientelism: Machine Politics during Elections*”, *Journal of Political Science* Vol.58 No. 2, 2014

- Novitasari, Rika, Tikka Dessy Harsanti "Strategi Calon Kepala Daerah Perempuan Dalam Kontestasi Politik Di Kota Batu Tahun 2017", *WASKITA Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter* Vol.3 No. 1, 2019
- Pandiangan, Lidya Victoria "Perempuan Politisi Minangkabau dalam Dunia Politik : Studi Tentang Alasan Perempuan Memaknai Politik.", *Jurnal Unair* Vol.6 No. 2, 2018
- Paradita, Wenny. Dwika "Partai Politik dan Kontestasi Perempuan dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Batang.", *SENAS POLHI* Vol.1 No. 1 2019
- Qomariyah, Nunung dkk. "Perempuan di Pilkada Serentak 2015: Perspektif perempuan dan lingkaran kekuasaan di sekitar calon perempuan", *Yayasan Satu Nama*. 2016
- Robert W, Connell "Understanding Men: Gender Sociology and the New International Research on Masculinities", *Social Thought & Research* Vol.24 No.1 2001
- Samsa, Alrdi "Strategi Politik Identitas Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 (Studi Tentang Kemenangan Ade Kartika di Daerah Pemilihan II Kabupaten Majalengka", *Arista Jurnal* Vol.9 No. 1 2020
- Sari, Widya. I "Kontestasi Politik: Strategi Pemenangan Paslon Faida-Muqit dalam Pilkada Jember 2015.", *Jurnal Politik Muda* Vol.6 No. 3 2017
- Savirani, Amalinda, Thesis "Business and Politics in Provincial Indonesia: The Batik and Construction Sector in Pekalongan, Central Java",
- Zamroni, Mohammad "Perempuan dalam Kajian Komunikasi dan Gender", *Jurnal Dakwah* Vol.14 No.1 2013

LAMPIRAN

FOTO- FOTO KEGIATAN



Foto bersama setelah melakukan wawancara dengan M. Latief, Tim Pemenangan
Balgis-Machrus Pekalongan Selatan , 5 November 2020



Foto bersama setelah melakukan Wawancara dengan Heri Dwi Wibawa,
Sekretaris Tim Pemenangan pusat Balgis-Machrus, 6 November 2020



Foto bersama setelah melakukan Wawancara dengan Azmi Basyir, Ketua Tim Pemenangan Balgis-Machrus Pekalongan Utara, 17 November 2020



Foto bersama setelah melakukan Wawancara dengan Informan utama Balgis Diab Calon Walikota Pekalongan dan M. Basyir Achmad Syawie, Ketua Tim Penasehat Balgis-Machrus Pekalongan Utara, 18 November 2020

CURICULUM VITAE



Nama : Handhita Timur Adliima

TTL : Pekalongan, 7 Desember 1995

Alamat : JL Kusuma Bangsa IC/25 Kandang Panjang

RT 05/ RW 05 Kota Pekalongan

NIM : 1706016060

Jurusan: Ilmu Politik

Fakultas: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

IPK : 3,91

Agama : Islam

Email : timuradliimahandhita@gmail.com

HP : 0895415105710

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Negeri Kusuma Bangsa Pekalongan
2. SD Negeri Panjang Wetan 01 Pekalongan
3. SMP Negeri 2 Pekalongan
4. SMA Negeri 2 Pekalongan
6. S-1 ILMU POLITIK UIN WALISONGO SEMARANG

RIWAYAT ORGANISASI

1. Ketua Osis SMP Negeri 2 Pekalongan
2. Dewan Penggalang SMP Negeri 2 Pekalongan
3. PKS SMP Negeri 2 Pekalongan
4. Wakil Ketua Osis SMA Negeri 2 Pekalongan
5. Komandan Pasukan Khusus Paskibra SMA Negeri 2 Pekalongan
6. HMJ Fisika Undip Semarang

7. HMJ ILMU POLITIK UIN Walisongo Semarang
8. Kabiro. SDM PURNA PASKIBRAKA INDONESIA PROV.JATENG
9. BIRO.Hubungan Antar Lembaga PURNA PASKIBRAKA INDONESIA
10. KADIV. HUMAS Ikatan Duta Wisata Jawa Tengah
11. Asosiasi Duta Wisata Indonesia
12. Generasi Baru Indonesia Semarang Awardee Beasiswa Bank Indonesia

PRESTASI

1. Paskibraka Kota Pekalongan 2011
2. Paskibraka Provinsi Jawa Tengah 2012
3. Juara 1 Duta Wisata Kota Pekalongan 2015
4. Juara 1 Duta Wisata Jawa Tengah 2015
5. Juara Special Duta Wisata Indonesia 2016
6. Juara 1 Duta UIN Walisongo 2018
7. Top 8 Debat Politik Mahasiswa Nasional 2019
8. Juara 3 Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2020
9. International Presenter The 1st Confrence on Islamic Community Service (ACICS) 2020
10. Delegetated of The International Student Competitions “ Human Development And Natural Resource towards sustainability An International Prespective 2020
11. 50 rank Asian’s Youth Exchange- Turkey 2020

BEASISWA

Beasiswa Prestasi UIN Walsongo Semarang (2018)

Beasiswa Bank Indonesia (2019)